

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**ANALISIS KINERJA PENGAWAS SEKOLAH DASAR
DALAM MELAKSANAKAN KEPENGAWASAN
DI KECAMATAN SAMALANTAN
KABUPATEN BENGKAYANG**

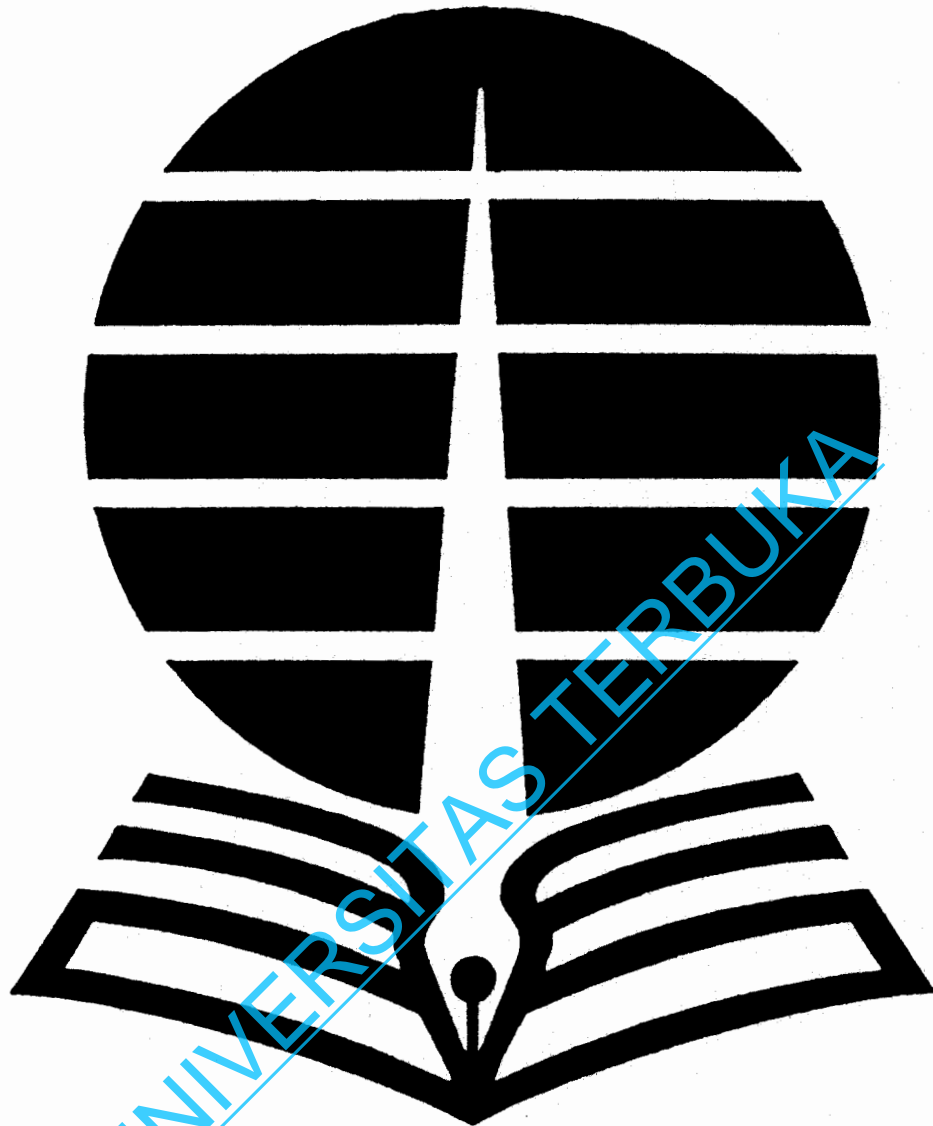
**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

A L A D I N

NIM. 014707332

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010**



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul
Analisis kinerja pengawas sekolah dasar dalam melaksanakan kepengawasan
di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang adalah hasil karya saya
sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya
nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Pontianak, 22 Oktober 2010
Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGUNGSIAN
53EBEAAF513733904
6000 DJP
ALADIN
Nim: 014707332

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Kinerja Pengawas Sekolah Dasar
 Dalam Melaksanakan Kepengawasan di
 Kecamatan Samalantan Kabupaten
 Bengkayang
Penyusun TAPM : Aladin
NIM : 014707332
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Jum'at / 22 Oktober 2010

Menyetujui:

Pembimbing II,



 Suratinah, M. Ed, Ph.D
 NIP. 195609021983012001

Pembimbing I,

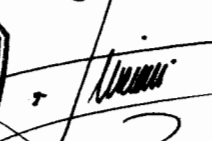

 Dr. Fatmawati, M. Si
 NIP. 196004071990032001

Mengetahui,

Ketua Bidang ISIP


 Dra. Susanti, M. Si
 NIP. 196712141993032002

Direktur Program Pascasarjana,


 Suciati, M. Sc, Ph.D
 NIP. 194520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : ALADIN, S.Pd
NIM : 014707332
Program Studi : Administrasi Publik

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia TAPM Program Pascasarjana,
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jum'at / 22 Oktober 2010
Waktu : 18.30 – 20.30 Wiba

Dan telah dinyatakan **LULUS**


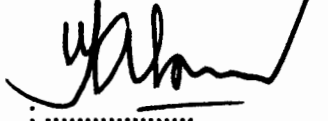
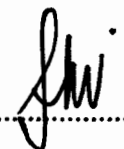

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Dra. Susanti, M.Si
NIP. 196712141993032002

Penguji Ahli : Dr. Roy V. Salomo, M. Soc. Sc

Pembimbing I : Dr. Fatmawati, M. Si
NIP. 19604071990032001

Pembimbing II : Suratinah, M. Ed, Ph.D
NIP. 195609021983012001


 :

 :

 :

 :



ABSTRAK**Analisis Kinerja Pengawas Sekolah Dasar Dalam Melaksanakan
Kepengawasan di Kecamatan Samalantan
Kabupaten Bengkayang****A L A D I N**

Universitas Terbuka

Aladin-spd@yahoo.com**Kata Kunci: kinerja pengawas sekolah, pembinaan kepada guru-guru**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja pengawas sekolah dasar dalam melaksanakan kepengawasan di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang yang mengacu pada tupoksi program kepengawasan sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Kepmenpan No. 118 Tahun 1996.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dan subjek penelitian adalah pengawas sekolah, beberapa kepala sekolah, guru-guru, dan instansi terkait.

Hasil analisis yang dilakukan terhadap data penelitian dalam mengungkap dan menjawab pertanyaan bagaimana kinerja pengawas sekolah dasar dalam melaksanakan kepengawasan, yang dihadapkan dengan faktor penghambat seperti letak sekolah menempuhnya dengan kondisi jalan yang memprihatinkan, kondisi gedung sekolah rusak dan fasilitas kelas sangat kurang, serta sosial ekonomi masyarakat, demikian pula pembinaan terhadap guru-guru, pengawas sekolah mendapat kesulitan merubah kebiasaan aktivitas belajar mengajar di kelas, seperti kekurangan guru mengajar, penggunaan bahan ajar dan metode mengajar yang minim serta jarang guru menggunakan alat peraga.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pengawas sekolah dasar dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada guru-guru belum menunjukkan kinerja yang optimal atau dapat dikatakan kinerja pengawas sekolah masih dalam kualitas yang rendah.

Kinerja pengawas sekolah dapat terbantu oleh pengaruh faktor pendukung berupa komitmen kepala sekolah dan guru-guru yang tetap konsisten dalam menjalankan tugas walaupun letak geografis sekolah tidak representatif dan kondusif tetapi guru-guru tetap menjalankan tugas tanpa pamrih, menyebabkan pengawas sekolah lebih banyak melakukan toleransi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

ABSTRACT

**Performance Analysis of School Trustees Association In Implementing
Oversight in District Samalantan
Bengkayang Regency**

A L A D I N

Open University

aladinspd@yahoo.id.com

Keywords: Performance of the school superintendent, guidance to teachers

This research was conducted to determine how the performance of Elementary School superintendent in carrying out the oversight in the District Samalantan referring Bengkayang District tupoksi oversight program in accordance with article 3 paragraph 1 Kepmenpan No. 118 tahun 1996.

This study used qualitative methods to the type of descriptive research, and research subjects is thye school superintendent, several school principals, teachers, and related agencies.

The result of the analysis conducted on the research data in uncovering and answer the question how the performance of elementary school superintendent in carrying out the oversight, confronted with the inhabiting factors such as the schools are paths with appalling road conditions, the condition of damaged school buildings and classroom facilities are very less, as well as socio-economic community, as well as guidance to teachers, school supervisors have difficulty in changing habits of classroom teaching and learning activities, such as the less planning teachers to teach, the use of teaching materials and teaching methods are minimal and the lack of teachers using visual aids.

In conclusion, this study shows that the performance of elementary school superintendent in conducting supervision and guidance to the teachers do not show optimal performance or it can be said the performance of the school superintendent is still in low quality.

The performance of the school superintendent might be helped by the influence of the supporting factors in the form of commitment the school principals and teachers who remain consistent in performing their duties despite the geographical position is not representative and conducive school but the teachers still performing their duties selflessly, causing the school superintendent to do more customized tolerance with field conditions.



BIODATA PENULIS

1. Nama : Aladin, S.Pd
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Raya, 12 Nopember 1962
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Status : Kawin
5. Alamat : Jalan Belimbing Blok F No. 6 Perumnas Roban
Singkawang Tengah
6. Agama : Kristen Protestan
7. Pekerjaan : PNS
8. Pendidikan terakhir : S1
9. Nama keluarga : a. Isteri : Dra. Ruth Koesoemarini
b. Anak : 1). Esther Yudika Arijaya
2). Albert Yehzekiel Arijaya
3). Yoram Estomihi Arijaya
4). Ernes Gracia Arijaya
10. Hobi : Menonton olahraga *boxing*, olahraga badminton



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena Kasih dan AnugerahNya penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) berjudul “Analisis Kinerja Pengawas Sekolah Dasar dalam melaksanakan Kepengawasan di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang” yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 2 (S2) pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.

Pada saat proses penulisan TAPM ini, penulis telah menerima saran, petunjuk serta bimbingan sehingga TAPM ini dapat diselesaikan dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Dr. Fatmawati, M.Si, selaku pembimbing Pertama yang telah banyak meluangkan waktu membantu, membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dr. Suratinah, M.Ed, selaku Pembimbing Kedua yang dengan tekun memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam penyelesaian tesis ini.
3. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed. Ph.D, Rektor Universitas Terbuka Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.
4. Suciati, M. Ed, Ph. D, Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPJJ di Jakarta, yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada

penulis untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik.

5. Ir. Edward Zubir, MM, selaku Ketua UPBJJ-UT Pontianak yang telah banyak memberikan saran, dorongan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan TAPM pada Program Studi Administrasi Publik di UPBJJ-UT Pontianak.
6. Para Guru Besar dan seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang dengan tulus telah membina dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis untuk mengembangkan diri di masyarakat kelak.
7. Seluruh staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan segala layanan administrasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan tanpa hambatan yang berarti.
8. Suryadman Gidot, S. Pd, Bupati Bengkayang yang telah memberikan kesempatan penulis melanjutkan tugas belajar.
9. Muslianus Liat, S.Pd dan Alexander, S.Pd selaku pengawas sekolah di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang dengan sikap terbuka dan tulus memberikan informasi dan kesediaan waktu kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi penyelesaian TAPM ini.
10. Seluruh Kepala Sekolah, Guru-guru dan segenap sivitas sekolah dasar di Kecamatan Samalantan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu berkedudukan sebagai informan yang telah memberikan informasi yang berharga kepada penulis.

11. Pegawai instansi terkait di lingkungan Diknas Kecamatan Samalantan dan Kabupaten Bengkayang demi memperoleh data primer dan sekunder yang telah memberikan informasi yang sangat berarti untuk kelengkapan data sehingga melancarkan kegiatan penelitian di lapangan.
12. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak satu angkatan yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu bersama-sama membagi pengalaman selama studi serta memberi motivasi dalam penulisan tesis ini.

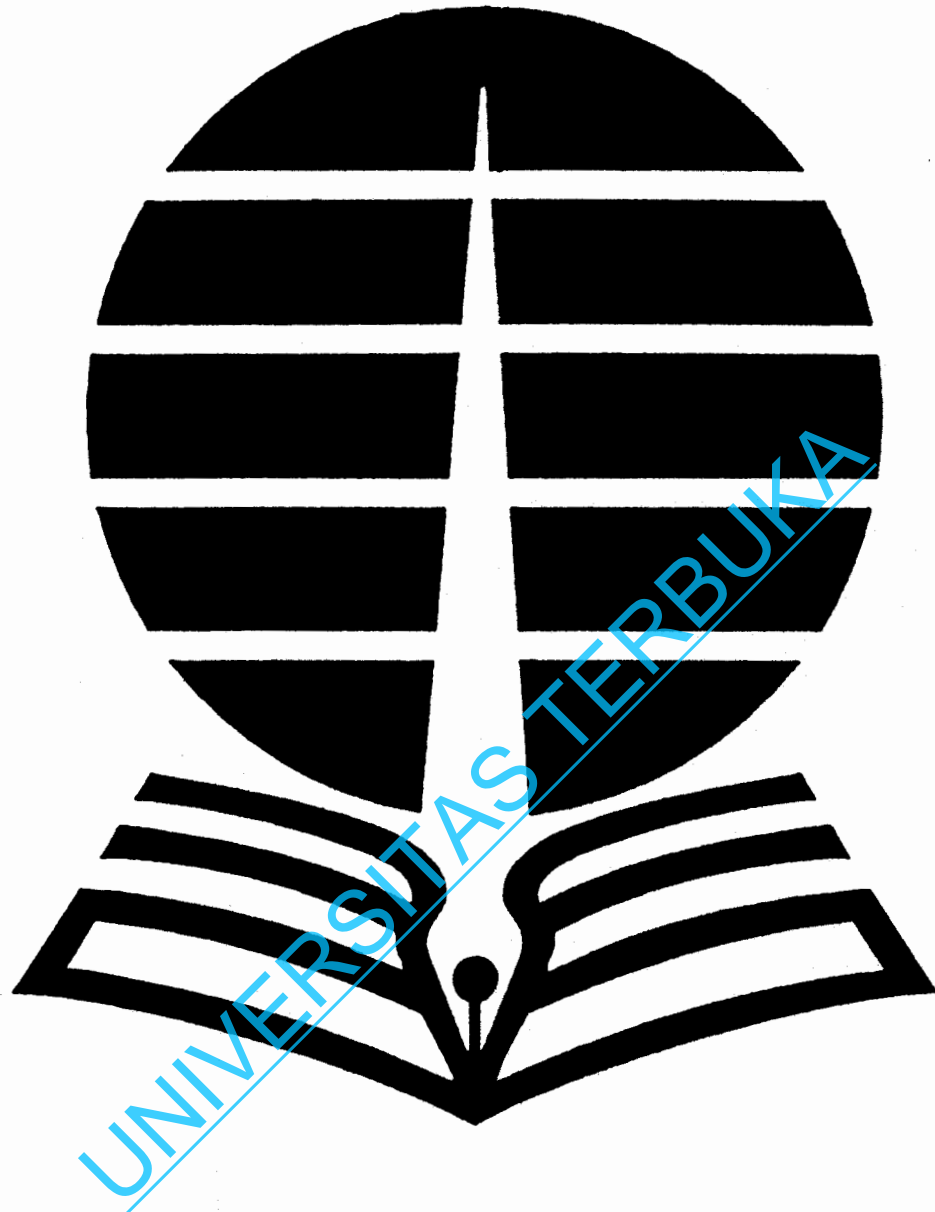
Pada kesempatan ini pula penulis tidak lupa menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang tulus kepada keluarga penulis (orang tua, kakak, adik, isteri Ruth Koesoemarini dan anak-anakku terkasih: Esther Yudika Arijaya, Albert Yehezkiel Arijaya, Yoram Estomihi Arijaya, dan Ernes Gracia Arijaya) yang memberikan *support*, do'a untuk dapat menyelesaikan pendidikan tinggi program pascasarjana ini.

Akhir kata, semoga segala budi baik dari semua pihak mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Tuhan. Yang Maha Pengasih.

Bengkayang, 22 Oktober 2010

Penulis,

ALADIN



DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Lembar Pernyataan.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Biodata	v
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori	9
1. Kepengawasan sebagai bagian dari Kegiatan Administrasi	9
2. Tugas Pengawas Sekolah.....	14
3. Kinerja Pengawas Sekolah.....	20
4. Pengukuran Kinerja.....	23
5. Akuntabilitas dan Efektivitas Tugas Pengawas Sekolah.....	27
B. Definisi Konsep dan Operasional.....	33
1. Definisi Konsep.....	33
2. Definisi Operasional.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Desain Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35

C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Alat Pengumpul Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Keadaan Geografis dan Iklim	39
2. Keadaan Demografis Kecamatan Samalantan.....	40
3. Keadaan Sekolah, Guru-guru dan Murid-murid.....	45
4. Potensi Pengelola Sekolah di Kecamatan Samalantan.....	51
B. Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Pengawas Sekolah di Kecamatan Samalantan.....	52
1. Akuntabilitas dan Efektivitas Kepengawasan.....	55
a. Akuntabilitas dan Efektivitas Program Kegiatan Pengawasan	55
b. Akuntabilitas dan Efektivitas Kunjungan ke Sekolah.....	57
2. Akuntabilitas dan Efektivitas pembinaan terhadap guru-guru....	68
a. Akuntabilitas dan Efektivitas Pembinaan Belajar Mengajar di Kelas.....	68
b. Akuntabilitas dan Efektivitas Pembinaan Administrasi Kelas	77
c. Akuntabilitas dan Efektivitas Belajar Anak Didik.....	81
d. Akuntabilitas dan Efektivitas pembinaan Profesi Guru-guru..	85
C. Faktor Dukungan dan Hambatan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan oleh Pengawas Sekolah di Kecamatan Samalantan	90
1. Faktor Pendukung.....	90
a. Tanggungjawab atau Komitmen Kepala Sekolah Untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan.....	91
b. Komitmen guru-guru dalam menjalankan Tugas sebagai Pendidik	97
c. Program dana BOS di Kecamatan Samalantan	98
2. Faktor Penghambat.....	100
a. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Guru-guru	101
b. Minimnya Fasilitas dan Sarana Pendidikan	105

c. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	108
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	110
A. Simpulan.....	110
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara	114
2. Pedoman Observasi	117
3. Hasil Wawancara	118
4. Hasil Observasi	130
5. Daftar Informan	131
6. Surat Tugas Penelitian	132
7. Peta Kecamatan Samalantan	133
8. Foto-foto Penelitian	134
9. Biodata Peneliti	135

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

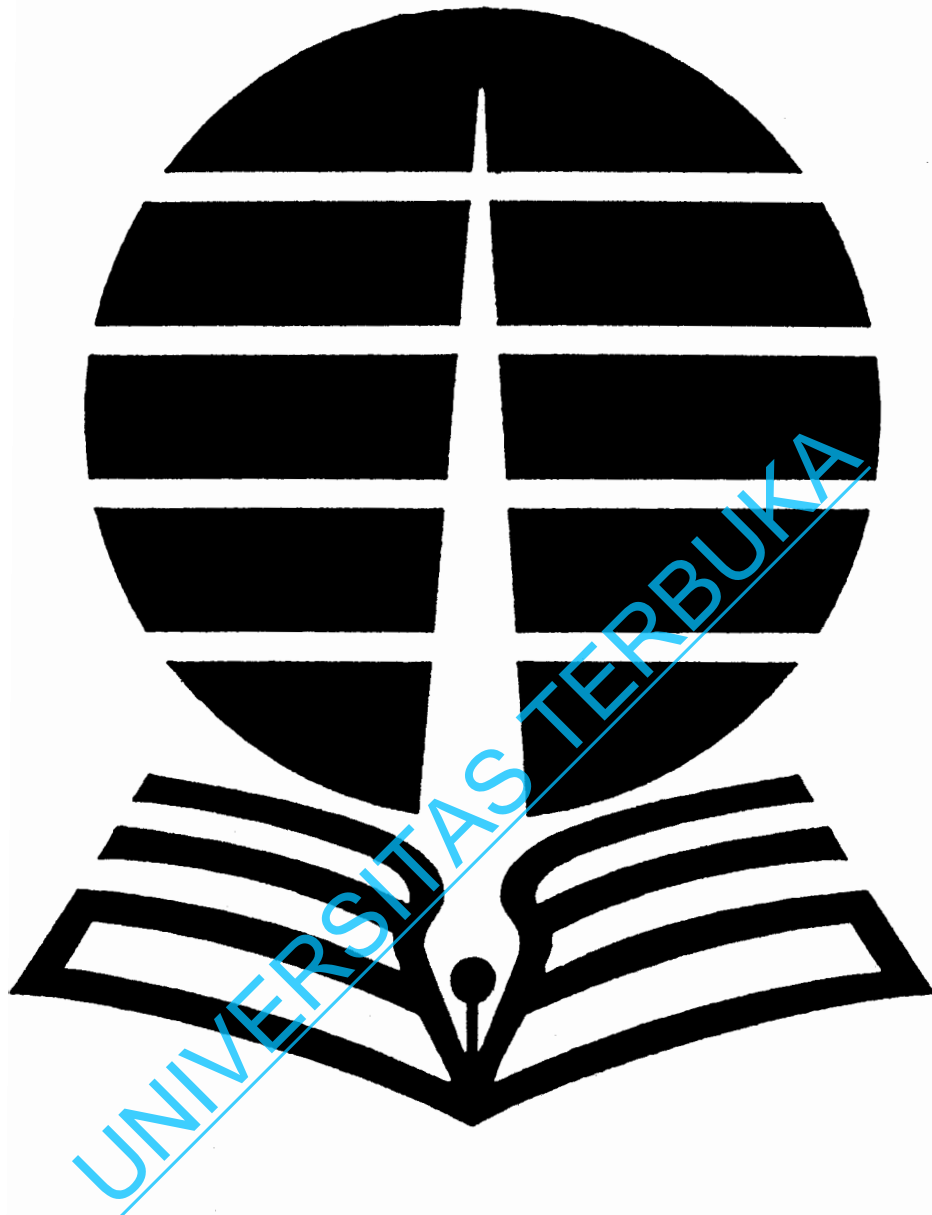
			Halaman
1.	Tabel 4.1	Nama-nama Desa dan Jumlah Penduduk Tahun 2007.....	40
2.	Tabel 4.2	Keadaan Etnisitas Di Kecamatan Samalantan Tahun 2007.....	41
3.	Tabel 4.3	Mata Pencarian Penduduk Di Kecamatan Samalantan Tahun 2007.....	42
4.	Tabel 4.4	Keadaan Pendidikan Penduduk Di Kecamatan Samalantan Tahun 2007.....	43
5.	Tabel 4.5	Keadaan Jenjang Pendidikan Penduduk di Kecamatan Samalantan Tahun 2008.....	44
6.	Tabel 4.6	Keadaan Penduduk berdasarkan Pemeluk Agama di Kecamatan Samalantan Tahun 2007.....	45
7.	Tabel 4.7	Keadaan Sekolah, Guru dan Murid di Kecamatan Samalantan Tahun 2007.....	46
8.	Tabel 4.8	Keadaan Guru dan Murid serta Kondisi Sekolah Binaan di Kecamatan Samalantan Tahun 2007.....	49
9.	Tabel 4.9	Persentase Latar Belakang Pendidikan Guru-guru TK/SD di Kecamatan Samalantan Tahun 2007.....	51
10.	Tabel 4.10	Program Pengawas Sekolah pada Masing-masing Sekolah Binaan Tahun 2007.....	56
11.	Tabel 4.11	Jadwal Kegiatan Kepengawasan di SD Binaan di Kecamatan Samalantan Januari Tahun 2008.....	59
12.	Tabel 4.12	Jadwal Kegiatan Kepengawasan di SD Binaan di Kecamatan Samalantan. Januari Tahun 2008.....	61
13.	Tabel 4.13	Nama-nama Gugus Sekolah Binaan di Kecamatan Samalantan, Januari 2008.....	64
14.	Tabel 4.14	Jadwal Kegiatan KKG dan Kunjungan Pengawas di SD	

	Binaan di Kecamatan Samalantan Januari Tahun 2008.....	67
15.	Tabel 4.15 Jadwal Kunjungan pada SDN Binaan Tahun 2008.....	69
16.	Tabel 4.16 Jadwal Kunjungan Pengawas pada SDN No 1 Samalantan Tahun 2008.....	72
17.	Tabel 4.17 Rekapitulasi Perangkat Pembelajaran Kelas Guru-guru SD Binaan di Kecamatan Samalantan Januari Tahun 2008.....	78
18.	Tabel 4.18 Instrumen Evaluasi Hasil Belajar Murid di Kecamatan Samalantan Tahun Ajaran 2008	82
19.	Tabel 4.19 Nilai Ujian Akhir Sekolah Dasar Se Kecamatan Samalantan Tahun Ajaran 2007.....	83
20.	Tabel 4.20 Uraian Tugas Pembinaan Guru-guru yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kurikulum di Kecamatan Samalantan Tahun Ajaran 2008	87
21.	Tabel 4.21 Koordinasi antara Kepala Sekolah dengan Guru-guru di Kecamatan Samalantan Tahun 2008.....	95
22.	Tabel 4.22 Latar Belakang Pendidikan Guru-guru di Kecamatan Samalantan Tahun 2008.....	102
23.	Tabel 4.23 Porsentase Latar Belakang Pendidikan Guru-guru di Kecamatan Samalantan tahun 2008.....	103
24.	Tabel 4.24 Kondisi Sekolah dan Sarana Jalan di Kecamatan Samalantan Tahun 2008.....	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pikir alur Penelitian.....	32

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2003, yaitu “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Secara implisit tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas dan moral manusia Indonesia. Amanat tersebut menjadi tanggungjawab bersama bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkeadilan dan masyarakat yang sejahtera. Salah satu unsur penunjang pembangunan tersebut adalah di bidang pendidikan.

Pemerintah dalam hal ini (Departemen Pendidikan Nasional dan jajarannya), untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas khususnya tenaga pendidik/guru, dituntut untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Pertama yang harus dibenahi adalah penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik berupa prosedur kegiatan pendidikan maupun kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya prosedur kegiatan pendidikan tidak terlepas dari teknik-teknik penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan. Prosedur kegiatan pendidikan terkait dengan kegiatan administrasi pendidikan.

Menurut buku Kurikulum, Usaha-usaha Perbaikan dalam Bidang Pendidikan dan Administrasi dari Departemen Pendidikan, mendefinisikan administrasi pendidikan yaitu suatu proses keseluruhan, kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan, dengan menggunakan atau manfaat fasilitas yang tersedia, baik personil, materiil maupun spritual untuk mencapai pendidikan secara efektif dan efisien, atau secara singkat dikatakan bahwa administrasi pendidikan ialah pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan sekolah.

Pengawasan dan pembinaan adalah bagian dari komponen atau fungsi administrasi pendidikan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39: Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya untuk melaksanakan pengawasan dalam rangka menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan maka diangkatlah tenaga kependidikan yang disebut "Pengawas Sekolah". Diperjelas dengan Kepmenpan No. 118 Tahun 1996 pasal 1 ayat 1, Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah. Wewenang pengawas sekolah melakukan tugas kepengawasan dan pembinaan ditujukan pada sekolah tingkat dasar dan menengah

dinyatakan pada pasal 3 ayat 1 Kepmepan No. 118 Tahun 1996, yaitu bahwa “Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya”.

Personil pengawas di Kecamatan Samalantan berjumlah 2 orang dengan mengawasi 19 Sekolah Dasar dan tersebar di wilayah yang cukup luas dengan kondisi jalan yang rusak tidak beraspal. Pada saat-saat tertentu pengawas dalam melaksanakan tugasnya terbentur masalah geografis, diantaranya lokasi Sekolah Dasar (SD) letaknya berjauhan sehingga pada saat kunjungan ke lokasi sekolah yang dibina memerlukan waktu dan biaya yang relatif besar, sehingga terkadang menyulitkan melakukan pembinaan secara optimal, kendala lain letak sekolah-sekolah berjauhan dengan letak tempat tinggal murid-murid, untuk menuju ke sekolah ada yang berjalan kaki memerlukan waktu perjalanan sekitar 1 sampai 2 jam, sehingga kedatangan murid-murid ke sekolah terkadang terlambat. Kondisi ini sulit bagi pihak sekolah menerapkan disiplin sekolah, terkait dengan pengawas sekolah untuk mengadakan pengawasan atau pembinaan terkadang harus memahami kondisi dan situasi sekolah.

Kondisi sekolah yang menjadi wilayah binaan pada umumnya mempunyai fasilitas dan sarana sekolah ada yang masih minim (kurang), sehingga aktivitas belajar mengajar dilakukan seadanya, akibatnya ketika pengawas mengadakan pembinaan tidak sesuai dengan prosedural dan kriteria pengawasan yang sesuai dengan standar petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan. Pengawasan yang dilakukan terkadang banyak melakukan toleransi baik terhadap guru-guru

maupun aktivitas belajar mengajar di sekolah, tak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia (SDM) atau tingkat pendidikan tenaga pengajar relatif rendah (rata-rata tamatan setara SMA dan D2), sehingga mempengaruhi motivasi dan kreativitas guru dalam mengajar.

Lingkungan geografis sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Samalantan sebagian cukup sulit ditempuh terutama yang terletak di pinggiran kota, dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar terpaksa dilakukan seadanya sesuai dengan kondisi situasi di mana letak sekolah berada sehingga membuat pengawas sekolah mengalami kendala, sulit menerapkan aturan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawas sekolah selain melaksanakan tugas pokoknya juga oleh kepala UPT diberi tugas tambahan pekerjaan di kantor karena pegawai di kantor UPT Dinas Pendidikan Samalantan hanya kepala UPT dan satu orang tenaga administrasi, dengan kondisi wilayah pembinaan yang cukup luas dan terbentur dengan melaksanakan tugas tambahan di kantor menyebabkan pengawas sekolah terkadang tidak melakukan pengawasan dan pembinaan dengan optimal.

Mencermati kinerja pengawas sekolah tentang akuntabilitasnya untuk melaksanakan kepengawasan dan pembinaan berdasarkan hasil survei, pengawas sekolah belum melaksanakan tugasnya secara optimal, hal ini dapat dilihat dari jadwal kunjungan ke sekolah-sekolah belum terjadwal dengan baik, demikian pula dalam melakukan pembinaan kepada guru-guru khususnya kegiatan belajar mengajar di kelas, kelihatannya belum diberikan bimbingan dengan baik, sehingga para guru mengajar di kelas hanya sekedarnya saja tanpa persiapan yang

matang, di sisi lain laporan atau evaluasi pengawas terhadap kegiatan kepengawasan dan pembinaan belum lengkap.

Berdasarkan indikasi-indikasi yang dipaparkan terungkap bahwa eksistensi pengawas sekolah dalam melakukan tugasnya di satu sisi harus dilakukan secara profesionalisme, namun di sisi lain mengalami kendala karena kondisi geografis dan keberadaan fasilitas yang seadanya, dan latar belakang pendidikan guru-guru yang relatif rendah. Indikator lainnya bagaimana akuntabilitas dan efektivitas pengawas sekolah dalam mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat, sehubungan dengan hal tersebut yang mendasari penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana kinerja pengawas sekolah SD di Kecamatan Samalantan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

B. Perumusan Masalah

Pengawasan dan pembinaan sebagai bagian dari kegiatan administrasi Pendidikan, kegiatan dimaksud menyangkut masalah bagaimana pelaksanaan pengorganisasian tenaga pendidik dan pengelola sekolah menjalankan tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Tugas pengawas sekolah selain melakukan kepengawasan juga membina serta mengembangkan potensi guru-guru agar mempunyai wawasan luas dan menjadi tenaga yang profesional. Ada beberapa sekolah yang menjadi binaan pengawas sekolah masih terdapat ketidaksesuaian prosedural dan kelengkapan administrasi kelas bagi para pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Para guru belum mempunyai motivasi yang kuat mengembangkan diri untuk menjadi tenaga yang profesional.

Mengacu pada pasal 3 ayat 1 Kepmepan No. 118 Tahun 1996, yaitu bahwa pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan, lebih konkritnya tanggungjawab pengawas adalah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada sekolah yang telah ditunjuk untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, bimbingan dan hasil prestasi serta bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Personil sekolah diharapkan semua terlibat di dalamnya dan terorganisir dengan baik, sehingga setiap personil sekolah menyadari tanggungjawab dan wewenang serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing.

Proses pelaksanaan pelayanan dan bimbingan oleh pengawas sekolah pada situasi tertentu terkadang menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kegiatan pengawasan dan bimbingan tanggungjawabnya tidak hanya terletak pada pihak pengawas sekolah, melainkan tanggungjawab bersama dengan pihak kepala sekolah dan para guru yang menjadi binaannya, sehingga akan tercipta kerjasama dan pengertian yang baik. Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menentukan ruang lingkup masalah yang berkenaan dengan pengawasan yaitu tentang kinerja pengawas sekolah yang meliputi akuntabilitas dan efektivitas dalam melaksanakan program kerja yang telah dibuat, hal ini terkait dengan bagaimana pengawas sekolah melaksanakan pembinaan kepada guru-guru dalam proses belajar mengajar di kelas dan kelengkapan administrasi serta hasil prestasi siswa.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini yaitu: Bagaimana kinerja pengawas sekolah dasar dalam melaksanakan kepengawasan di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diajukan dalam ruang lingkup masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Ingin mendeskripsikan dan mendalami kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.
2. Ingin mendeskripsikan dan mendalami faktor penghambat dan pendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pengawas sekolah di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan konsep administrasi pendidikan berkenaan dengan kinerja pengawas serta berimplikasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi pengawas sekolah dan pengelola sekolah (kepala sekolah dan guru)

Kegunaan kepada pengelola sekolah (guru-guru, kepala sekolah, pegawai tatausaha), dan pengawas sekolah mendapatkan informasi, dan memahami semua

peraturan-peraturan kependidikan agar dapat memperbaiki kinerja yang dianggap masih dirasakan kurang.

b. Bagi pemerintah

Kegunaan kepada pemerintah agar dapat membantu pemerintah maupun instansi terkait lainnya untuk membuat suatu kebijakan yang berhubungan dengan kinerja pengawas sekolah demi tercapainya peningkatan kualitas pendidikan.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Kepengawasan sebagai bagian dari Kegiatan Administrasi

Kegiatan manusia yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan kegiatan administrasi. Unsur manusia sebagai faktor utama dalam administrasi yang melakukan kerjasama, sesuai pendapat Sondang Siagian (dalam Sundarso, 2006: 1.4), mengatakan bahwa “administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Dari pengertian tersebut, administrasi mengandung unsur-unsur yaitu: 1) adanya dua orang atau lebih, 2) adanya tujuan yang hendak dicapai, 3) adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, 4) adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas.

Pengertian administrasi lebih luas seperti yang dikatakan oleh Charles A. Beard seorang historikus politik Amerika dalam salah satu karyanya yang dikutip oleh Albert Lepawsky dalam bukunya *Administration*, seperti yang dikutip oleh Siagian (Sundarso, 2006:62), bahwa “ Tidak ada sesuatu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern”. Jika disimpulkan bahwa realitas sosial masyarakat modern dalam mengatur kegiatan sangat tergantung administrasinya, yaitu suatu bangsa atau suatu negara yang ingin mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan perikehidupan modern tidak

mempunyai pilihan lain daripada mengutamakan pembinaan serta pengembangan administrasinya.

Administrasi sebagai proses kerjasama yaitu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang tidak dapat diketahui kapan suatu proses itu akan berakhir. Sebagai proses, kegiatan administrasi tidak terlepas dari aspek-aspek teknis yang menyertainya. Sesuai seperti yang diungkap oleh The Liang Gie (dalam Sundarso, 2006), yaitu aspek teknis dalam kegiatan administrasi yaitu: (1). Organisasi (*organization*) (2). Manajemen (*management*). (3). Kepegawaian (*personnel*). (4). Keuangan (*finance*). (5). Perlengkapan (*supplay*). (6). Pekerjaan kantor (*office work*). (7). Tata hubungan (*communication*). (8). Perwakilan (*representation*). Dari aspek teknis tersebut fungsi manajemen (*management*) dianggap sebagai suatu proses yang menggerakkan kegiatan dalam administrasi sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Fungsi manajemen tersebut meliputi; a) perencanaan (*planning*) b) penjurusan (*directing*, termasuk (*leadership*) c) koordinasi (*coordinating*) dan d) pengendalian (*controlling*).

Kegiatan *controlling* atau pengawasan/pengendalian sebagai salah satu kegiatan yang mengikat kinerja pegawai. Fungsi pengawasan di sini untuk menjaga agar apa yang telah ditetapkan dalam rencana pada pelaksanaannya tidak menyimpang dan memperbaikinya. Harus dimaklumi di sini bahwa pengawasan dilakukan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan orang lain, tetapi yang lebih penting meletakkan fungsi kepengawasan sebagai sebuah koreksi/perbaikan untuk penyempurnaan. Selanjutnya pengawasan menurut Rosi (Sundarso, 2006, 4.11), membagi pengawasan dalam tiga fase, yaitu: (1) Pengawasan yang dilakukan pada saat proses perencanaan berlangsung

agar rencana yang dihasilkan sesuai dengan tujuan/kebutuhan organisasi. (2) Pengawasan yang dilakukan pada saat rencana dilaksanakan (*monitoring*) dengan tujuan agar tindakan yang telah ditetapkan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan atau untuk tindakan perbaikan/penyempurnaan dari rencana semula yang dinilai tidak sesuai lagi dengan lingkungan yang telah berubah dengan cepat. (3). Pengawasan untuk menilai/mengevaluasi pencapaian hasil dari pelaksanaan sebuah rencana kegiatan.

Perkembangan ilmu administrasi pada mulanya bergerak di dalam dunia industri dan perusahaan, kemudian menjalar ke dalam pemerintahan atau negara. Salah satu kegiatan kependidikan adalah melakukan kegiatan administrasi, maka administrasi pendidikan sebagai salah satu cabang dari ilmu administrasi. Para ahli pendidikan mulai menyadari bahwa meskipun prinsip-prinsip administrasi dalam berbagai lapangan memiliki kesamaan, baik dalam proses maupun tujuannya, dalam dunia kependidikan mempunyai kekhususan yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan dunia perusahaan atau dunia pemerintahan.

Menurut Purwanto (2005:3), perbedaan administrasi perusahaan dengan administrasi pendidikan yaitu jika dalam administrasi perusahaan yang diolah adalah benda-benda mati atau bahan-bahan mentah maka di dunia pendidikan yang diolah adalah benda-benda hidup atau peserta didik (anak-anak didik). Demikian pula jika ditinjau dari tujuannya. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang besar atau menghasilkan produksi yang sebanyak-banyaknya dengan kualitas yang tinggi. Demikian pula dalam dunia pendidikan, hasil produksi yang banyak dan kualitas tinggi menjadi tujuan, namun hasil produksi dan kualitas tinggi yang diharapkan itu berbeda

sifatnya dengan hasil perusahaan. Jadi perbedaan administrasi pendidikan terletak pada prinsip-prinsip operasionalnya.

Selanjutnya menurut Purwanto (2005:3) bahwa administrasi pendidikan ialah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spritual maupun material yang bersangkutan paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi di dalam proses administrasi pendidikan segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasi dan dikoordinasi secara efektif dan semua materi yang diperlukan dan yang telah ada dimanfaatkan secara efisien. Secara singkat administrasi pendidikan dapat dikatakan kegiatan berupa pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan sekolah. Nyatalah bahwa administrasi pendidikan merupakan proses keseluruhan dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang "terlibat" di dalam tugas-tugas pendidikan.

Mengacu pengertian administrasi pendidikan mempunyai pengertian kegiatan penyelenggaraan pendidikan bersifat umum yang dilakukan oleh semua lembaga yang mengurus masalah pendidikan, mencakup direktorat, kantor wilayah yang termasuk dalam struktur organisasi Departemen Pendidikan dari tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat kecamatan. Administrasi sekolah merupakan lingkup yang lebih kecil penyelenggaraan pendidikan, karena administrasi sekolah merupakan kegiatan-kegiatan yang terbatas pada pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah. Namun demikian titik berat pelaksanaan kependidikan adalah di sekolah, maka ruang lingkup administrasi pendidikan pada umumnya ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang

menyangkut sekolah, seperti kepemimpinan kepala sekolah, supervisi terhadap guru-guru, bimbingan terhadap siswa dan sebagainya.

Istilah administrasi pendidikan hampir sama dengan istilah manajemen. Jika didefinisikan istilah manajemen adalah proses untuk menyelenggarakan dan mengawasi suatu tujuan tertentu. Demikian pula pada fungsi-fungsi pokok dalam manajemen adalah *planning, organizing, actuating/staffing, commanding/directing, coordinating, controlling/supervision, communicating* dan sebagainya. Fungsi yang telah diungkap tadi merupakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Salah satu fungsi administrasi pendidikan adalah pengawasan. Seorang pemimpin atau kepala sekolah bertanggungjawab terhadap kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah. Tugasnya sebagai pemimpin ialah membantu para guru mengembangkan kesanggupan mereka secara maksimal dan menciptakan suasana hidup yang sehat. Agar kegiatan berjalan lancar maka kepala sekolah juga melakukan kegiatan pengawasan.

Tanggungjawab merupakan syarat utama dalam kepemimpinan, tanpa memiliki rasa tanggungjawab, orang tidak dapat menjadi pemimpin. Tanggungjawab mengandung norma-norma etika dan nilai sosial. Tugas kepala sekolah sebagai supervisor mempunyai peranan yang sangat berpengaruh di lingkungan sekolah yang menjadi tanggungjawabnya. Tugas kepala sekolah ialah membantu para guru dalam mengembangkan kesanggupan-kesanggupan mereka secara maksimal dan menciptakan suasana hidup sekolah yang sehat dan mendorong guru-guru, pegawai tata usaha, murid-murid dan orang tua murid untuk mempersatukan kehendak, pikiran dan tindakan dalam kegiatan-kegiatan kerjasama yang efektif bagi tercapainya tujuan sekolah (tujuan pendidikan).

Selain kepala sekolah yang mempunyai tugas kepengawasan, terdapat satu jenis kepengawasan atau supervisi khusus dilakukan oleh seseorang yang ditunjuk pejabat berwenang yang dinamakan pengawas sekolah. Tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan di tiap-tiap sekolah yang menjadi wilayah binaannya. Fungsi pengawas atau supervisi (Purwanto, 2005:76), bahwa dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol atau melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi lebih dari itu dalam supervisi mencakup penentuan atau kondisi atau syarat-syarat personel maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya Purwanto (2005:76-77) menjelaskan bahwa dengan demikian tujuan supervisi dalam menjalankan tugasnya demi perbaikan dan pengembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti tujuan supervisi adalah:

- (1). Memperbaiki mutu belajar guru.
- (2). Membina pertumbuhan profesi guru, seperti pengembangan fasilitas yang menunjang kemajuan dan kelancaran belajar mengajar, peningkatan mutu dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran dan sebagainya.

2. Tugas Pengawas Sekolah

Selanjutnya pengertian kepengawasan atau disebut supervisi menurut Purwanto (2005:75) mempunyai pengertian yang luas. Kepengawasan adalah segala bantuan dari pemimpin sekolah, yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personil sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal tersebut berupa dorongan, bimbingan dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-

guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran, dan sebagainya. Dengan kata lain Ngalim Purwanto (2005) mengatakan bahwa kepengawasan ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.

Selanjutnya Nealey dan Evans dalam bukunya, "*Hand book for Effective Supervision of Instruction*" (1930:37), mengatakan bahwa: "... the term 'supervision' is used to describe those activities which are primarily and directly concerned with studying and improving the conditions which surround the learning and growth of pupils and teachers." Kemudian Button and Bruechner (1955:125) mengatakan dalam bukunya, "*Supervision a Social Process*", sebagai berikut: "*Supervision is an expert technical service primarily aimed at studying and improving co-operatively all factors which effect child growth and development*".

Sesuai dengan rumusan di atas, maka kegiatan atau usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kepegawasan dapat disimpulkan; (a) Membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai sekolah lainnya dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. (b) Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan termasuk macam-macam media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran jalannya proses belajar-mengajar yang baik. (c) Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode-metode baru dalam proses belajar-mengajar yang lebih baik. (d) Membina

kerjasama yang baik dan harmonis antara guru, murid dan pegawai sekolah lainnya. (e) Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru, pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan *workshop*, seminar, *inservice-training*, atau *up-grading*.

Selain Kepala Sekolah yang bertugas sebagai pengawas, terdapat pengawas sekolah yang telah ditunjuk khusus untuk melakukan kepengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah. Menurut Kepmenpan No. 118 Tahun 1996 pasal 1 ayat 1, bahwa “seorang pengawas sekolah berasal dari pegawai Negri Sipil (PNS) yang diberitugas tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pada sekolah, dasar dan menengah” Adapun tugas pokok Pengawas Sekolah adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya (Kepmenpan No. 118 Tahun 1996 pasal 3 ayat 1). Selanjutnya tanggung jawab Pengawas Sekolah (Kepmenpan No. 118 Tahun 1996 pasal 4 ayat 1), adalah:

- a. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya di sekolah yang telah ditunjuk.
- b. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi dan bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan

Selanjutnya dijelaskan bahwa wewenang Pengawas Sekolah adalah :

- a. Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;

- b. Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
- c. Menentukan dan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan (Kepmepan No. 118 Tahun 1996 pasal 4 ayat 2).

Pengawas Sekolah sebagai tenaga kependidikan dan tenaga profesional seperti pada wewenang pengawas, point (a) dikatakan : "... dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi". Dalam hal ini jelas bahwa istilah profesi (profesionalisme) merupakan istilah baku di dalam mempersiapkan sumber daya manusia memasuki abad 21 yang penuh persaingan (Tilaar, 1992:179). Selanjutnya Danim (2002), menegaskan bahwa profesionalisme bukan hanya sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi profesionalisme lebih merupakan suatu sikap. Maister (dalam Tilaar, 1998:179), mengatakan bahwa "*the opposite of the word professional is not unprofessional, but rather technician*". Lebih jauh, Tilaar (1998:179) mengatakan bahwa seseorang yang disebut professional apabila dia mempunyai suatu tingkah laku (*attitude*) dan bukan hanya menguasai sekelompok kompetensi.

Selanjutnya dalam melakukan kepengawasan di sekolah, seorang pengawas sekolah perlu memiliki program dan kegiatan pengawas sekolah yang merupakan strategi dalam melakukan kepengawasan di sekolah-sekolah yang menjadi wilayah pembinannya. Strategi tersebut ada 8 (delapan) langkah (Bahan Diklat Pengawas Sekolah Provinsi Kalimantan Barat oleh LPMP Tahun Anggaran 2004), yaitu:

- 1) Penyusunan program pengawasan sekolah, terdiri dari: (a) menyusun program tahunan pengawas sekolah dan (b) menyusun program semester pengawasan sekolah tanggung jawabnya.

- 2) Penilaian hasil belajar siswa dan kemampuan guru, yaitu: (a) membimbing penyusunan soal/instrumen penilaian, dan (b) melaksanakan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar siswa dan kemampuan guru.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data sumber daya pendidikan, PBM, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan dan hasil belajar siswa.
- 4) Menganalisis hasil belajar siswa, guru dan sumber daya pendidikan yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu: (a) melaksanakan analisis sederhana hasil belajar (faktor sumber daya pendidikan yang berpengaruh pada hasil belajar) (b) melaksanakan analisis komprehensif hasil belajar (faktor yang lebih kompleks seperti korelasi kemampuan guru dengan hasil belajar siswa).
- 5) Melaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya, yaitu: (a) memberikan arahan dan bimbingan kepada guru tentang pelaksanaan PBM (b) memberikan contoh pelaksanaan tugas guru dalam pelaksanaan PBM (c) memberikan saran untuk peningkatan kemampuan profesional guru kepada atasannya (d) membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan sekolah.
- 6) Menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawasan, yaitu (a) menyusun hasil pengawasan per-sekolah (b) melaksanakan evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.
- 7) Melaksanakan pembinaan lainnya di sekolah selain PBM, seperti: (a) membina pelaksanaan pengelolaan sekolah (b) memantau dan membimbing pelaksanaan penerimaan siswa baru (c) memantau/membimbing pelaksanaan Ujian Nasional (d) memberikan saran penyelesaian kasus khusus di sekolah dan (e) memberikan bahan penilaian dalam rangka akreditasi sekolah

- 8) Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan dari sekolah, yaitu: (a) melaksanakan evaluasi pengawasan per-mata pelajaran dan (b) melaksanakan evaluasi hasil pengawasan seluruh mata pelajaran.

Berikut ini dikemukakan macam-macam tugas supervisi pendidikan yang riil dan lebih terinci (Purwanto, 2005:88-89), sebagai berikut.

1. Menghadiri rapat/pertemuan-pertemuan organisasi professional.
2. Mendiskusikan tujuan-tujuan dan fislafat pendidikan dengan guru-guru.
3. Mengadakan rapat-rapat kelompok untuk membicarakan masalah-masalah umum.
4. Melakukan *classroom visitation* atau *class visit*.
5. Mengadakan pertemuan-pertemuan individual dengan guru-guru tentang masalah-masalah yang mereka usulkan.
6. Mendiskusikan metode-metode mengajar dengan para guru.
7. Memilih dan menilai buku-buku yang diperlukan bagi muris-murid.
8. Membimbing guru-guru dalam menyusun dan mengembangkan sumber-sumber atau unit-unit pengajaran.
9. Memberikan saran-saran atau instuksi tentang bagaimana melaksanakan suatu unit pengajaran.
10. Mengorganisasi dan bekerja dengan kelompok guru-guru dalam program revisi kurikulum.
11. Menginterpretasi data dan tes kepada guru-guru dan membantu mereka bagaimana menggunakannya bagi perbaikan pengajaran.
12. Menilai dan menyeleksi buku-buku untuk perustakaan guru-guru.
13. Bertindak sebagai konsultan di dalam rapat/pertemuan kelompok guru.
14. Bekerjasama dengan konsultan kurikulum dalam menganalisis dan mengembangkan program kurikulum.
15. Berwawancara dengan para guru bagaimana mengatasi masalah pembelajaran, harapan mereka dan pandangan mereka tentang perkembangan pendidikan di sekolah mereka.
16. Mengajarkan kepada guru bagaimana menggunakan audio visual
17. Menyiapkan laporan-laporan tertulis tentang kunjungan kelas
18. Merencanakan demonstrasi mengajar, memperkenalkan metode mengajar baru dan alat peraga yang baru.

Supervisi mengandung pengertian secara luas. Setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan di sekolah maupun kantor-kantor memerlukan adanya supervisi agar pekerjaan itu dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengertian superivisi di dunia pendidikan lebih khusus menyangkut dalam supervisi

pengajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan supervisi pengajaran (Purwanto, 2005:89), ialah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personil maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan.

3. Kinerja Pengawas Sekolah

Istilah kinerja menurut Anwar (2001:67) berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah prestasi kerja seseorang berarti pula pengembangan karir untuk masa depan. Aktualisasi dan pengakuan diri memperkuat seseorang untuk melakukan tugas sebaik-baiknya, selanjutnya akan mencapai jenjang karir yang lebih tinggi berarti sukses dalam berkarir.

Kinerja pegawai sebagai bagian organisasi pelayanan publik. Moenir (1995:16), mengemukakan pelayanan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah pelayanan dalam rangkaian aktivitas organisasi manajemen. Dwiyanto (1995:11), mengatakan ada lima indikator dalam penilaian kinerja birokrasi pelayanan publik. Pertama, produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Kedua, kualitas pelayanan. Kualitas layanan cenderung semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk tentang organisasi publik muncul karena

ketidakpastian dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Ketiga, responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan kualitas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keempat, tanggungjawab yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Kelima, akuntabilitas yaitu menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih rakyat.

Upaya untuk meningkatkan kualitas aktivitas pembelajaran di sekolah, pengawas sekolah mempunyai wewenang dan tanggungjawab memberikan pelayanan dalam rangka membina dan membimbing para guru sesuai dengan program dan tupoksi yang dipersiapkan. Sebagai pengawas, maka pengawas sekolah dituntut menunjukkan kinerja secara profesional sesuai dengan pengukuran kinerja dengan menggunakan ukuran kinerja pelayanan yakni, akuntabilitas, responsivitas, efisiensi, orioentasi terhadap pelayanan dan fasilitas pelayanan.

Faktor motivasi memberikan sumbangan yang kuat terhadap kinerja pegawai. Pegawai yang mempunyai motivasi rendah akan mempengaruhi kinerja yang rendah pula. Menurut Anwar (2001), karakteristik motivasi berprestasi rendah antara lain : (1) Kurang memiliki tanggungjawab pribadi dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan atau kegiatan. (2) Memiliki program kerja tetapi tidak didasarkan pada rencana dan tujuan yang realistis, serta lemah melaksanakannya. (3) Bersikap apatis dan tidak percaya diri.

(4) Ragu-ragu dalam mengambil keputusan. (5) Tindakannya kurang terarah pada tujuan.

Sebaliknya motivasi yang kuat atau disertai tekad akan mencapai prestasi kerja yang lebih tinggi. Menurut McClelland (1987),” ada hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kinerja”. Motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri pegawai untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji. Berdasarkan pendapat McClelland tersebut, pegawai akan mampu mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki motif berprestasi tinggi. Motif yang dimiliki oleh pegawai harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri selain dari lingkungan kerja. Hal ini karena motif berprestasi dari dalam diri seseorang akan membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih mudah. Motivasi erat kaitannya dengan etos kerja seseorang. Etos kerja mendorong semangat tinggi untuk berkarya. Semangat ini timbul dari dalam diri manusia. Untuk menimbulkannya bisa diperoleh dari diri manusia itu sendiri, bisa juga diperoleh dari orang lain. Orang yang mempunyai etos kerja yang tinggi tidak puas dengan apa yang telah diperolehnya, tetapi apa yang diperoleh tersebut merupakan awal dari karya selanjutnya yang besar lagi.

Berdasarkan pendapat McClelland dan Edward Murphy (Anwar 2001 : 104), tentang karakteristik motivasi berprestasi pada seorang manajer yaitu : (1) Memiliki tanggungjawab pribadi yang tinggi. (2) Memiliki program kerja berdasarkan rencana dan tujuan yang realistis serta berjuang untuk merealisasikannya. (3) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan berani mengambil resiko yang dihadapinya. (4) Melakukan pekerjaan yang berarti dan menyelesaikannya dengan hasil

yang memuaskan. (5) Mempunyai keinginan menjadi orang terkemuka yang menguasai bidang tertentu.

4. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dapat dibedakan antara pengukuran kinerja sektor publik dengan sektor bisnis. Menurut Mahsum (2006 : 34), bahwa pengukuran kinerja pada organisasi bisnis (organisasi yang berorientasi pada laba) lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan organisasi sektor publik (organisasi yang tidak berorientasi pada laba). Pada organisasi bisnis, kinerja penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan cara, misalnya melihat tingkat laba yang berhasil diperolehnya. Apabila pengukurannya ingin ditingkatkan lagi, hal ini dapat dilihat dengan menilai berbagai hal lainnya seperti *solvabilitas*, *rentabilitas*, *return on investment* dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, pengukuran keberhasilannya lebih kompleks, karena hal-hal yang dapat diukur lebih beraneka ragam, kadang-kadang bersifat abstrak sehingga pengukurannya tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu variabel saja.

Dikemukakan pula oleh Kismartini (2005 : 21-24), bahwa kesadaran birokrat mengacu pada prinsip *Good Governmance* antara lain meliputi :

1. **Transparansi (*transparency*)**, harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
2. **Daya tanggap (*Responsiveness*)**. Setiap instansi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
3. **Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)** pemerintah yang baik (*Good Government*) bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.
4. **Berkeadilan (*Equity*)**. Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
5. **Efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)**. setiap proses kelembagaan dan kegiatan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-

benar dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.

6. Akuntabilitas (*Accountability*). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki tanggungjawab keadaan publik (masyarakat umum).
7. Saling keterbukaan (*Interrelated*). Keseluruhan ciri *good governance* tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait (*mutually reinforcing*) dan tidak bisa berdiri sendiri.

Pendapat lain menurut Dwiyanto (1995 : 9-11), menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

1. Produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Tolok ukur dalam menjalankan tugas adalah tanpa mengindahkan prosedural yang telah ditetapkan.
2. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan politik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
3. Akuntabilitas. Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Terkait dengan pengawasan sekolah faktor akuntabilitas pengawas sangat berperan dalam peningkatan mutu pendidikan terutama peningkatan kualitas guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar

kebijakan dan kegiatan pengawas untuk memberikan pembinaan atau pelayanan sebaik-baiknya kepada guru-guru dalam melakukan belajar mengajar di kelas. Asumsinya adalah bahwa pengawas telah dipilih dan diberi kepercayaan sesuai dengan kompetensi dan rasa tanggungjawab yang dimiliki, sehingga dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi sekolah binaannya. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas pengawas sekolah dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan pengawas itu konsisten dengan kehendak masyarakat sekitar.

Suatu pengukuran kinerja yang didasarkan atas karakteristik operasional antara lain bermanfaat untuk mengkuantifikasi tingkat efisiensi dan efektifitas suatu pelaksanaan kegiatan. Katz dan Khan (1994) (Napitupulu, 2007:153-154), menjelaskan definisi efisiensi dan efektivitas, yaitu : (1) Efisiensi (daya guna), yaitu mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan produktivitas. Efisiensi memberikan perhatian terhadap hasil dan biaya, yaitu perbandingan antara sumberdaya organisasi (*input*) dan produk (*output*). Jelasnya tingkat efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapat laba, manfaat faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang bersifat dari rasionalitas ekonomis. Efisiensi kinerja pelayanan publik juga dilihat untuk menunjuk suatu kondisi tercapainya perbandingan terbaik (*proporsional*) antara *input* pelayanan dengan *output* pelayanan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). (2) Efektivitas (hasil guna) berorientasi pada hasil, perhatiannya diberikan dengan mengelola organisasi untuk mengurangi tingkat *input* yang diperlukan bagi pelaksanaan

tugas, meminimalkan kelebihan sumber daya demi kepentingan masa depan. Tingkat efisiensi erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Dengan demikian kinerja pelayanan publik ialah untuk melihat tercapainya pemenuhan tujuan atau target pelayanan yang telah ditentukan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Harus digaris bawahi bahwa pengukur kinerja bukanlah hasil akhir melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberitahu kita apa yang telah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Pengukuran kinerja (Mahsum, 2006 : 35) menyediakan dasar bagi organisasi untuk menilai tentang kemajuan atau sasaran yang telah dicapai, dengan mengenali area-area kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya kinerja dapat dilihat dari tindakan pegawai/aparat untuk meningkatkan kinerja hal ini dapat dilihat dari bagaimana kegiatan tersebut mengacu pada tujuan organisasi sehingga dapat meningkatkan produk-produk dan jasa kepada pelanggan.

Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri mulai dari tingkat eksekutif sampai pada pegawai operasional. Sumber daya manusia merupakan aset vital pada hampir semua jenis organisasi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki kinerja organisasi tidak mungkin dapat berhasil jika perilaku pegawai tidak diarahkan dengan baik. Informasi hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan *feedback* (umpan balik) untuk mengarahkan perilaku pegawai menuju perbaikan kinerja selanjutnya. *Feedback* berfungsi sebagai alat pemotivasi para

pegawai, karena informasi kinerja yang disampaikan sebagai acuan dalam pemberian *reward* dan *punishment*. Jika seseorang memperoleh dan menerima *feedback* atas pekerjaannya, merupakan bentuk upaya introspeksi melihat kelemahan dan kemampuan yang dimiliki.

5. Akuntabilitas dan Efektivitas Tugas Pengawas Sekolah

Dari beberapa indikator kinerja yang telah diuraikan sebelumnya seperti transparansi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, produktivitas dan akuntabilitas, berikut ini bahasan kinerja pengawas sekolah dibatasi pada kinerja yang menyangkut akuntabilitas dan efektivitas kepengawasan. Dibatasinya kedua indikator tersebut berdasarkan kondisi dan situasi realitas di lokasi penelitian terutama sekolah binaan tersebar di beberapa kecamatan yang letaknya saling berjauhan, sehingga menuntut tanggungjawab yang besar pengawas dalam mensiasati tugas agar lebih efektif. Akuntabilitas menyangkut tanggungjawab pengawas sekolah adalah menyangkut tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Sedangkan efektivitas berhubungan dengan pelaksanaan tugas pengawas sekolah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kepengawasan lebih berdaya guna. Lebih jelasnya diuraikan kinerja pengawas yang berhubungan dengan akuntabilitas dan efektivitas.

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas menyangkut seberapa besar tanggungjawab seorang pejabat publik menjalankan tugas sesuai kehendak dan kepentingan rakyat. Menurut Napitupulu (2007), mengemukakan bahwa seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik merepresentasikan dan selalu konsisten untuk kepentingan rakyat. Pejabat publik harus bersedia menerima tugas yang diamanahkan tanpa memilih jenis tugas apakah sesuai

dengan keinginannya atau tidak. Demikian pula lingkungan yang kondusif akan memudahkan menjalankan tugas sebaik-baiknya, sehingga pejabat atau individu yang disertai tanggungjawab akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Berhasil tidaknya tanggungjawab pejabat publik tergantung adanya komitmen atau niat baik dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai prinsip dan aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya Ellwood (Mahsum, 2006:86-87) menjelaskan bahwa terdapat empat indikator yang harus dipenuhi oleh sektor organisasi publik sehubungan dengan tugasnya, yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
- b. Akuntabilitas proses yaitu proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Akuntabilitas ini dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan lebih cepat, responsif dan biaya lebih murah.
- c. Akuntabilitas program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak.
- d. Akuntabilitas kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pejabat yang berwenang.

Berdasarkan indikator tersebut, terkait dengan kinerja pengawas sekolah harus memiliki persyaratan tersebut, sebagai pejabat yang ditugaskan melaksanakan tugas kepengawasan maka pengawas sekolah bertanggungjawab melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang dimilikinya agar dapat mencapai

tujuan yang diinginkan yaitu dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja guru-guru.

b. Efektivitas

Efektivitas (hasil guna) ialah suatu pelaksanaan tugas yang berorientasi pada hasil yang dilakukan oleh organisasi publik dengan mengelola organisasi sesuai dengan aturan dan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Kumorotomo (Dwiyanto, 2002) bahwa efektivitas merupakan proses pelayanan apakah tercapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut akan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir. Berkaitan tujuan yang ingin dicapai erat dengan kaitannya dengan input, proses dan output serta dampak dari kegiatan organisasi. Seperti dijelaskan oleh Dwiyanto bahwa kinerja pelayanan publik akan berhasil baik apabila sesuai dengan faktor-faktor sebagai berikut: (1) indikator masukan (*input*), (2) indikator proses (*process*), (3) indikator keluaran (*output*), (4) indikator hasil (*outcomes*), (5) indikator manfaat (*benefit*) dan (6) indikator dampak (*inpact*).

Berdasarkan indikator kinerja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai pengawas sekolah tidak lagi bisa sewenang-wenang terhadap guru dan pegawai lainnya. Tugas pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi/kepengawasan menyangkut akuntabilitas dan efektivitas terhadap guru-guru, bagaimana supervisor bisa membina dan memberikan bantuan dalam memecahkan masalah dan mengembangkan kualitas belajar mengajar serta bisa meningkatkan kualitas guru-guru. Tugas supervisor yang ideal seperti yang dijelaskan oleh Chan & Sam (2003 : 91) yakni adanya hubungan yang harmonis antara supervisor, guru dan pegawai lainnya dan bekerjasama terus-menerus melakukan perencanaan, monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan

belajar mengajar, serta melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara rencana program dengan pelaksanaan di lapangan. Setelah itu kembali membuat rencana program yang terbaik secara bersama-sama dengan guru dan seluruh staf.

Indikasi keberhasilan supervisi harus berdasarkan beberapa prinsip-prinsip yang dilakukan oleh pengawas, jika dilaksanakan dengan baik diharapkan setiap sekolah akan memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Hal hal yang harus diperhatikan oleh pengawas sekolah berdasarkan prinsip-prinsip supervisi menurut Chan (2006:84) adalah: (1) harus bersifat konstruktif, (2) harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya (3) harus sederhana dan informal dalam pelaksanaannya (4) harus dapat memberikan perasaan aman kepada para guru dan pegawai yang disupervisi (5) harus didasarkan pada hubungan profesional (6) harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan mungkin prasangka (7) tidak bersifat mendesak/menekan (8) tidak boleh didasarkan atas kekuasaan atau pangkat, kedudukan dan kekuasaan pribadi (9) tidak boleh mencari-cari kesalahan atau kekurangan (10) tidak boleh terlalu cepat memgharapkan hasil dan tidak boleh terlalu lekas merasa kecewa (11) hendaknya juga bersifat preventif, korektif dan kooperatif.

Peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari efektif atau tidaknya peran pengawas. Tugas supervisor dalam melakukan kepengawasan menurut Isjoni (2006 : 98), adalah suatu usaha untuk menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru disekolah, baik secara individual maupun kolektif agar lebih mengerti dan efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Supervisi juga dapat diartikan suatu bantuan yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar disekolah akan lebih baik.

Kondisi belajar mengajar akan sangat tergantung pada keterampilan dan pembinaan yang dilakukan kepada guru-guru dan seorang pengawas. Siapa yang disupervisi, tidak lain adalah guru-guru di sekolah, termasuk didalamnya semua komponen yang ada di sekolah. Tugas pengawas di sini memberikan hubungan serta solusi jika ada kelemahan dan kejanggalan yang terdapat pada guru dikala melakukan proses pembelajaran, kelengkapan perencanaan persiapan pengajaran misalnya : program semester, Program Satuan Pembelajaran, Rencana Pelajaran, alat evaluasi, alat peraga dan sebagainya, pengawas menjadi salah satu penentu dalam pendidikan bermutu.

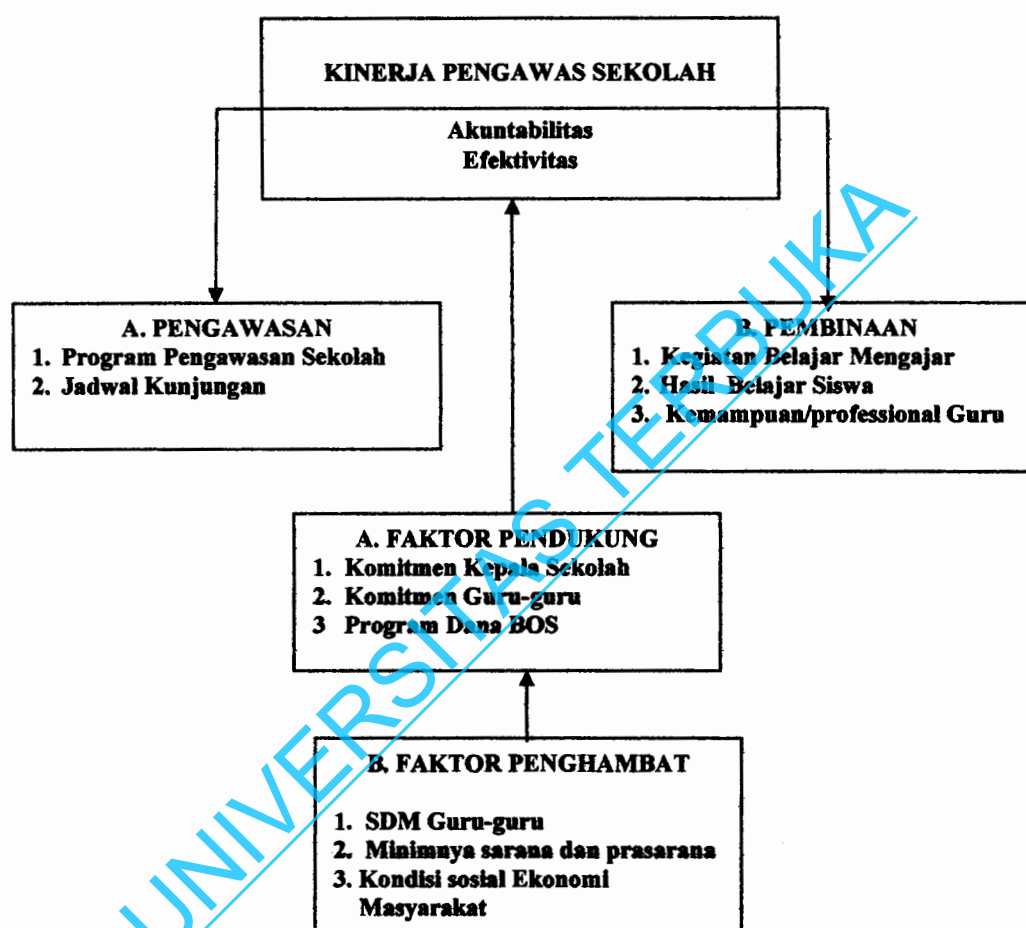
Selanjutnya menurut Isjoni (2006 : 100), secara struktur keberadaan pengawas tidak jelas. Alur dan garis lininya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Pada tingkat Propinsi, jabatan pengawas setara Kasubdin/Kabag. Lingkup kegiatan sebagai koordinasi dengan pengawas yang ada ditingkat kabupaten dan kota. Otonomi daerah lebih ditekankan pada kabupaten dan kota, maka tentunya struktur pengawas sejalan dengan jabatan struktural yang berlaku di tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah juga memberlakukan sama akan hak yang mesti diterima oleh pengawas dengan guru, misalnya biaya untuk transportasi, baju seragam, tunjangan hari raya dan insentif biaya.

Dikatakan pula bahwa tugas pengawas cukup berat dan beban moral yang diembannya, maka wajar kiranya secara bertahap mereka disediakan alat transportasi berupa sepeda motor sekaligus dana transportasi. Apalagi para pengawas yang melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah di desa-desa terpencil, bahkan mereka sering dihadapkan kondisi jalan yang jelek dan berlumpur, maka kendaraan dinas ini diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Fasilitas pengawas terutama di daerah-daerah

terkadang belum terpenuhi, padahal mereka harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya dari uraian beberapa konsep diatas, maka di susun kerangka pemikiran penelitian ini dengan harapan adanya kejelasan dan keterahan penelitian sehingga tidak terjadinya bias.

SKEMATIKA KERANGKA PIKIR ALUR PENELITIAN



Keterangan gambar 1 : Kerangka Pikir Alur Penelitian

B. Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini meliputi :

- a. Kinerja (*performance*) yaitu aktivitas seseorang sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, reponsivitas dan orientasi terhadap pengguna jasa dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Pengawas Sekolah yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.
- c. Pengawasan, yaitu suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
- d. Pembinaan yaitu memberikan arahan, bimbingan, contoh dan saran dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah.
- e. Penilaian, yaitu penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

2. Definisi Operasional

Penilaian menggunakan konsep definisi operasional yang telah diformulasikan sesuai kepustakaan dan sesuai pula dengan pengamatan awal. Penggunaan konsep

dimaksudkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi operasional tersebut adalah :

1. Pengawasan di sini memberikan bantuan kepada guru-guru dalam melakukan pekerjaan terutama proses kegiatan belajar mengajar dikelas, meliputi ; persiapan suatu pelajaran, metode dan alat peraga yang digunakan serta evaluasi pelajaran.
2. Pembinaan di sini dimaksudkan memberikan contoh, bimbingan dan arahan dalam membuat satuan pelajaran, administrasi kelas, menggunakan metode pengajaran yang tepat, alat peraga dan pelaksanaan evaluasi pelajaran.
3. Kegiatan Belajar Mengajar dimaksudkan suatu aktivitas pembelajaran di kelas mengacu pada satuan pekerjaan yang telah disusun.
4. Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi tugas dan tanggungjawab pengawas sekolah. Efektivitas pegawai diukur melalui : (a). Tingkat pemahaman pengawas sekolah dalam program pengawasan, (b). Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap guru dan kegiatan belajar mengajar.
5. Akuntabilitas yaitu kemampuan pengawas sekolah mempertanggungjawabkan cara yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Indikator faktor akuntabilitas pemimpin yaitu: (a) Akuntabilitas Kejujuran (b) Akuntabilitas proses dan program pengawasan, yaitu terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik atau tidak serta apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. . Hadari Nawawi (2005:17) berpendapat bahwa “metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Oleh karena dalam rangka mendapatkan data lapangan peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati secara langsung keadaan masyarakat yang diteliti. Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Moleong (2004:4) adalah “sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa lisan, tulisan maupun dari sikap dan perilaku orang yang diamati”. Kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan tentang kinerja pengawas sekolah TK/SD dalam melaksanakan kepengawasan di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah pada Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Samalantan terletak antara kota Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut lebih mudah diakses oleh masyarakat antar

kedua kabupaten/kota tersebut. Selanjutnya sekolah-sekolah yang menjadi wilayah penelitian relatif lebih banyak sehingga jangkauan kerja pengawas relatif lebih luas.

C. Subjek Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah informan kunci yaitu kepala sekolah dan guru-guru di Kecamatan Samalantan dilakukan secara *purposive* (telah ditentukan sebelumnya) sesuai dengan karakteristik yang akan diteliti. Informan lain ditambah informan pelengkap yaitu berasal dari instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan kecamatan. Sedangkan data sekunder adalah berupa referensi-referensi yang terkait mengenai gambaran umum kondisi wilayah sekolah TK/SD beserta para guru di Kecamatan Samalantan yang diperoleh dari sekolah-sekolah, kantor dinas pendidikan kabupaten/kota.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Observasi non partisipatif; Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi *non partisipatif*, dalam hal ini peneliti tidak terlibat langsung, tetapi tugas peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan pengawas sekolah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, di samping mengamati persiapan dan aktivitas kegiatan belajar mengajar para guru di kelas beserta kelengkapannya.
2. Wawancara mendalam (*in-depth interview*); kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan percakapan dengan subjek penelitian (informan) dengan bertujuan untuk menggali informasi secara lebih mendalam dalam menyimpulkan keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan pengawas sekolah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan

dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pengawas sekolah di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu.

3. Studi dokumenter; yakni pengumpulan data tertulis dari sumber dan objek penelitian yang berbentuk manual kerja, surat keputusan, surat edaran, uraian tugas dan tata kerja yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Alat Pengumpul Data

Selanjutnya alat pengumpul data lapangan berupa;

1. Pedoman observasi, yaitu pedoman untuk memudahkan peneliti mengadakan pengamatan di lapangan.
2. Pedoman wawancara, sebagai pedoman yang dipersiapkan melalui panduan ketika melakukan wawancara.
3. Alat rekam observasi, berupa peralatan yang diperlukan sehubungan kegiatan penelitian seperti ; alat tulis, kertas, tape recorder, tustel.

F. Teknik Analisis Data

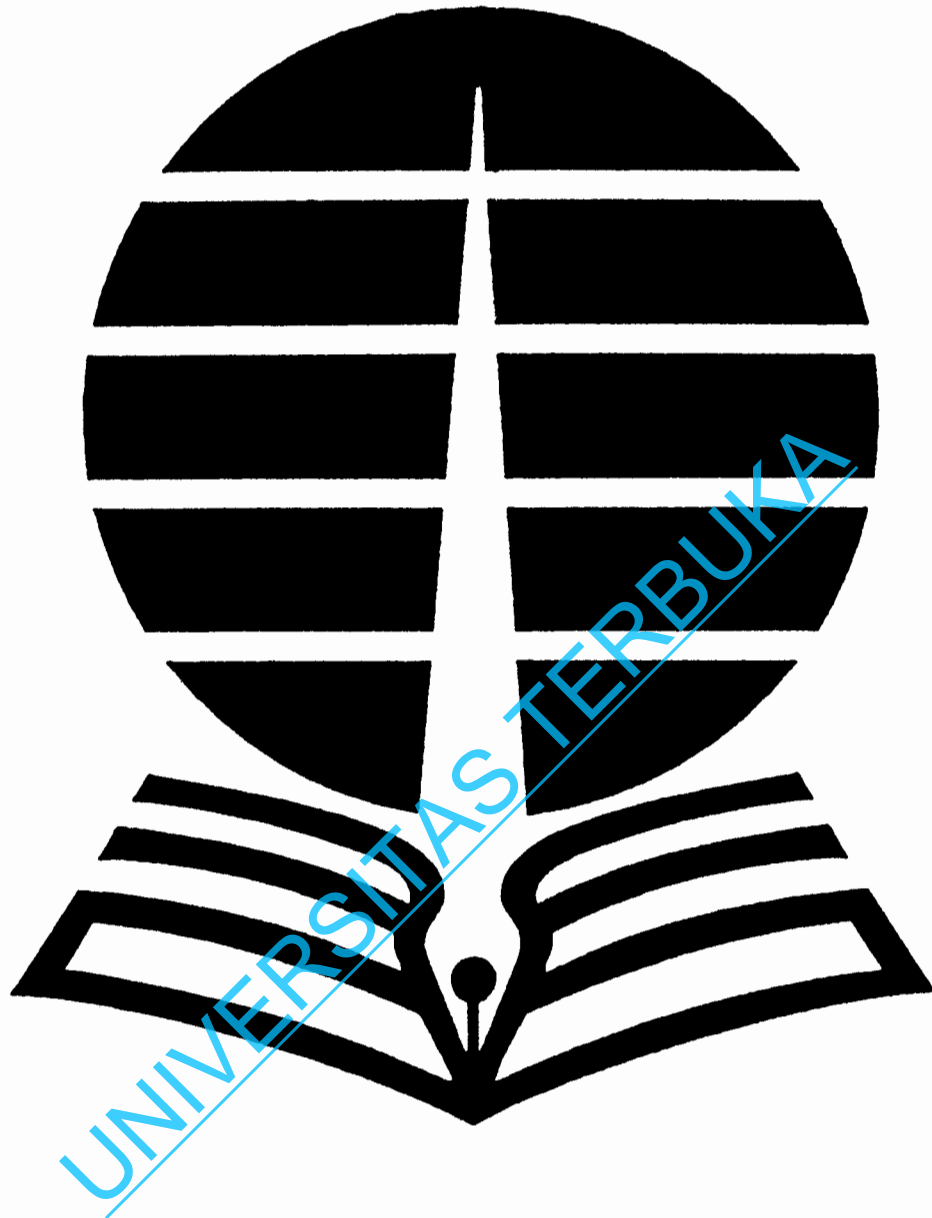
Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Sehubungan hal tersebut menurut Bogdan & Taylor (Moleong, 1990:30), bahwa “analisis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Data yang terkumpul dideskripsikan tanpa mengenyampingkan data-data yang telah diklasifikasikan.

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan, dengan maksud menggolongkannya ke dalam suatu pola yang tertentu kemudian diinterpretasikan atau memberikan makna, mencari hubungan antara data dengan berbagai konsep, data direduksi, dirangkum kemudian dipilih sesuai dengan masalah

yang diteliti. Proses kategorisasi dan klasifikasi data dilakukan secara bertahap atas informasi para informan, jawaban informasi serta hasil observasi ketika berada di lapangan dan kemudian dilakukan intepretasi data yang didukung oleh teori.

Mengenai langkah-langkah dalam analisis data, yaitu: tahap pertama, data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan selanjutnya dilakukan pemisahan-pemisahan, pengkategorian atau pengklasifikasian data, yang bertujuan untuk memudahkan penulis melakukan analisis (proses reduksi data). Tahap kedua, dilakukan penafsiran data dan pemeriksaan data atau verifikasi data, sehingga data yang terkumpul dapat dipilah-pilah dan kemudian diambil sesuai data yang diperlukan. Tahapan selanjutnya, yaitu melakukan pengecekan apakah data yang terkumpul sesuai dengan masalah yang diteliti atau belum yang berguna untuk mengungkapkan makna berdasarkan intepretasi terhadap data yang dikumpulkan, yang kemudian untuk melakukan penarikan kesimpulan.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi geografis dan iklim

Kecamatan Samalantan merupakan salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Sebelum pemekaran, Kecamatan Samalantan cukup luas, sehingga dimekarkan menjadi 3 kecamatan, yakni Kecamatan Samalantan, Kecamatan Monterado dan Kecamatan Lembah Bawang. Lokasi Kecamatan Samalantan menempati posisi strategis yang merupakan daerah lintasan perhubungan darat, yaitu terletak di jalur jalan raya antara Pemerintahan Kota Singkawang dan Kota Kabupaten Bengkayang, tepatnya dengan menempuh jarak sekitar 40 km dari ibu kota Kabupaten Bengkayang.

Adapun batas wilayah Kecamatan Samalantan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lembah Bawang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Landak
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Monterado
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Betung.

Luas wilayah Kecamatan Samalantan kurang lebih 357,2 kilometer persegi yang meliputi tujuh desa dan 23 dusun. Selanjutnya letak desa-desa di Kecamatan Samalantan seperti di sepanjang jalur jalan ke Kota Singkawang dan kota Kabupaten Bengkayang terdapat lima desa, yaitu Desa Samalantan, Desa Bukit Serayan, Desa Babane, Desa Pasti Jaya dan Desa Marunsu. Di sebelah utara pusat pemerintahan Kecamatan Samalantan terdapat Kecamatan Lembah Bawang, di sebelah selatan pusat

pemerintahan Kecamatan Samalantan terdapat 2 desa, yaitu Desa Saba'u dan Desa Tumiang. Desa-desa tersebut letaknya jauh dari pusat kecamatan, berada di daerah pedalaman.

Kecamatan Samalantan sebagian besar daerahnya berbukit-bukit, dan sebagian kecil berdataran rendah, keadaan alamnya banyak ditumbuhi hutan belukar dan hutan muda yang belum digarap oleh penduduk setempat. Keadaan alam yang demikian menyebabkan daerah ini dipengaruhi oleh 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau dengan suhu maksimum kurang lebih 35° C dan suhu minimum kurang lebih 25° C.

2. Keadaan demografis kecamatan Samalantan

Penduduk Kecamatan Samalantan terhitung pada akhir bulan Desember 2007 berjumlah 18.690 jiwa. Berikut ini dikemukakan jumlah penduduk Kecamatan Samalantan yang terdiri dari 7 desa, seperti terlihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Nama-nama Desa dan Jumlah Penduduk Tahun 2007

No.	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
1.	Samalantan	2.149	2.175	4.324	23
2.	Saba'u	983	931	1.914	10
3.	Marunsu	1.211	1.147	2.358	12
4.	Bukit Serayan	1.035	926	1.961	11,5
5.	Babane	1.019	933	1.952	11
6.	Pasti jaya	1.954	1.974	3.928	20
7.	Tumiang	1.124	1.129	2.253	12,5
		9.475	9.215	18.690	100

Sumber: Data kecamatan, tahun 2008

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, jumlah laki-laki 9.475 jiwa dan perempuan 9.215 jiwa, dengan kepala keluarga (KK) berjumlah 3.653 KK. Kepadatan penduduk rata-rata 52 jiwa/km. Jika di lihat kepadatan penduduk demikian maka Kecamatan Samalantan

dapat dikatakan jarang penduduknya, namun demikian letak pemukiman penduduk mengelompok dari desa satu dengan desa lainnya, selebihnya lokasi tersebut banyak terdiri dari hutan belukar. Berdasarkan tabel 4.1 di atas Desa Samalantan dan Desa Pasti Jaya jumlah penduduk relatif lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan desa lainnya. Sedangkan Desa Saba'u dan Desa Tumiang, jumlah penduduk relatif sedikit, hal ini disebabkan kedua desa tersebut letaknya berada di daerah pedalaman, jauh dari pusat ibu kota kecamatan. Desa Bukit Serayan, Desa Tumiang dan Desa Babane jumlah penduduknya relatif banyak, disebabkan letak desa tersebut tidak terlalu jauh dari Kecamatan Samalantan.

Penduduk Kecamatan Samalantan jika dikategorikan dari etnisitas, maka dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Keadaan Etnisitas Di Kecamatan Samalantan Tahun 2007

No.	Etnis	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Dayak	15.987	86
2.	Melayu	836	5
3.	Jawa	1.239	7
4.	Sunda	398	03
5.	Batak	137	0,76
6.	Lainnya	93	0,04
		18.690	100

Sumber: data kecamatan, tahun 2008

Berdasarkan tabel 4.2 di atas penduduk Kecamatan Samalantan mayoritas adalah etnis Dayak sebesar 86% dan perlu diketahui etnis Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan Barat. Etnis Jawa menempati urutan kedua yaitu sebesar 7%. Adapun etnis Jawa sebagai penduduk transmigrasi yang bekerja di perkebunan karet, kelapa sawit dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri. Etnis Melayu juga sebagai penduduk asli Kalimantan Barat menempati urutan ketiga sebesar 5%, sebagian besar dari mereka

sebagai pegawai negeri dan ada juga sebagai petani. Adapun etnis Melayu relatif sedikit jumlahnya di Kecamatan Samalantan disebabkan daerah tersebut termasuk daerah pedalaman untuk wilayah Kalimantan Barat. Etnis Melayu sebagian besar berada di wilayah pesisir Kalimantan Barat, yaitu di wilayah sekitar Kota Singkawang yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bengkayang. Demikian pula etnis Sunda, etnis batak dan etnis lainnya sebagai pendatang berdomisili di Samalantan karena pekerjaan, diantaranya sebagai pegawai negeri, petani dan pedagang.

Jika di lihat dari karakteristik Kabupaten Bengkayang terdiri dari wilayah hutan, perkebunan dan pertanian, khususnya Kecamatan Samalantan, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk sebagai petani sawah dan kebun, dan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Penduduk Di Kecamatan Samalantan Tahun 2007

No	Pekerjaan Penduduk	Jumlah jiwa	Persentase (%)
1	Petani	12.012	93
2	Buruh perkebunan	87	0,5
3	Pedagang	145	1,2
4	Pengangkutan	25	0,6
5	Pegawai Negeri Sipil	289	2,1
6	Pegawai Swasta	150	1,3
7	TNI	12	0,1
8	POLRI	22	0,3
9	Pensiunan	84	0,6
10	Dan lain-lain (Seperti TKI dst)	32	0,3
	Jumlah	12.858	100

Sumber: Data Kecamatan Samalantan, Tahun 2008

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Samalantan mempunyai mata pencaharian sebagian besar sebagai petani sekitar 93%, suatu perbandingan yang sangat tajam dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang merupakan daerah pertanian dan perkebunan.

Selain itu terdapat penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), sekitar 2,1% menempati urutan kedua. Penduduk yang berstatus PNS sebagian besar sebagai tenaga pendidik/pengajar dan di kantor pemerintahan. Pegawai swasta dan pedagang menempati urutan ketiga dan keempat yang merupakan kegiatan perekonomian di Kecamatan Samalantan. Disusul buruh perkebunan, pensiunan dan TNI, POLRI, Pedagang.

Berikut latar belakang pendidikan penduduk, dan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Keadaan Pendidikan Penduduk Di Kecamatan Samalantan Tahun 2007

No	Nama Desa	Jenis Kelamin								Jlh
		Laki-laki				Perempuan				
		≤SD	SMP	SMA	PT	≤SD	SMP	SMA	PT	
1	Samalantan	1.283	523	322	21	1.588	398	178	11	4.323
2	Saba'u	901	44	31	7	869	42	17	3	1.914
3	Marunsu	1.101	65	40	5	1.098	37	12	-	2.358
4	Bukit Serayan	947	48	29	11	898	19	9	-	1.961
5	Babane	897	59	47	16	875	33	16	9	1.952
6	Pasti Jaya	1.485	327	104	38	1.420	411	121	22	3.928
7	Tumiang	788	222	96	18	1.002	76	44	7	2.753
Jumlah		7.402	1.288	669	116	7.750	1.016	397	52	18.690

Sumber: Data UPT Dinas Pendidikan Kec. Samalantan, Tahun 2008

Pada tabel 4.4 di atas, keadaan pendidikan penduduk di Kecamatan Samalantan, desa Samalantan menempati urutan pertama jumlah penduduknya lebih besar, yaitu tamatan SD sampai perguruan tinggi berjumlah 4.323 orang, tamatan perguruan tingginya sebanyak 32 orang. Menempati urutan kedua adalah Desa Pasti Jaya, dan tamatan PT menempati urutan teratas yaitu sebanyak 60 orang. Desa Tumiang jumlah tamatan SD relatif paling sedikit, berhubung jumlah penduduk di desa tersebut memang sedikit dibandingkan dengan desa lainnya, namun penduduk tamatan PT berjumlah 25 orang.

Selanjutnya Desa Marunsu dan Desa Bukit Serayan penduduk tamatan PT relatif sedikit yaitu Desa Marunsu 5 orang dan Desa Bukit Serayan 11 orang, itupun tamatan PT tidak terdapat perempuannya.

Tabel 4.5
Kedaaan Jenjang Pendidikan Penduduk Di Kecamatan Samalantan
Tahun 2008

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1.	≤SD	7.402	7.750	15.152	81
2.	SMP	1.288	1.016	2.304	12,2
3.	SMA	669	397	1.066	5,7
4.	PT	116	52	208	1,1
	Jumlah	9.475	9.215	18.690	100

Sumber: Data diolah, tahun 2008

Setelah dipersentasikan latar belakang jenjang pendidikan di Kecamatan Samalantan, terungkap bahwa sebagian besar penduduk tamatan SD sebanyak 81%, mengindikasikan bahwa Kecamatan Samalantan jika ditinjau dari pendidikan tergolong rendah, hal ini disebabkan sebagian besar penduduk adalah bertani/berkebun, untuk pekerjaan tersebut tidak perlu sekolah tinggi. Namun untuk kemajuan atau pengembangan sebuah kota kecamatan, jika ditinjau dari indikator pendidikan maka Kecamatan Samalantan termasuk perkembangannya cukup lambat. Alasannya bahwa pendidikan merupakan salah satu indikator untuk sebuah kota dapat dikategorikan maju. Hal ini dapat dilihat dari persentasi tamatan SD dengan tamatan PT perbandingannya tidak berimbang, yaitu antara 81% untuk tamatan SD dan 1,1% untuk tamatan PT. Sehubungan dengan itu kedepannya perlu perhatian pemerintah daerah untuk memberikan motivasi kepada penduduk agar melanjutkan pendidikan, juga menyediakan sarana pendidikan di Kecamatan yang tergolong jenjang pendidikannya rendah.

Berdasarkan jumlah penduduk jika dirinci menurut pemeluk agama, penduduk Kecamatan Samalantan digambarkan seperti yang tertera pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Keadaan Penduduk berdasarkan Pemeluk Agama
Di Kecamatan Samalantan Tahun 2007

No	Agama/Kepercayaan pada Tuhan YME	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	3.092	17
2	Katholik	7.233	38
3	Protestan	7.959	42,75
4	Hindu	30	0,2
5	Budha	77	0,4
6	Khong Hu Chu	72	0,35
7	Kepercayaan lainnya	237	1,3
	Jumlah	18.690	100

Sumber: Data Kecamatan Samalantan, tahun 2008

Berdasarkan data latar belakang agama yang dianut, penduduk yang beragama Protestan menempati urutan teratas, yaitu sebesar 41,75%, disusul penduduk yang beragama Katolik sebesar 38%, disusul penduduk yang beragama Islam, yaitu sebesar 17%. Pemeluk agama Budha dan Khonghucu relatif berimbang. Namun yang menarik di sini jumlah penduduk berdasarkan penganut kepercayaan relatif banyak yaitu sebesar 237 orang (1,3%). Adapun penduduk penganut kepercayaan berasal dari latar belakang kepercayaan nenek moyang penduduk asli Kalimantan Barat yaitu etnis Dayak, dengan menganut kepercayaan yang bernama Kaharingan, sedangkan penganut agama Hindu termasuk relatif sedikit.

3. Keadaan sekolah, guru dan murid-murid

Lembaga pendidikan di Kecamatan Samalantan lebih didominasi Sekolah Dasar (SD), disusul Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini mengindikasikan untuk lokasi kecamatan yang cukup luas, dengan jumlah SD yang relatif banyak dapat memberikan

kesempatan penduduk mengenyam pendidikan terutama untuk Sekolah Dasar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Keadaan Sekolah, Guru dan Murid
Di Kecamatan Samalantan Tahun 2007

No.	Lembaga Sekolah	Jumlah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Persentase jumlah murid (%)
1.	TK	2	5	65	1,4
2.	SD Negeri	18	180	2.968	61
3.	SD Swasta	1	11	169	2,5
4.	SMP Negeri	1	27	450	9,4
5.	SMP Swasta	3	32	267	5,6
6.	SMA Negeri	1	39	380	9,5
7.	SMA Swasta	1	16	376	7,8
8.	Akademi Perawat	1	14	137	2,8
	Jumlah	28	292	4.812	100

Sumber: Data Kecamatan Samalantan, Tahun 2008

Sekolah Dasar negeri dan swasta berjumlah 19 sekolah, cukup representatif dengan jumlah murid SD terbanyak (2.968 atau 61% dari jumlah murid keseluruhan), hal ini berarti dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan. Namun untuk perbandingan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Atas, perbandingan tersebut kurang signifikan, hal ini disebabkan untuk sarana pendidikan SMP (4 sekolah) dan SMA (2 sekolah) ternyata belum cukup untuk menampung tamatan SD yang relatif banyak, apalagi jika mengacu kondisi geografis Kecamatan Samalantan jarak antara desa satu dengan desa lainnya cukup jauh, maka dapat dipastikan murid-murid SMP dan SMA mengalami kesulitan, karena jarak rumah dengan lokasi sekolah cukup jauh, dan sudah barang tentu diantara murid tamatan SD tidak meneruskan sekolahnya akibat jarak sekolahnya pada jenjang berikutnya relatif jauh. Namun demikian cukup menggembirakan bahwa di Kecamatan Samalantan sudah

mempunyai sekolah Akademi Perawat, hal ini memberikan kemudahan bagi murid tamatan SMA melanjutkan pendidikannya di akademi tersebut.

Jumlah guru-guru yang terdapat di Kecamatan Samalantan cukup banyak yaitu 292 orang, terbesar adalah jumlah guru SD 191 orang, disusul guru SMP 59 orang dan SMA 55 orang. Bagi kalangan dunia pendidikan guru-guru merupakan tenaga pendidik yang sangat berjasa untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, atau dengan kata lain para guru berjasa mencerdaskan masyarakat. Dilihat dari jumlah guru dan jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Samalantan cukup representatif untuk membangun sebuah kecamatan. Diharapkan kedepannya dengan iklim pendidikan yang kondusif, minat masyarakat untuk sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lebih banyak, karena masyarakat mulai menyadari bahwa pendidikan sebagai salah satu indikator seseorang bisa berhasil (sukses) dalam hidupnya.

Berdasarkan jumlah murid di Kecamatan Samalantan yang berjumlah 4.812 orang, dapat dikatakan bahwa minat masyarakat untuk sekolah cukup tinggi, hal ini dapat di lihat dari perbandingan jumlah murid dengan jumlah penduduk yaitu 4.812 orang (jumlah murid) dan jumlah penduduk 18.680 orang, jika dibuat perbandingan adalah sebesar 27% jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan. Murid SD menempati jumlah yang paling banyak, yaitu 63,5% dan jumlah murid SMP sebesar 15 %, sedangkan SMA cukup berkembang walaupun jumlah SMA hanya 2 sekolah, yaitu berjumlah sekitar 17,3%. Akademi Perawat jumlahnya relatif sedikit sekitar 2,8 %.

Mengingat penelitian ini ingin mengetahui kinerja Pengawas Sekolah TK/SD di Kecamatan Samalantan, dan jumlah SD yang menjadi binaan pengawas terdapat 19 sekolah. Nama-nama SD tersebut adalah:

1. SDN No. 01 Samalantan di Desa Samalantan
2. SDN No. 02 Samalantan di Desa Samalantan
3. SDN No. 03 Pasukayu di Desa Marunsu
4. SDN No. 04 Parompong di Desa Bukit Serayan
5. SDN No. 05 Nyandung di Desa Bukit Serayan
6. SDN No. 06 Aping di Desa Pasti Jaya
7. SDN No. 07 Serukam di Desa Pasti Jaya
8. SDN No. 08 Padang di Desa Tumiang
9. SDN No. 09 Sake di Desa Tumiang
10. SDN No. 10 Sangkinahu di Desa Tumiang
11. SDN No. 11 Polongan di Desa Saba'u
12. SDN No. 12 Kub Kilawit di Desa Saba'u
13. SDN No. 13 Siraba di Desa Saba'u
14. SDN No. 14 Mendung Terusan di Desa Samalantan
15. SDN No. 15 Sei Lipan di Desa Samalantan
16. SDN No. 16 Jirak di Desa Samalantan
17. SDN No. 17 Bamban Rancang di Desa Babane
18. SDN No. 18 Malabae di Desa Marunsu
19. Sekolah Dasar Swasta, yaitu SD Subsidi Sibale di Desa Babane.

Pengawas sekolah juga mengawasi sekolah Taman Kanak-Kanak, di Kecamatan Samalantan sekolah TK ada 2 sekolah, dalam penelitian ini sekolah TK tidak menjadi pengamatan penulis, hanya difokuskan pada Sekolah Dasar saja. Berikut ini keadaan sekolah di Kecamatan Samalantan, seperti terlihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8
Keadaan Guru dan Murid dan Kondisi Sekolah Binaan
Di Kecamatan Samalantan Tahun 2007

No.	Nama Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Kondisi Bangunan
1	SDN N. 01 Samalantan	13	200	Baik
2	SDN No. 02 Samalantan	12	173	Rusak berat sebagian
3	SDN No. 03 Pasukayu	13	150	Rusak Ringan
4	SDN No. 4 Parompong	11	196	Sedang
5	SDN No. 05 Nyandung	14	186	Baik
6	SDN No. 06 Aping	13	292	Baik
7	SDN No. 7 Serukam	15	275	Baik
8	SDN No. 8 Padang	9	120	Rusak Berat
9	SDN No. 09 Sake	7	69	Baik/kurang kls
10	SDN No. 10 Sangkinahu	8	169	Rusak berat sebagian
11	SDN No. 11 Polongan	9	182	Rusak berat sebagian
12	SDN No. 12 Kubu Kilawit	10	113	Rusak Ringan
13	SDN No. 13 Siraba	7	129	Baik sebagian
14	SDN No. 14 Mendung Terusan	10	170	Sedang dalam renovasi
15	SDN No. 15 Sei Lipan	7	93	Rusak berat
16	SDN No. 16 Jirak	11	203	Baik
17	SDN No. 17 Bamban Rancang	8	185	Baik
18	SDN No. 18 Malabae	4	49	Baik
19	SD Subsidi Sibale	11	169	Baik
	Jumlah	194	2.174	

Sumber: Data UPT Dinas Pendidikan Kec. Samalantan, Tahun 2008

Berdasarkan tabel di atas, jumlah guru yang mengajar di sekolah binaan relatif berimbang dengan jumlah murid yang ada, seperti pada SDN No.1 Samalantan, jumlah murid 200 orang dengan jumlah guru 13 orang. Demikian pada SDN No. 18 Malabae jumlah muridnya yaitu 49 orang, dan jumlah guru 4 orang. Jika dari kelas 1 sampai dengan 6, jumlah murid rata-rata tiap kelas 8 orang, dan tiap guru ada yang mengajar 2 kelas. Demikian pula kondisi sekolah, ada yang baik, ada juga yang rusak berat perlu direnovasi dengan segera, karena kelas yang rusak akan mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar di kelas. Adapun sekolah-sekolah yang perlu direnovasi yaitu

SDN No. 02 Samalantan, SDN No. 8 Padang, SDN No. 10 Sangkinahu, SDN No. 11 Polongan, dan SDN No. 15 Sei Lipan.

Pengawas yang ada di Kecamatan Samalantan ada 2 (dua) orang yang membina 19 sekolah seperti tersebut di atas. Selanjutnya data kedua pengawas tersebut adalah:

1. Nama : Muslianus Liat, S.Pd
Umur : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Pengawas Sekolah TK/SD
Lama bekerja : 4 tahun 3 bulan
Alamat : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Samalantan
2. Nama : Alexander, S.Pd
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Jabatan : Pengawas Sekolah TK/SD
Lama bekerja : 1 tahun
Alamat : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Samalantan.

Dengan melihat latar belakang pendidikan pengawas seperti tersebut di atas sudah memadai, yakni sudah Srata Satu, hanya kalau diperhatikan masa kerjanya sebagai pengawas sekolah relatif masih baru sehingga dalam melaksanakan tugasnya belum menguasai tupoksi dan lokasi sekolah yang menjadi binaannya. Hal ini dapat dilihat dari jadwal kegiatan pengawasan dengan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah belum terjadwal dengan baik.

4. Potensi pengelola sekolah di kecamatan Samalantan

Pengelola Sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya seperti penjaga sekolah merupakan faktor penentu bagi kemajuan serta mutu sekolah yang dikelolanya, tetapi potensi pegelora sekolah tidak terlepas dari latar belakang pendidikan mereka. Karena itu sejalan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, Bab IV pasal 8 dan pasal 9. Pasal 8, berbunyi: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4.9
Persentase Latar Belakang Pendidikan Guru-guru
TK/SD di Kecamatan Samalantan Tahun 2007

No.	Pendidikan	Jumlah Guru		Persentase (%) Guru		Ket.
		PNS	Honor	PNS	Honor	
1	S1/D4	12	6	8,33 %	11,76 %	
2	D3	4	2	2,77 %	3,92 %	
3	D2	67	6	46,53 %	11,76 %	
4	SLTA	61	37	42,36 %	72,55 %	
Jumlah		144	51	99,99 %	99,99 %	

Sumber: Data UPT Dinas Pendidikan Kec. Samalantan, Tahun 2008

Pada pasal 9, berbunyi: kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kemudian kalau dilihat dari latar belakang pendidikan pengelola sekolah, baik sebagai Kepala Sekolah maupun Dewan Guru terlihat bahwa dari 144 guru PNS, yang berlatar pendidikan S1 ada 12 orang, D2 = 67 orang, D3= 4 orang, SLTA= 61 orang. Selanjutnya latar belakang pendidikan guru honorer, yaitu S1= 6 orang, D3= 2 orang, D2= 6 orang, dan SLTA= 37 orang. Dari tabel di atas terlihat bahwa guru-guru TK/SD

PNS yang ada di Kecamatan Samalantan baru 57,64 % yang memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Latar belakang pendidikan guru sebagian besar masih tamatan setaraf SMA, baik guru tetap maupun guru honorer. Seperti diketahui bahwa sebelum terbitnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, persyaratan minimal menjadi guru SD adalah tamatan SPG/ sederajat, sehingga para guru tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi, namun saat ini UU mengharuskan para guru mempunyai latar belakang tamatan S1, sehingga para guru diwajibkan untuk meneruskan kuliah ke jenjang S1 dengan pertimbangan bahwa para guru harus menambah wawasan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman.

B. Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Pengawas Sekolah di Kecamatan Samalantan

Tugas utama pengawas (*supervisor*) adalah membantu guru-guru dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Perkembangan potensi perlu dilihat latar belakang keahlian dan minat para guru-guru untuk bekal dalam mengajar. Ini berarti supervisor memberikan motivasi kepada guru untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga beban tugas para guru dapat dilaksanakan dengan senang hati. Selanjutnya supervisor dituntut dapat menggali potensi para guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan profesi masing-masing, yang berimplikasi pada peningkatan dan pengembangan karir bagi guru-guru yang berprestasi.

Pengawas sekolah selain melakukan pengawasan dan pembinaan, tidak terlepas dari wawasan pengetahuannya tentang pengawasan dan pembinaan kepada guru-guru serta kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Implikasinya dapat di lihat dari kinerja

yang dimilikinya dalam melakukan tugas kepengawasan dan pembinaan di sekolah-sekolah. Pengukuran kinerja merupakan suatu penilaian terhadap pengawas sekolah, yang menganalisis beberapa indikator yang menyertai kepengawasan, yaitu bagaimana sasaran kerjanya, program dan tugas-tugas khusus yang dilakukannya, bagaimana cara memberikan pembinaan kepada guru-guru, dan laporan atau evaluasi hasil pengawasan yang telah dilakukannya. Jadi pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan. Akhirnya dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki terhadap pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara sistematis dan lebih terarah.

Upaya untuk meningkatkan kualitas aktivitas pembelajaran di sekolah, pengawas sekolah mempunyai wewenang dan tanggungjawab memberikan pelayanan dalam rangka membina dan membimbing para guru sesuai dengan program dan tupoksi yang dipersiapkan. Sebagai pengawas, maka pengawas sekolah dituntut menunjukkan kinerja secara profesional sesuai dengan pengukuran kinerja dengan menggunakan ukuran kinerja pelayanan yakni, akuntabilitas, responsivitas, efisiensi, orientasi terhadap pelayanan dan fasilitas pelayanan. Konteks penelitian ini yang sangat berhubungan langsung dengan kinerja pengawas sekolah dibatasi pada indikator akuntabilitas dan efektivitas dalam melakukan pelayanan kepada guru-guru di sekolah. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani yang memiliki tanggungjawab kepada publik (masyarakat umum), sedangkan efektivitas adalah setiap proses kegiatan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

Tugas kepengawasan di sini adalah kemampuan pengawas sekolah mempertanggungjawabkan cara yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Keberhasilan pengawas mengimplementasikan program berdasarkan dari *input* berupa program dan *output* berupa pelaksanaan tugas. Beberapa indikator yang melekat pada tugas pengawas terdiri dari akuntabilitas dan efektivitas kepengawasan dan pembinaan sesuai kondisi dan situasi yang terjadi di sekolah-sekolah binaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Selanjutnya indikator tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Akuntabilitas dan efektivitas kepengawasan yang terdiri dari:

- a. Wewenang tugas yang diemban, yaitu tingkat pemahaman pengawas sekolah dalam program pengawasan.
- b. Program kepengawasan, yaitu terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas atau tidak, serta apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak.
- c. Jadwal Kunjungan ke sekolah Binaan

Akuntabilitas dan efektivitas pembinaan terhadap guru-guru terdiri dari:

- a. Pembinaan proses belajar mengajar di kelas dan administrasi kelas
- b. Hasil belajar anak didik
- c. Peningkatan profesional guru-guru.

Akuntabilitas dan efektivitas pengawas sekolah di Kecamatan Samalantan dalam memberikan pengawasan dan bimbingan kepada guru-guru, dapat di lihat dari sikap dan tindakannya seperti sosialisasi dan contoh-contoh yang berkaitan dengan program pendidikan di sekolah. beberapa indikator yang dianalisis adalah berupa kegiatan

pengawasan terdiri dari program pengawas yang telah disusun apakah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, dan program kunjungan ke sekolah binaan, bagaimana bimbingan atau pembinaan proses belajar mengajar di kelas, dan peningkatan profesional guru

1. Akuntabilitas dan efektivitas kepengawasan

a. Akuntabilitas dan efektivitas program kegiatan kepengawasan

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pengawas dalam membuat program kepengawasan agar dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah yang menjadi binaannya. Program yang dilaksanakan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan, hal ini disebabkan tiap-tiap sekolah yang menjadi binaan masing-masing berbeda sesuai dengan kondisi geografis dan lingkungan sosialnya.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu program mencapai tujuan, apabila program telah dilaksanakan dengan baik, maka program kepengawasan telah berjalan efektif. Perlu dijelaskan terlebih dahulu, bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan. Biaya bisa jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, tetapi melint apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas di sini bagaimana tingkat pemahaman pengawas terhadap uraian pekerjaan, melaksanakan mekanisme atau prosedural pekerjaan yang sesuai dengan peraturan (persyaratan), relevansi uraian tugas dan program dengan kondisi realitas, dan beberapa permasalahan yang telah berhasil diselesaikan.

Hasil observasi di lapangan, bahwa pengawas mempunyai program kerja dan sesuai pula dengan tupoksi kepengawasan berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas RI

No.020/1998, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Pelaksanaan teknis secara garis besar terdapat 9 indikator yang dapat diuraikan lagi menjadi uraian tugas pengawas yang lebih rinci, sehingga mudah untuk dilaksanakan. Program yang telah di buat berupa program triwulan dan tahunan, dan program pengawas setiap tahunnya berlaku tetap dan bersifat umum, namun ketika diimplementasikan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan juknis dimaksud, hanya dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Tabel 4.10
Program Pengawas Sekolah pada Masing-masing Sekolah Binaan
Tahun 2007

No.	Program	Triwulan	Tahunan	Keterangan
1.	Menyusun Program pengawas Sekolah	√	√	
2.	Menilai hasil belajar siswa dan kemampuan guru	√	√	
3.	Mengumpulkan dan mengelola data sumber daya pendidikan, proses belajar mengajar/bimbingan dan lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan dan hasil belajar siswa.	√	√	
4.	Menganalisis hasil belajar/bimbingan siswa dan guru serta sumber daya pendidikan.		√	
5.	Melaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga lainnya di sekolah	√	√	
6.	Menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawasan sekolah persekolah	√	√	
7.	Melaksanakan pembinaan lainnya di sekolah selain proses belajar mengajar/bimbingan siswa	√	√	
8.	Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan dari sekolah yang menjadi binaan	√	√	
9.	Melaksanakan tugas kepengawasan sekolah di daerah terpencil.	√	√	

Sumber: Hasil data observasi, tahun 2008

Pada dasarnya pengawas sekolah telah membuat program kepengawasan, baik program triwulan dan tahunan yang menjadi syarat utama untuk melaksanakan kepengawasan berdasarkan petunjuk pelaksanaan agar tidak menyimpang. Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa pengawas merealisasikan program kegiatan hanya sebatas

program yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Kenyataannya semua program yang telah menjadi acuan baku, belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Selain sulit merealisasikan program yang ada, sebenarnya program pelaksanaan mengacu pada program yang dibuat bersama-sama ketika mengikuti diklat pengawas di Pontianak yang dilaksanakan oleh LPMP. Program ini bersifat monoton, tidak ada inovasi baru yang diciptakan oleh pengawas yang berkaitan dengan pembuatan program kepengawasan.

Penyusunan program kepengawasan tersebut merupakan hasil diklat pengawas secara bersama-sama di tingkat propinsi, dengan demikian setiap pengawas memiliki program pengawasan. Pembuatan penyusunan program kerja secara bersama-sama seperti ini ada segi positif dan ada pula segi negatifnya. Segi positifnya adalah: Pertama, setiap pengawas memiliki program kerja yang dapat menuntun dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Kedua, beban kerja untuk menyusun program kepengawasan secara administratif berkurang, berarti bisa memudahkan pengawas untuk secara langsung terjun ke lapangan melaksanakan program kepengawasan. Ketiga, program kepengawasan yang sudah baku dapat dimiliki oleh para pengawas yang baru saja diangkat menjadi pengawas kendatipun belum sama sekali mengikuti diklat pengawas, karena dapat menggandakannya dengan rekan pengawas yang dianggap sudah senior. Adapun segi negatifnya, pertama, frekuensi aktivitas pengawas masing-masing tidak sama antara satu pengawas dengan pengawas lainnya.

b. Akuntabilitas dan efektivitas jadwal kunjungan ke sekolah

Akuntabilitas pengawas bukan terletak pada program melainkan implementasi program yang telah dibuat. Berdasarkan hasil observasi lapangan mengenai pelaksanaan

tugas pengawas beberapa program seperti melaksanakan kunjungan ke lapangan/sekolah-sekolah yang menjadi binaan pengawas, ternyata pengawas tidak mempunyai jadwal kunjungan ke sekolah-sekolah, pada poin 1 program kepengawasan sekolah adalah membuat jadwal kunjungan. Akuntabilitas kunjungan ke sekolah terkait dengan akuntabilitas pembinaan proses belajar mengajar di kelas.

Program ini merupakan dasar dari aktivitas pengawas tentang akuntabilitas pembinaan yang dilakukannya. Tidak adanya jadwal berarti tidak adanya manajemen atau pengelolaan kegiatan kepengawasan. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang kepala sekolah ketika dikonfirmasi mengenai jadwal kunjungan kepengawasan, menurutnya bahwa kami tidak pernah mendapat jadwal kunjungan kerja dari pengawas sekolah, pengawas sekolah hanya datang ke sekolah kami sesekali saja, jika dianggap perlu, misalnya adanya kasus-kasus atau pemberitahuan yang penting. Tetapi untuk kegiatan pembinaan, kelihatannya kurang menjadi perhatian pengawas. Kurangnya kunjungan kerja ke beberapa sekolah juga disebabkan pengawas sekolah diberi beban tugas lainnya dari Diknas Kecamatan dan Kabupaten, seperti membuat laporan kepengawasan, menyelesaikan surat menyurat atau dinas luar yang ditugaskan oleh kepala dinas.

Keberadaan pengawas di kecamatan Samalantan dari 19 sekolah dasar yang di bina hanya mempunyai 2 (dua) orang pengawas. Idealnya di tiap gugus wilayah sekolah setiap seorang pengawas membina lima atau enam sekolah dengan persyaratan letak lokasi masing-masing sekolah berdekatan, sehingga mudah dijangkau dalam waktu yang relatif singkat. Berkaitan dengan efektivitas pengawas sekolah di Kecamatan Samalantan, ternyata kurang efektif, hal ini disebabkan jumlah pengawas kurang

mencukupi, ditambah lagi kondisi geografis kecamatan Samalantan jarak antara desa yang satu dengan desa lainnya dan letak sekolah satu dengan lainnya berjauhan, bahkan ada sekolah yang menjadi binaan terdapat di daerah terpencil, hal ini yang menjadi hambatan bagi pengawas melakukan pembinaan terutama di sekolah yang terpencil.

Walaupun beban kerja yang cukup banyak demi efektivitas selayaknya pengawas sekolah membuat jadwal kunjungan, namun pengawas sekolah tidak membuat uraian tugas kunjungan kesekolah-sekolah binaan, dan pada saat penelitian penulis mencoba membuat uraian tugas sesuai kegiatan kepengawasan, seperti pada point nomor 1 pada program pengawas Sekolah berupa kunjungan ke sekolah-sekolah binaan di buat suatu uraian tugas.

Tabel 4.11.
Jadwal Kegiatan Kepengawasan di SD Binaan
di Kecamatan Samalantan Januari Tahun 2008

No.	Nama Sekolah	Jadwal Tahunan	Jadwal Triwulan	Muslianus Lat. S.Pd	Alexander, S.Pd
1.	SDN 1 Samalantan	x	x	x	x
2.	SDN 2 Samalantan	x	x	x	x
3.	SDN 3 Pasukayu	x	x	x	x
4.	SDN 4 Parompong	x	x	x	x
5.	SDN 5 Nyandung	x	x	x	x
6.	SDN 6 Aping	x	x	x	x
7.	SDN 7 Serukam	x	x	x	x
8.	SDN 8 Padang	x	x	x	x
9.	SDN 9 Sake	x	x	x	x
10.	SDN 10 Sangkinahu	x	x	x	x
11.	SDN 11 Polongan	x	x	x	x
12.	SDN 12 Kubukilawit	x	x	x	x
13.	SDN 13 Siraba	x	x	x	x
14.	SDN 14	x	x	x	x

No.	Nama Sekolah	Jadwal Tahunan	Jadwal Triwulan	Muslianus Liat, S.Pd	Alexander, S.Pd
	Mendung Terusan				
15.	SDN 15 Sungai Lipan	x	x	x	x
16.	SDN 16 Jirak	x	x	x	x
17.	SDN 17 Bamban Rancang	x	x		
18.	SDN 18 Malabae	x	x	x	x
19.	SDS Sibale	x	x	x	x

Sumber: data diolah hasil observasi Juli. tahun 2008.

Keterangan: tanda x berarti tidak ada uraian tugas

Berdasarkan tabel 4.11 baik Muslianus Liat, S.Pd dan Alexander, S.Pd, keduanya tidak membuat uraian tugas kunjungan ke sekolah-sekolah binaan yang berjumlah 19 sekolah, baik triwulan maupun tahunan. Idealnya sesuai program yang telah dibuat (direncanakan) dirinci lagi menjadi uraian tugas terutama jadwal kunjungan ke sekolah binaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muslianus Liat, S.Pd, mengatakan bahwa kami sebagai pengawas tetap melaksanakan program kepengawasan ke sekolah-sekolah binaan. Tetapi kami tidak membuat uraian tugas lebih rinci, seperti membuat jadwal tahunan dan triwulan sesuai dengan 9 aspek program kepengawasan. Demikian pula dengan kondisi wilayah geografis yang berjauhan, kondisi wilayah kota masih tradisional, dan dana yang terbatas membuat kami kewalahan untuk melakukan kunjungan secara rutin pada masing-masing sekolah, hanya sesekali kami melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah binaan.

Salah satu tugas pengawas adalah membina kerjasama yang harmonis dengan para guru dan kepala sekolah binaan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri P dan K RI No. 0134/0/1977 salah satu tugas pengawas adalah mengendalikan pelaksanaan kurikulum yang meliputi isi, metode penyajian, penggunaan alat-alat perlengkapan dan

penilaian agar berlangsung sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme uraian tugas dapat dibuat sesuai dengan prosedural yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil informasi yang didapat penulis di sekolah di kota Pontianak, bahwa untuk kegiatan kepengawasan, yaitu adanya koordinasi jadwal pengawas dengan kepala sekolah dan guru-guru yang ditunjuk untuk menjadi pengawas secara internal. Adapun kegiatan kepengawasan berupa kelengkapan administrasi kelas dan aktivitas di kelas yang mengacu pada RPP. Koordinasi ini akan lebih efektif dan berjalan dengan mekanisme secara otomatis dan simultan. Setiap guru diberi jadwal pengawas kepada guru yang lain, demikian pula sebaliknya. Tugas kepala sekolah juga secara berkala mengawas kegiatan atau aktivitas guru di kelas dan administrasi kelas. Kunjungan pengawas secara berkala bisa melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang ditunjuk menjadi pengawas internal. Jadwal kegiatan kepengawasan secara simultan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12.
Jadwal Kegiatan Kepengawasan di SD Binaan
di Kecamatan Samalantan, Januari Tahun 2008

No.	Jadwal Kegiatan/kelas	Jenis kegiatan	Aktivitas Guru Pengawas Internal	Aktivitas Kepala sekolah	Aktivitas Pengawas Sekolah
1.	Januari/ Kelas 1	Buku RPP, buku nilai, bank soal dan kunjungan kelas	Tidak ada guru pengawas internal hanya didampingi oleh guru kelas yang bersangkutan	Kepala sekolah tidak mempunyai jadwal untuk kegiatan pengawas, hanya mendampingi pengawas ketika mengadakan kunjungan	1. Pengawas sekolah tidak ada jadwal kunjungan dan tidak pernah dikoordinasikan membuat jadwal kunjungan. 2. Pengawas melakukan kunjungan kelas 1 memeriksa administrasi kelas dan mengamati guru sedang mengajar

No.	Jadwal Kegiatan/kelas	Jenis kegiatan	Aktivitas Guru Pengawas Internal	Aktivitas Kepala sekolah	Aktivitas Pengawas Sekolah
2.	Januari kelas 2	Buku RPP, buku nilai, bank soal dan kunjungan kelas	Didampingi oleh guru internal dan guru kelas yang dikunjungi	Kepala sekolah mendampingi pengawas, setelah pengawas melakukan kunjungan kelas kemudian berdiskusi	Pengawas melakukan kunjungan ke kelas 2 dan memeriksa kelengkapan administrasi kelas
3.	Januari Kelas 3	Buku RPP, buku nilai, bank soal dan kunjungan kelas	Didampingi oleh guru kelas yang dikunjungi dan guru internal	Kepala sekolah mendampingi pengawas, melakukan kunjungan kelas, berdiskusi	Pengawas melakukan kunjungan ke kelas 3 dan memeriksa kelengkapan administrasi kelas

Sumber: data diolah hasil observasi Juli. tahun 2008.

Kunjungan pengawas menjadi kegiatan rutin setiap sekolah binaan, namun kegiatan rutin tidak disertai jadwal yang terprogram. Kunjungan tersebut terutama yang dilakukan pengawas adalah melakukan pemeriksaan administrasi kelas, kelengkapan bahan ajar, dan dilanjutkan dengan mengamati guru yang sedang mengajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru kelas yang dikunjungi mengatakan bahwa, pengawas sekolah biasanya menanyakan kelengkapan administrasi kelas dan memberikan saran memperbaiki kegiatan belajar mengajar dan melengkapi administrasi kelas. Mengenai jadwal kunjungan secara berkala memang tidak ada jadwal yang kami terima, hanya dilakukan secara insidental.

Efektivitas kepengawasan seperti tabel di atas sangat membantu para pengawas dan kepala sekolah apalagi para guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas, selain untuk memberikan motivasi kepada guru mengajar juga sebagai fungsi kontrol secara simultan, masing-masing guru memberikan masukan kepada teman seprofesi dan akan meringankan tugas kepala sekolah dan pengawas. Sehubungan dengan fungsi pokok pemimpin dalam hal ini kepala sekolah dan pengawas sekolah

fungsinya adalah membantu guru-guru dalam mengembangkan potensi-potensi atau daya kesanggupan, namun demikian tugas pengawas sekolah bukan melakukan inspeksi melainkan membantu para guru dalam proses belajar mengajar di kelas agar lebih tertib dan bermutu.

Berkenaan dengan tugas pengawas pada dasarnya memahami apa yang telah menjadi kewajibannya dalam menjalankan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ada, karena uraian tugas selalu ada pada juklak, sehingga memudahkan pengawas menjalankan tugasnya. Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu daerah yang masih dalam pengembangan wilayah atau masih dalam kondisi pedesaan, dan letak geografis sekolah yang saling berjauhan, pekerjaan pengawas disesuaikan dengan kondisi lapangan yang letaknya terpencil seperti, SDN 10 Sangkinahu (jarak 12 km), SDN 17 Bambang Rancang (jarak 11 km), SDN 15 Sungai Lipan, SDN Siraba dengan jarak 9 km dari Kota Kecamatan Samalantan yang sulit dijangkau dengan kendaraan dan jalannya licin. Sekolah-sekolah seperti ini tentunya sulit bagi pengawas untuk berkunjung mengadakan pembinaan.

Implementasi program akan lebih efektif jika dilihat dari kegiatan program disesuaikan dengan lokasi dan kondisi. Pengawas melakukan pembinaan disesuaikan jarak antara sekolah satu dengan sekolah lainnya yang saling berdekatan. Sekolah-sekolah tersebut dibagi menjadi beberapa gugus, hal ini dilakukan untuk efektifitas dan efisiensi yang tidak menggunakan waktu yang lama dan pengeluaran dana transportasi menjadi lebih hemat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas Muslianus Liat, S.Pd dan Alexander, S.Pd secara terpisah, mereka mengatakan bahwa karena Kecamatan Samalantan jarak antara satu sekolah dengan lainnya saling berjauhan,

dibagi menjadi beberapa gugus, demikian pula halnya dalam kunjungan ke sekolah-sekolah, secara simultan dan bergiliran mereka membagi jadwal kunjungan.

Menurut salah seorang kepala sekolah memang seharusnya mereka membuat jadwal kunjungan sekolah sesuai dengan program, namun mereka menganggap hal ini sudah menjadi tugas rutin sehingga secara berkala walaupun tanggalnya belum bisa ditetapkan, namun mereka lakukan kunjungan ke sekolah-sekolah binaan. Menurut mereka bahwa untuk mengantisipasi sekolah yang jauh, maka dibuat program setiap sekolah yang ditunjuk menjadi lokasi gugus, mendapat tugas membina masing-masing sekolah, terutama bagi lokasi yang sangat jauh. Masing-masing gugus membuat kegiatan melalui KKG. Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan sekolah binaan yang dibagi menjadi beberapa gugus.

Tabel 4.13
Nama-nama Gugus Sekolah Binaan di Kecamatan Samalantan, Januari 2008.

No	Nama Gugus	Tempat Gugus	Sekolah Imbas
1.	Gugus I Serukam	SDN 07 Serukam	1. SDN 05 Nyandung 2. SDN 06 Aping 3. SDN 08 Padang 4. SDN 09 Sake 5. SDN 10 Sangkinahu 6. SD Subsidi Sibale
2.	Gugus II Samalantan	SDN 01 Samalantan	1. SDN 02 Samalantan 2. SDN 14 Mendung Terusan 3. SDN 15 Sei Lipan 4. SDN 16 Jirak
3.	Gugus III Pasukayu	SDN 03 Pasukayu	1. SDN 04 Parompong 2. SDN 18 Malabae
4.	Gugus IV Polongan	SDN 11 Polongan	1. SDN 12 Kubu Kilawit 2. SDN 13 Siraba

Sumber data: Diknas Kecamatan Nopember, 2008.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang kepala sekolah, bahwa kegiatan KKG yang dilakukan masing-masing gugus. Gugus I Serukam dan gugus II Samalantan termasuk gugus yang terdekat dengan ibukota kecamatan, masing-masing sekolah saling berdekatan sehingga memudahkan pengawas sekolah melakukan kunjungan. Berdasarkan hasil observasi ketika kegiatan KKG di gugus I Serukam yang sedang berlangsung, pengawas sekolah hadir dan memberikan informasi-informasi serta ikut berdiskusi dengan guru-guru.

Beberapa gugus yang termasuk jauh diantaranya Gugus III Pasukayu dan Gugus IV Polongan, menurut hasil wawancara dengan salah seorang guru, bahwa gugus tersebut jarang dikunjungi, bahkan kegiatan KKG juga jarang dilakukan. Hal ini disebabkan jarak antara Gugus III yang terletak di SDN 03 Pasukayu dengan SDN 04 Parompong dan SDN 18 Malabae cukup jauh, sehingga kepala sekolah mengambil kebijakan, tiap-tiap sekolah menyelenggarakan sendiri kegiatan KKG setiap minggu, hanya sebulan sekali berkumpul atau jika ada informasi baru yang harus disampaikan kepada guru-guru.

Tiap gugus membuat jadwal Kelompok Kerja Guru (KKG), yang merupakan wadah para guru berkumpul untuk membicarakan berbagai persoalan pendidikan. Setiap gugus tertentu di Kecamatan Samalantan para guru berkumpul sebulan sekali pada hari Sabtu dan jika sangat diperlukan bisa lebih dari satu kali berkumpul. Idealnya pertemuan KKG dilaksanakan seminggu satu kali, hal ini agar para guru bisa mendapatkan informasi dan bisa berdiskusi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum bisa diselesaikan dan menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Kenyataannya hari Sabtu yang telah dijadwalkan terkadang tidak dapat dilaksanakan, karena beberapa sebab seperti hari libur sekolah, ulangan sekolah dan kegiatan sekolah lainnya.

Berdasarkan hasil observasi kegiatan pengawas sekolah dalam KKG ini adalah (1) Melakukan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada setiap KKG. (2) Memberikan saran untuk peningkatan kemampuan profesional guru. Berdasarkan hasil observasi penulis ketika meninjau kegiatan KKG guru di salah satu gugus sekolah, bahwa para Pengawas Sekolah belum melakukan tugas sesuai program yang telah dibuat seperti: (1) Memberi contoh pelaksanaan tugas guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. (2) Membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan sekolah.

Salah satu tugas pengawas yakni memberikan contoh kegiatan belajar mengajar, seperti yang tertera dalam program. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada kegiatan KKG, pengawas sekolah hanya mengamati dan berdiskusi dengan guru-guru tentang topik bahasan yang dilakukan pada hari itu, misalnya tentang pembuatan media pembelajaran untuk mata pelajaran matematika kelas empat, lima dan enam. Kegiatan KKG sesuai dengan topik bahasan sesuai dengan kesepakatan guru. Untuk program pemberian contoh kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan oleh pengawas, menurut pengawas bahwa guru-guru sebenarnya telah menguasai dan berpengalaman dalam mengajar, jadi pengawas hanya melakukan supervisi di kelas ketika guru sedang mengajar. Setelah selesai jam pelajaran, pengawas tersebut melakukan pertemuan dengan guru yang bersangkutan untuk berdiskusi dan memberikan masukan, seperti mengenai penggunaan media pembelajaran atau memberikan saran agar menggunakan metode mengajar lebih bervariasi.

Mengenai kegiatan pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan sekolah, yang dilakukan oleh pengawas menurut salah seorang guru berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa, ketika pengawas melakukan kunjungan sekolah, pengawas sekolah

hanya mengobservasi kondisi lingkungan kebersihan sekolah, jadwal kegiatan sekolah, melihat sarana sekolah seperti ruang kelas, ruang UKS, ruang WC, dan kondisi kebersihan ruang kelas dan halaman sekolah. Sedangkan untuk fasilitas sekolah, pengawas mengobservasi kelengkapan administrasi kepala sekolah dan kelengkapan administrasi kelas guru-guru, kelengkapan bahan ajar, media pembelajaran dan perpustakaan.

Berdasarkan dari 4 gugus yang telah ditentukan. Tiap gugus melaksanakan kegiatan KKG setiap hari Sabtu. Menurut kepala sekolah SDN No. 07 Serukam, mengatakan bahwa, pengawas sekolah tidak dapat hadir setiap kegiatan hari Sabtu, dan pengawas tidak membuat jadwal kunjungan pada saat kegiatan KKG, hanya sewaktu-waktu pengawas hadir. Berikut jadwal kunjungan dan kegiatan KKG yang terdapat pada masing-masing gugus sekolah seperti terlihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14.
Jadwal Kegiatan KKG dan Kunjungan Pengawas di SD Binaan
di Kecamatan Samalantan Januari Tahun 2008

No.	Jadwal Kegiatan/ Sekolah	Jenis kegiatan	Aktivitas Kegiatan
1.	2 Pebruari 2008 Gugus I Serukam	Membuat atau menyempurnakan RPP masing-masing guru kelas dan guru bidang studi secara berkelompok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas memberikan informasi baru tentang model pembelajaran KTSP 2. Pengawas sebagai nara sumber dan salah satu guru senior memberikan arahan 3. Pengawas sekolah dan guru-guru berdiskusi sesuai bidang kajian masing-masing
2.	Pebruari 9 Perbuari 2008 Gugus II Samalantan	Membahas alat peraga/bahan ajar masing-masing guru kelas dan guru bidang studi secara berkelompok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas mengamati ketika guru-guru sedang membuat media pembelajaran 2. Masing-masing kelompok membuat bahan ajar. 3. Kelompok guru kelas membuat gambar bangun ruang terbuat dari kertas karton untuk pelajaran

No.	Jadwal Kegiatan/ Sekolah	Jenis kegiatan	Aktivitas Kegiatan
			matematika 4. Kelompok guru bidang studi matematika membuat bangun ruang balok dan prisma terbuat dari kertas karton
3.	16 Pebruari 2008 Gugus II Samalantan	Membahas evaluasi mengajar masing-masing guru kelas dan guru bidang studi secara berkelompok	1. Pengawas sebagai nara sumber dan salah satu guru senior memberikan arahan. 2. Pengawas sekolah dan guru-guru berdiskusi tentang hasil evaluasi mengajar

Sumber: data diolah hasil observasi Juli, tahun 2008.

Berdasarkan observasi di atas, kegiatan kunjungan pengawas hanya dilakukan sewaktu-waktu secara bergantian. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan salah seorang kepala sekolah mengatakan bahwa mereka tidak membuat jadwal atau program kunjungan KKG guru-guru yang dilakukan setiap gugus. Kegiatan pengawas hanya sesekali mengikuti kegiatan KKG yang dilakukan pada gugus sekolah masing-masing. Materi atau tema kegiatan KKG disusun oleh kelompok KKG masing-masing sesuai kebutuhan sekolah. Pengawas sekolah tidak terlibat dalam perencanaan penyusunan materi. Biasanya pengawas sekolah telah mendapat jadwal dan materi dari tiap-tiap gugus, kemudian memberikan arahan sesuai dengan permintaan kelompok KKG. Jika tema kegiatan memerlukan nara sumber, maka kepala sekolah berkordinasi dengan pngawas sekolah mendatangkan nara sumber dari diknas atau guru senior yang telah mengikuti kursus.

2. Akuntabilitas dan efektivitas pembinaan terhadap guru-guru

a. Akuntabilitas dan efektivitas pembinaan belajar mengajar di kelas

Akuntabilitas dan efektivitas pembinaan belajar mengajar di kelas dapat terukur melalui uraian kerja berupa jadwal kunjungan, materi atau tema dan menemukan

masalah-masalah di lapangan. Pembinaan belajar mengajar diatur dan dilaksanakan masing-masing sekolah melalui pembinaan internal yang terdiri dari kepala sekolah dan guru senior. Kegiatan pembinaan dilakukan berdasarkan uraian tugas yang sesuai dengan program, yang dibuat oleh pengawas dan sekolah binaan. Melalui uraian tugas dapat ditemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hasil observasi ternyata pengawas hanya memberikan uraian tugas secara garis besar, tidak dibuat secara rinci. Lebih jelasnya uraian tugas dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15.
Jadwal Kunjungan pada SDN Binaan Tahun 2008

No.	Triwulan/ Bulan	Nama Gugus	Sekolah	Kelas	Tema	Masalah
1.	Januari	Gugus I Serukam	1. SDN 05 Nyandung 2. SDN 06 Aping 3. SDN 08 Padang 4. SDN 09 Sake 5. SDN 10 Sangkinahu 6. SD Subsidi Sibale	1-6	Kelengkapan program RPP guru	Pada umumnya guru tidak membuat RP, hanya mengopi RPP yang sudah ada dari guru lain.
2	Pebruari	Gugus II Samalantan	1. SDN 02 Samalantan 2. SDN 14 Mendung Terusan 3. SDN 15 Sei Lipan 4. SDN 16 Jirak	1-6	Kelengkapan bahan ajar dan alat peraga	Bahan ajar kurang bervariasi dan alat peraga masih minim
3.	Maret	Gugus III Pasukayu	1. SDN 04 Parompong 2. SDN 18 Malabae	1-6	Proses belajar mengajar di kelas	Guru mengguna- kan metode yang tidak variatif
4.	April	Gugus IV Polongan	1. SDN 12 Kubu Kilawit 2. SDN 13 Siraba	1-6	Kelengkapan administrasi kelas	Hampir semua tidak lengkap

Sumber: Data hasil observasi dan diolah kembali Oktober, Tahun 2008.

Setelah melakukan observasi kelas, maka penulis menemukan beberapa kelemahan yang terjadi di sekolah binaan. Pengawas belum mampu membuat uraian tugas secara rinci sesuai tupoksi yang sudah menjadi tanggungjawabnya, apalagi menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Permasalahan yang ditemui di beberapa sekolah yang menjadi pengamatan peneliti, bahwa hampir semua guru tidak membuat RPP, ternyata RPP yang ada hanya mengkopi dengan guru lain. Demikian pula kelengkapan bahan ajar dan alat peraga, proses mengajar di kelas dan kelengkapan administrasi kelas. Hal ini berarti bahwa pembinaan pengawas selama ini kurang optimal, seperti pada umumnya kesiapan guru mengajar hampir semuanya tidak lengkap.

Sudah menjadi kebiasaan para guru umumnya bahwa ketika mengajar kurang mempunyai persiapan, seperti kelengkapan bahan ajar, materi dan media pembelajaran. Menghadapi situasi seperti ini sulit bagi pengawas sekolah untuk merubah kebiasaan guru seperti ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pengawas Bapak Alexander, mengatakan bahwa pada umumnya sekolah-sekolah yang berada di daerah pedalaman seperti di SDN 12 Kubu Kilawit dan SDN 13 Siraba yang sulit dijangkau dengan alat transportasi darat, sulit sekali untuk menerapkan pengawasan secara ketat. Kondisi fasilitas yang kurang membuat para guru mengajar apa adanya. Sebenarnya sudah menjadi tugas pengawas memberikan saran kepada kepala sekolah dan guru-guru untuk melengkapi bahan ajar, tetapi tidak semua guru menyanggupinya, dan kami (pengawas) tidak bisa memaksakan kepada mereka untuk melengkapinya.

Salah satu tugas pengawas yang penting adalah bagaimana membantu para guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas (proses belajar mengajar).

Kegiatan belajar mengajar sebagai unsur utama dalam rangka mencerdaskan anak didik. Keberhasilan meningkatkan mutu pendidikan menjadi agenda utama bagi para guru dalam kaitannya pada aktivitas di kelas, karena guru merupakan pihak yang langsung dalam interaksi pembelajaran. Faktor penentu atas keberhasilan dalam meningkatkan ditentukan proses belajar mengajar di kelas dan kelengkapan fasilitas pembelajaran. Bagaimana guru mengajar lebih efektif jika proses belajar mengajar tanpa persiapan yang matang ?.

Kegiatan kunjungan kelas sebagai salah satu teknik untuk mengamati kegiatan pembelajaran secara langsung dan bermanfaat untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang hal berkaitan dengan profesional guru dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam mengajar. Adapun kegiatan supervisi kelas terdiri dari; kesesuaian kurikulum/silabus dengan bahan ajar/materi, pemilihan dan penggunaan metode mengajar guru, pemilihan media pembelajaran atau alat peraga yang digunakan, dan kelengkapan administrasi kegiatan belajar mengajar guru-guru.

Akuntabilitas pengawasan pengawas sekolah adalah implementasi program yang telah dibuat. Menurut program supervisi sekolah, kegiatan supervisi disesuaikan dengan jadwal program sekolah semester dan tahunan. Tanggungjawab kunjungan kelas terkait dengan pembinaan Proses Belajar Mengajar di kelas. Program supervisi merupakan dasar dari aktivitas pengawas sekolah tentang pembinaan terhadap guru-guru untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di kelas. Sistem pembagian tugas untuk tingkat sekolah dasar dibagi dalam sistem guru kelas dan guru bidang studi.

Langkah-langkah kegiatan pengawasan dan pembinaan kepengawasan dilakukan secara berjenjang. Pengawas melakukan kerjasama antara pihak pengawas dengan

kepala sekolah mengatur pembagian tugas pengawasan melalui guru senior yang menjadi pembimbing guru junior dan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan, untuk itu supervisi dilakukan terhadap guru bidang studi dan guru kelas. Fungsi kepala sekolah selain melakukan pengawasan kepada seluruh guru juga memberikan arahan dan mengatur jadwal pengawasan masing-masing guru. Selanjutnya pengawas sekolah mendapatkan informasi dan data dari guru senior dan kepala sekolah.

Kegiatan supervisi kelas untuk tahun ajaran 2007/2008, dilaksanakan Sekolah Binaan SDN No. 1 Samalantan, yang terdiri dari berbagai kelas dan mata pelajaran disesuaikan dengan jam pelajaran guru mengajar. Masing-masing guru pengasuh mata pelajaran mendapat satu kali kunjungan kelas. Demikian pula setiap kelas mendapat satu kali kegiatan supervisi. Pengawas sekolah mempunyai uraian tugas berupa format blanko pengawasan. Bentuk uraian tugas berlaku untuk semua sekolah binaan. Uraian tugas untuk tiap sekolah dirinci lagi menjadi uraian tugas persekolah dan perkelas serta tema atau materi kegiatan pada setiap kunjungan dan jadwal mengajar guru. Berikut ini hasil observasi yang dilakukan penulis di SDN No 1 Samalantan berdasarkan masalah yang ditemui di lapangan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 16.
Jadwal Kunjungan Pengawas pada SDN No 1 Samalantan Tahun 2008

No.	Bulan/ Tanggal	Kegiatan Kunjungan	Kls.	Masalah	Keterangan
1.	Januari Minggu ke 1	Mempelajari RPP mata pelajaran matematika yang dibuat guru	4	Guru tidak membuat RPP, tetapi hanya mencontoh RPP yang sudah disediakan atau dibuat di buku ajar	Tidak lengkap dan tidak diperbaharui
2	Januari minggu ke 2	Pembinaan kegiatan belajar mengajar guru	4	Guru kesulitan dalam mengajarkan mata pelajaran matematika	Sebagian besar anak belum menguasai

No.	Bulan/ Tanggal	Kegiatan Kunjungan	Kls.	Masalah	Keterangan
				tentang operasi hitung pembagian	
3.	Januari minggu ke 3	Memberikan contoh penggunaan alat peraga tentang operasi hitung	4	Guru tidak menyiapkan alat peraga ketika dalam mengajar sehingga anak sulit untuk menerima pelajaran	Alat peraga tidak disediakan
4.	Januari minggu ke 4	Memberikan PR	4	Guru tidak mempersiapkan bank soal untuk latihan	Jarang memberikan Pekerjaan rumah

Sumber : Data diolah kembali berdasarkan tupoksi program pengawas, tahun 2008.

Berdasarkan dari data jadwal kunjungan dan jadwal kegiatan kenyataannya pengawas tidak membuat uraian kegiatan tugas yang berdasarkan jadwal triwulan dan jadwal tahunan. Berhubung tidak adanya jadwal kunjungan maka kelihatannya program utama yang telah dibuat hanya sebatas pegangan dan tidak diimplementasikan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan ketika penulis menanyakan bagaimana cara pengawas mengadakan kunjungan sesuai uraian tugas, mereka hanya bertugas ke sekolah tidak ada jadwal yang pasti dan hanya sekali-kali jika dianggap perlu. Begitu juga guru-guru yang menjadi binaan pengawas kelihatan tenang-tenang saja, tidak mempersoalkan kunjungan pengawas. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru mengatakan bahwa pengawas jarang sekali mengadakan kunjungan ke sekolah, jika ada kunjungan kadang-kadang hanya bertemu dengan kepala sekolah, jarang mendiskusikan tentang kegiatan belajar mengajar di kelas.

Di antara tugas seorang pengawas sekolah adalah melakukan kunjungan kelas dan mengikuti diskusi kelompok kerja guru bidang studi (KKG). Salah seorang guru sekolah dasar mengatakan bahwa hanya sesekali saja supervisor mengadakan kunjungan ke kelas. Namun hanya melihat sekilas ketika mereka mengajar, setelah itu tidak diberi arahan bagaimana hasil observasi pengawas. Bagi para guru, pengawas kurang

memberikan perhatian kepada guru-guru tentang bagaimana proses belajar mengajar yang baik, bagaimana metode yang benar serta bahan ajar yang diperlukan. Beberapa guru mengatakan bahwa pengawas jarang sekali masuk ke kelas mereka, dan sebenarnya mereka lebih menyukai kondisi seperti ini, dan mereka bebas mengajar tanpa ada yang mengawasi.

Akuntabilitas pengawas dalam pembinaan proses belajar mengajar mengacu pada kurikulum yang baru sesuai standar nasional. Menurut Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan setiap sekolah mengembangkan suatu model kurikulum yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Model KTSP memberikan wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, keadaan sekolah dan kondisi daerah. Dengan demikian daerah atau sekolah memiliki cukup kewenangan dan menentukan hal-hal yang akan diajarkan, cara mengajar dan menilai keberhasilan pembelajaran. Kurikulum yang disusun mengacu kepada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Maksudnya adalah dalam setiap rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mempunyai standar kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik.

Proses pembelajaran yang berdasarkan kompetensi sekolah masing-masing masih terdapat kendala terutama dari kesiapan tenaga pengajar (guru-guru). Kelemahan kurikulum tersebut tergantung kreativitas guru-guru dalam mengajar. Jika guru kurang kreatif, maka standar kompetensi dasar yang berlaku di sekolah tersebut rendah, dikhawatirkan akan mempengaruhi kelulusan siswa. Kerugiannya akan menurunkan standar sekolah rendah, sehingga akan mempengaruhi citra sekolah. Untuk itu upaya peningkatan kualitas pendidikan para guru harus bekerja keras dan mempunyai

komitmen meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Apalagi untuk ukuran di Kecamatan Samalantan sebagai salah satu Kecamatan yang tergolong daerah pedesaan yang agak terkebelakang, maka sulit sekali untuk mengembangkan model KTSP.

Kegiatan atau proses belajar mengajar di kelas merupakan kegiatan yang paling utama dalam rangka mendidik dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Oleh karenanya keberhasilan pendidikan tergantung bagaimana proses pembelajaran di kelas. Guru yang aktif dan kreatif akan memberi kemudahan kepada peserta didik menyerap materi yang disampaikan alhasil guru tersebut mempunyai kompetensi sebagai guru yang profesional, seperti halnya penggunaan metode pengajaran dengan berbagai variasi, selalu menggunakan alat peraga, menguasai materi dan sebagainya.

Sebelum menyampaikan materi pelajaran yang perlu dilakukan adalah persiapan pengajaran. Hal ini sebagai suatu rangkaian kegiatan pembelajaran di kelas, karena jika tidak ada persiapan maka apa yang disampaikan kepada peserta didik akan menyimpang tidak sesuai sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di kelas yang perlu di benahi adalah bagaimana persiapan guru dalam mengajar. Persiapan tersebut meliputi kerangka acuan pengajaran yang dikenal dengan istilah Rencana Pelaksanaan Pelajaran (RPP) Persiapan tersebut meliputi tujuan pelajaran, alat dan materi pelajaran, metode dan evaluasi.

Pada kasus lain, para guru belum mendapatkan informasi tentang pembuatan satuan pelajaran sesuai dengan kurikulum yang baru. Masih banyak guru-guru yang kurang memahami model kurikulum yang bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Khususnya untuk sekolah-sekolah di Kecamatan Samalantan

belum menerapkan model satuan pelajaran KTSP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muslianus Liat, S.Pd, bahwa sebenarnya model pembelajaran KTSP belum mereka sosialisasikan untuk masing-masing sekolah, dan mereka belum bisa menerapkan hal ini disebabkan kondisi di wilayah mereka belum memungkinkan untuk diterapkan. Pada tahun ini baru tahap sosialisai, tentunya sebelumnya mereka harus mempersiapkan sarana dan fasilitas pendukung untuk pemberlakuan model KTSP, terutama berkaitan dengan kemampuan guru-guru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah mengatakan bahwa untuk penerapan model KTSP masih dalam tahap sosialisai ke sekolah-sekolah, secara simultan. Kegiatan dimulai dengan mengadakan rapat kordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang pernah mengikuti pelatihan dengan pihak diknas untuk membahasnya. Materi pembahasan mengenai standart kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan sekolah disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Pada saat ini pengawas sekolah sedang mempersiapkan kelengkapan bahan-bahan pembelajaran KTSP dan membuat jadwal sosialisasi ke sekolah-sekolah pada saat kegiatan KKG masing-masing gugus.

Sebelum pemberlakuan pembelajaran KTSP, untuk persiapan belajar mengajar di kelas, maka guru-guru diwajibkan membuat RPP mengacu pada kurikulum tahun 2004. kenyataan di lapangan ternyata RPP yang dibuat para guru hasil mengcopy RPP yang sudah ada. Beberapa sekolah yang diobservasi masih ditemui guru-guru yang tidak mempersiapkan rencana pengajaran. Hal ini sebagai suatu rangkaian kegiatan pembelajaran di kelas. Jika tidak mempersiapkan RPP, maka kegiatan belajar akan menyimpang tidak sesuai sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana

diketahui pada umumnya para guru dalam mengajar di kelas masih menggunakan model pembelajaran “gaya lama”, seperti menggunakan metode ceramah, tanya-jawab dan pemberian tugas. Penggunaan metode yang kurang bervariasi akan membuat anak bosan dan pelajaran sulit dipahami oleh murid-murid. Terkait dengan pembinaan pengawas ternyata akuntabilitas perbaikan proses belajar mengajar di sekolah binaan masih kurang optimal dengan kata lain kurang mendapat perhatian, sehingga dalam proses belajar mengajar tidak ada kreativitas guru-guru untuk memadukan metode yang variatif.

b. Akuntabilitas dan efektivitas pembinaan administrasi kelas

Akuntabilitas kegiatan pengawas selain memberikan perhatian pada proses belajar mengajar, adalah pembinaan kelengkapan administrasi kelas. Aktivitas guru di sekolah tidak hanya mengajar di kelas, tetapi bagaimana aktivitas belajar mengajar disertai dengan kelengkapan administrasi sebagai alat dokumentasi. Kelengkapan dokumentasi penting sebagai bahan untuk laporan dan pertanggungjawaban kepada pihak sekolah dan orang tua murid serta berfungsi untuk bahan evaluasi.

Kelengkapan administrasi kelas sebagai bagian dari kegiatan kepengawasan. Komponen dokumentasi kelas yang lengkap berhubungan dengan tingkat akuntabilitas pengawas dalam mengarahkan dan membina guru-guru untuk melengkapi dokumentasi kelas. Dokumentasi kelas sangat penting untuk dilengkapi, sebagai bahan laporan kepada pihak sekolah, pihak orang tua murid dan masyarakat. Demikian juga dokumentasi kelas sebagai bahan evaluasi belajar untuk perbaikan kegiatan proses belajar mengajar tahun ajaran berikutnya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa administrasi kelas yang dibuat oleh guru-guru masih belum maksimal, seperti daftar buku penilaian, buku analisis butir soal (bank soal), perangkat pelajaran, buku

agenda kelas, buku inventaris kelas dan sebagainya. Setelah penulis melakukan observasi kepada 19 sekolah yang menjadi binaan pengawas dan membuat rekapitulasi lembar observasi, ternyata sebagian besar guru-guru kurang mempunyai perhatian terhadap kelengkapan administrasi kelas. Lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17
Rekapitulasi Perangkat Pembelajaran Kelas Guru-guru SD Binaan
di Kecamatan Samalantan Januari Tahun 2008

No.	Nama Sekolah	Perangkat Pembelajaran Guru di Kelas								
		GBPP/ kurlm	Sila- bus	RPP	Ra- port	Absen- I	Daftar kelas	Buku nilai	Bank soal	Buku inven t kls
1.	SDN 1 Samalantan	v	V	V	v	V	x	x	x	x
2.	SDN 2 Samalantan	v	V	V	V	V	x	x	x	x
3.	SDN 3 Pasukayu	V	V	X	V	V	x	x	x	x
4.	SDN 4 Parompong	V	V	X	V	V	x	x	X	x
5.	SDN 5 Nyandung	V	V	X	V	V	x	x	x	x
6.	SDN 6 Aping	V	V	X	V	V	x	x	x	x
7.	SDN 7 Serukam	V	V	X	V	V	x	x	x	x
8.	SDN 8 Padang	V	V	X	V	V	x	x	x	x
9.	SDN 9 Sake	V	V	X	V	V	x	x	x	x
10.	SDN 10 Sangkinahu	V	V	X	V	V	x	x	x	x
11.	SDN 11 Polongan	V	V	X	V	V	x	x	x	x
12.	SDN 12 Kubu Kilawit	V	V	X	V	V	x	x	x	x
13.	SDN 13 Siraba	V	V	X	V	V	x	x	x	x
14.	SDN 14 Mendung Terusan	V	V	v	V	V	x	x	x	x
15.	SDN 15 Sungai Lipan	V	V	X	V	V	x	x	x	x
16.	SDN 16 Jirak	V	V	X	V	V	x	x	x	x
17.	SDN 17 Bamban	V	V	X	V	V	x	x	x	x

No.	Nama Sekolah	Perangkat Pembelajaran Guru di Kelas								
		GBPP/kurim	Sila-bus	RPP	Ra-port	Absen-I	Daftar kelas	Buku nilai	Bank soal	Buku invent kls
	Rancang									
18.	SDN 18 Malabae	V	V	X	V	v	x	x	x	x
19.	SDS Sibale	V	V	X	V	v	x	v	x	X

Sumber data: Diolah Hasil Observasi Juli, Tahun 2008.

Berdasarkan hasil observasi pada 19 sekolah dasar negeri dan swasta binaan pengawas, untuk kelengkapan administrasi kelas seharusnya disiapkan oleh guru ternyata tidak semuanya terpenuhi. Kurikulum dan silabus semua guru memiliki, namun perlu diketahui bahwa untuk kurikulum dan silabus memang sudah disediakan oleh pihak pemerintah yang disertai buku ajar, ini berarti para guru memang tidak membuatnya. Kegiatan belajar mengajar di kelas ternyata tidak disertai dokumentasi komponen pembelajaran seperti RPP, dan hanya dua sekolah saja yang mempersipkannya. Namun RPP yang dibuat menurut hasil wawancara dengan pengawas sekolah masih mengacu pada RPP lama, belum mengacu pada RPP model KTSP.

Buku nilai merupakan salah satu dokumentasi evaluasi belajar kegiatan belajar mengajar di kelas, para guru Sekolah Dasar binaan pengawas pada umumnya tidak mempunyai atau melengkapi dengan buku nilai, baik buku nilai untuk pekerjaan rumah maupun ulangan harian. Indikasinya para guru jarang memberikan pekerjaan rumah (PR) atau ulangan harian. Menurut uraian tugas model pembelajaran KTSP setiap sekolah mempunyai standar kurikulum yang berbasis sekolah sesuai kemampuan dan kondisi sekolah yang dibina. Evaluasi belajar mengajar seperti ulangan harian,

pekerjaan rumah, pra semester atau ulangan semester diberikan remedial test bagi anak didik yang tidak memenuhi standar kompetensi sekolah.. Berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa administrasi kelas yang kurang lengkap dapat diasumsikan bahwa aktivitas belajar mengajar di kelas kurang efektif dan cenderung tidak ada perencanaan sama sekali, hanya memberikan materi pelajaran sesuai dengan buku ajar.

Gambaran umum guru-guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran setiap hari dapat dikatakan masih bersifat konvensional dan monoton, datang ke sekolah hanya mengajar. Kegiatan di kelas, hanya menerangkan, mencatat, dan pemberian tugas. Dengan demikian dapat disimpulkan sementara oleh penulis bahwa pembinaan kepengawasan dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini berarti pengawas belum bisa menerapkan atau mengimplementasikan (*output*) dari program (*input*) yang telah dibuat. Ada indikasi bahwa perekrutan pengawas tidak melalui prosedur dan kompetensi yang dimiliki serta latar belakang pengalaman. Menurut hasil wawancara dengan pengawas bahwa mereka hanya satu kali mengikuti diklat pengawas.

Berdasarkan gambaran tanggungjawab pengawas mengenai pembinaan kelengkapan administrasi kelas yang belum lengkap, setelah dikonfirmasi dengan pengawas sekolah bahwa pada saat melakukan observasi di sekolah, pengawas mengisi blanko penilaian kelengkapan administrasi kelas untuk masing-masing guru. Hasilnya memang beberapa orang guru tidak melengkapinya. Hasil temuan ini dikoordinasikan kepada kepala sekolah dengan mengumpulkan gu, memberikan saran kepada guru-guru agar melengkapi admintrasi kelas. Kemudian penulis melakukan konfirmasi dengan beberapa kepala sekolah, menurut mereka bahwa pihak sekolah telah memberikan

arahan kepada guru-guru untuk melengkapi administrasi kelas, jika ada buku administrasi kelas, tidak semua buku nilai diisi oleh guru bersangkutan, misalnya pada buku nilai harian, nilai pre test dan post test dan sebagainya.

c. Akuntabilitas dan efektivitas hasil belajar anak didik

Banyak masalah yang dialami oleh guru dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa. Misalnya siswa yang lamban dalam belajar, tidak dapat memusatkan perhatian, siswa yang “nakal”, siswa yang mengalami perasaan rendah diri dan kurang dapat bergaul dengan teman-temannya. Khusus sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil, masalah yang umum dihadapi adalah keterlambatan anak datang ke sekolah, karena jarak rumah ke sekolah sangat jauh dan ditempuh hanya berjalan kaki memakan waktu satu atau dua jam. Demikian pula ketika musim panen, buah-buahan, upacara adat, terkadang anak didik tidak masuk sekolah dalam waktu yang lama. Hal ini menyulitkan bagi guru untuk menerapkan disiplin kepada murid. Guru-guru di daerah terpencil serba salah dalam menerapkan disiplin sekolah. Dalam kondisi seperti ini akan membuat murid tidak mau sekolah, jika demikian akan menghambat program pemerintah wajib belajar 9 tahun bagi anak didik, disisi lain mutu pendidikan anak rendah.

Menurut bahan diklat pengawas sekolah propinsi Kalbar oleh LPMP tahun 2004, salah satu pembinaan pengawas sekolah terhadap hasil belajar anak didik yaitu: (1) Berupa membimbing penyusunan soal atau instrumen penilaian. (2) Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar siswa dan kemampuan guru. Hasil evaluasi belajar siswa sebagai bahan evaluasi bagi guru untuk mengetahui hasil kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hasil evaluasi siswa dilakukan beberapa cara seperti

evaluasi selesai pembelajaran satuan pelajaran atau tugas di sekolah, evaluasi hasil pekerjaan rumah (PR), evaluasi ulangan harian, evaluasi hasil mid semester, ujian semester dan nilai ujian akhir murid kelas 6. Selain evaluasi hasil belajar siswa, maka pengawas sekolah mengevaluasi hasil belajar mengajar di kelas, dan setiap evaluasi belajar mengajar terdapat indikator-indikator penilaian. Berdasarkan hasil observasi tentang indikator yang didapat melalui tupoksi, tentang hasil belajar siswa dan kegiatan belajar mengajar guru-guru dapat di lihat pada tabel 4.18 berikut.

Tabel 4.18
Instrumen Evaluasi Hasil Belajar Murid di Kecamatan Samalantan
Tahun ajaran 2008

No.	Kegiatan/Triwulan/Tahunan	Nama Pengawas	
		Muslianus S.Pd	Liat, Alexander, S.Pd
1.	Membimbing guru-guru dalam memberikan dasar-dasar evaluasi belajar	Memberikan buku instrumen evaluasi kepada pihak sekolah	Memberikan buku instrumen evaluasi kepada pihak sekolah
2.	Membimbing penyusunan soal/instrumen penilaian	Diserahkan kepada guru kelas dan guru bidang studi	Diserahkan kepada guru kelas dan guru bidang studi
3.	Membahas masalah dari hasil evaluasi mata pelajaran yang mendapat nilai rendah.	Dilaksanakan pada saat supervisi sekolah melalui rapat dewan guru	Dilaksanakan pada saat supervisi sekolah melalui rapat dewan guru
4.	Melaksanakan penilaian dan menganalisis data evaluasi belajar murid	Memeriksa buku evaluasi	Memeriksa buku evaluasi
5.	Membuat laporan hasil evaluasi murid masing-masing sekolah binaan	Memeriksa hasil laporan kepala sekolah	Memeriksa hasil laporan kepala sekolah

Sumber data: Diolah Hasil Observasi, tahun 2008.

Berdasarkan program pengawas pada *point* 4 tentang menganalisis hasil belajar/bimbingan siswa dan guru serta sumber daya pendidikan, jika dirinci kembali menjadi 5 *point* uraian tugas pada tabel di atas ternyata pengawas belum bisa menerapkan apa yang sesuai dengan rincian tugas. Menurut hasil wawancara dengan

salah seorang guru, bahwa sebelumnya pengawas sekolah memberikan buku instrumen evaluasi kepada pihak sekolah dan untuk dipelajari oleh masing-masing guru. Namun pada dasarnya mereka tidak pernah dibina dalam membuat instrumen soal atau evaluasi belajar murid, dan mengevaluasi mata pelajaran yang mendapat nilai rendah, apalagi membuat analisis hasil belajar murid.

Pada uraian tugas *point* 5 yaitu membuat laporan hasil evaluasi murid-murid secara berkala baik program triwulan dan tahunan. Secara terpisah penulis menanyakan kepada pengawas yaitu Muslianus Liat, S.Pd dan Alexander, S.Pd, menurutnya mereka tidak membuat laporan hasil evaluasi, mereka mengobservasi hasil belajar siswa melalui kepala sekolah melalui laporan bulanan. Pengawas sekolah melakukan supervisi hasil laporan masing-masing sekolah dan mendapatkan data dari kepala sekolah dan Diknas kabupaten. Sebelumnya digambarkan nilai ujian akhir sekolah dasar di Kecamatan Samalantan seperti tertera pada tabel 4.19 berikut.

Tabel 4.19
Nilai Ujian Akhir Sekolah Dasar Se Kecamatan Samalantan
Tahun ajaran 2006/2007

No	Nama Sekolah	Mata Pelajaran							JML	Peringkat
		Agun	PPKn	PIN	MTK	IPA	IPS	PJAS		
1	SDN 1 Samalantan	7,00	8,08	7,38	4,94	7,38	6,12	8,80	47,70	II
2	SDN 02 Samalantan	5,96	7,64	6,92	5,33	6,31	6,07	6,97	45,20	V
3	SDN 03 Pasukayu	6,85	7,47	6,76	4,49	6,57	4,76	7,56	44,46	X
4	SDN 04 Parompong	6,38	7,88	7,17	5,08	6,33	4,82	7,28	44,94	VI
5	SDN 05 Nyandung	6,15	6,41	5,36	3,98	5,64	5,01	6,55	39,11	XVI
6	SDN 06 Aping	6,19	6,82	5,98	4,36	6,15	4,32	6,13	39,95	XIV
7	SDN 07 Serukam	6,20	6,72	5,49	4,67	5,58	4,86	6,44	39,96	XV
8	SDN 08 Padang	5,65	6,76	5,29	4,79	5,53	4,10	5,75	37,87	XVII
9	SDN 09 Sake	6,37	6,64	6,45	5,44	6,98	5,20	6,40	43,48	IX
10	SDN 10 Sangkinahu	6,71	7,73	6,75	4,99	6,48	5,60	6,94	45,20	IV
11	SDN 11 Polongan	6,35	6,66	6,40	6,49	5,70	5,48	6,41	43,49	VIII
12	SDN 12 Kubu	5,30	5,80	4,05	3,04	4,63	3,75	5,17	31,74	XVIII

No	Nama Sekolah	Mata Pelajaran							JML	Peringkat	
		Agm	PPKn	BIN	MTK	IPA	IPS	PJAS			
	Kilawit										
13	SDN 13 Siraba	6,29	7,28	6,39	4,12	6,03	5,12	6,45	41,68	XII	
14	SDN 14 Mendung Terusan	6,54	7,65	6,52	4,95	5,65	4,10	6,52	41,93	XIII	
15	SDN 15 Sei Lipan	7,35	8,04	6,61	5,06	6,64	4,89	6,88	45,47	III	
16	SDN 16 Jirak	7,65	8,60	7,94	6,48	7,48	5,99	7,63	51,77	I	
17	SDN 17 Bamban Rancang	7,22	7,07	6,42	4,65	7,13	4,88	6,13	43,50	VII	
18	SDN 18 Malabae	Belum ada kelas VI (enam)									
19	SD Subsidi Sibale	5,82	7,81	7,28	4,71	6,26	5,00	7,09	43,97	XI	
	Jumlah	115,39	131,06	115,16	83,21	112,47	85,21	121,10	731,42		
	Rata-rata	6,44	7,28	6,40	4,62	6,25	4,73	6,73	40,63		

Data: UPT Dinas Pendidikan Kec. Samalantan, Tahun 2008

Nilai rata-rata ujian akhir murid yang tertera pada tabel 4.19 di atas mengindikasikan bahwa standar nilai dimiliki sekolah-sekolah binaan rata-rata berkisar 4,5 dari data yang telah diungkap, menunjukkan bahwa nilai kelulusan murid masih di bawah standart, namun perlu diperhatikan pada umumnya sekolah-sekolah memberikan nilai yang sudah dikontrol, dari ulasan tersebut dapat dibuat kesimpulan sementara bahwa hasil ujian akhir siswa mencerminkan bagaimana proses belajar mengajar belum menunjukkan kualitas murid seperti yang diharapkan.

Mengenai hasil belajar anak didik dapat tergambar dalam laporan target daya serap kurikulum dan daya serap anak didik yang disampaikan oleh sekolah pada setiap akhir tahun pembelajaran. Program evaluasi belajar murid secara berkala yang menjadi kewajiban guru-guru adalah membuat laporan dalam buku raport kenaikan kelas setiap akhir tahun ajaran. Dalam kesempatan ini penulis kesulitan mencari data daya serap

(nilai rata-rata) murid-murid kelas satu sampai kelas 5 di sekolah binaan yang berjumlah 19 sekolah, penulis hanya mendapatkan data nilai akhir ujian murid kelas 6 (enam).

Kegiatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang efektif. Tidak lanjut kegiatan supervisi yakni adanya umpan balik dari guru-guru. Tindak lanjut dapat dilakukan diskusi dengan pihak sekolah. Diskusi kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama guru-guru untuk memecahkan berbagai masalah di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN No. 1 Samalantan, bahwa untuk mengatasi hasil evaluasi belajar/nilai yang kurang memuaskan. Langkah yang dilakukan oleh pengawas sekolah mengatasi nilai yang rendah, baik nilai hasil raport maupun nilai ujian kelas 6 (enam), maka pengawas melakukan kordinasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan rapat dengan dewan guru dan membahas masalah evaluasi belajar murid yang mengalami penurunan atau di bawah standar.

Terkait dengan tanggungjawab pengawas sekolah melaksanakan kegiatan kunjungan terhadap guru-guru, maka penulis menemukan beberapa kelemahan yang terjadi di sekolah binaan. Pengawas sekolah melakukan kunjungan hanya 2 (dua) kali dalam satu tahun ajaran. Hal ini berarti bahwa pembinaan pengawas selama ini kurang optimal, seperti yang ditemui di lapangan pada umumnya guru kurang mempunyai kesiapan dalam mengajar dan pada umumnya administrasi kelas tidak lengkap.

d. Akuntabilitas pembinaan peningkatan profesi guru

Pada prinsipnya supervisi adalah suatu usaha membantu guru untuk pengembangan professional yaitu untuk meningkatkan kinerja guru, dan praktek

pembelajaran di sekolah melalui kerjasama antar guru dan pengawas. Salah satu kegiatan supervisi adalah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan guru terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan. Setiap guru mempunyai kemampuan untuk meningkatkan komptensinya dalam mengajar melalui berbagai cara. Disisi lain pengawas dituntut untuk mampu memfasilitasi kebutuhan pengembangan profesi guru dalam melakukan perubahan dalam dirinya ke arah peningkatan kualitas kerja guru.

Keberhasilan pengawas melakukan pembinaan kepada guru-guru dapat dilihat dari indikator keberhasilan guru dalam mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan waktu dalam proses pembelajaran. Anak didik akan berhasil dalam belajar jika para guru memiliki kompetensi dan kualitas dalam pembelajaran. Hal ini dapat di lihat dari setiap pembelajaran yang dilakukan oleh guru, maka hasil belajar yang diperoleh akan berhasil dengan nilai yang baik, terjadi perubahan perilaku anak didik.

Salah satu bentuk pembinaan terhadap guru-guru adalah kegiatan kunjungan kelas. Kegiatan tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu, bertujuan untuk mengamati seorang guru yang sedang mengajar, apakah sudah memenuhi syarat-syarat metode mengajar. Kenyataannya kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah binaan di kecamatan Samalantan jarang sekali mengadakan kunjungan ke kelas. Pada saat tertentu ketika pengawas melakukan kunjungan ke sekolah hanya bertemu dengan kepala sekolah atau salah seorang guru, atau apabila ada masalah yang perlu diselesaikan. Menurut salah seorang pengawas Alexander, S.Pd, bahwa mereka mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan kepada guru-guru, karena selain tugas mereka sebagai pengawas, mereka juga diberikan beban tugas lainnya, yaitu disertai tugas tambahan oleh Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Samalantan seperti

mengelola pendataan di kantor, mengurus kenaikan pangkat bagi guru-guru yang akan naik pangkat dengan sistem angka kredit point dan tugas kantor lainnya. Dari berbagai beban tugas ini mereka terkadang sulit untuk membagi waktu antara tugas kepengawasan dengan beban tugas yang lain.

Berikut ini bentuk uraian tugas yang berdasarkan program kepengawasan pada point 5 (lima) yaitu melaksanakan pembinaan kepada guru untuk meningkatkan profesional guru-guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Permasalahan umum yang sering terjadi ketika melaksanakan pengawasan sekolah adalah pengawas sekolah sulit merubah kebiasaan aktivitas belajar mengajar di kelas yang dianggap kurang memuaskan, seperti mengenai kekurangsiapan guru mengajar, penggunaan bahan ajar dan metode mengajar yang sangat minim, jarangny menggunakan alat peraga . Tugas pengawas melakukan pembinaan mengacu pada uraian tugas kepengawasan. Lebih jelasnya tugas pengawas berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum dapat di lihat pada tabel 4.20 berikut.

Tabel 4.20
Uraian Tugas Pembinaan Guru-guru yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kurikulum di Kecamatan Samantantan Tahun ajaran 2008

No.	Kegiatan/Triwulan/ Tahunan	Nama Pengawas	
		Muslianus Liat, S.Pd	Alexander, S.Pd
1.	Menyusun Program semester atau Tahunan	Dilakukan pada kegiatan KKG	Dilakukan pada kegiatan KKG
2.	Menyusun atau membuat Program KPP	Dilakukan pada kegiatan KKG	Dilakukan pada kegiatan KKG
3.	Mengorganisasi kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas	Dilakukan pada kegiatan KKG	Dilakukan pada kegiatan KKG
4.	Melaksanakan teknik-teknik Evaluasi Pengajaran	x	x
5.	Menggunakan media dan sumber dalam proses Belajar Mengajar	Dilakukan pada kegiatan KKG	Dilakukan pada kegiatan KKG

Sumber data: Diolah Hasil Observasi, tahun 2008.

Berdasarkan pada tabel di atas pengawas yang berhubungan dengan pembinaan pengembangan kurikulum pengawas hanya melakukan pembinaan pada saat kegiatan KKG di masing-masing gugus sekolah, kegiatan tersebut berupa pengamatan kegiatan KKG, secara berkala memang telah diprogramkan. Khusus untuk pertemuan guru-guru secara umum maupun secara kelompok masing-masing di gugus sekolah khusus membahas permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan profesional guru sangat jarang dilakukan.

Upaya pembinaan profesional guru untuk pengembangan karier masa depan guru, selain membina guru-guru dalam kegiatan proses belajar mengajar adalah memberikan kepada guru untuk meningkatkan kualitas dan jenjang kepangkatan serta jenjang jabatan struktural. Selayaknya para guru senantiasa mengembangkan diri, dan mempunyai minat untuk bisa meningkatkan kualitas diri mereka. Peran pengawas dan kepala sekolah adalah memberikan motivasi kepada guru sangat diharapkan. Di setiap sekolah sudah mempunyai data base latar belakang guru-guru baik latar belakang pendidikan dan kepangkatan. Guru-guru yang mempunyai potensi untuk berkembang lebih diarahkan untuk mengembangkan diri.

Kualitas SDM murid sangat tergantung kualitas SDM guru itu sendiri, karena kualitas SDM guru-guru akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Ada korelasi antara guru yang bermutu dengan anak bermutu. Berkenaan dengan undang-undang guru dan dosen yang mewajibkan guru-guru sekolah dasar minimal strata 1, mau tidak mau mengharuskan guru-guru melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai amanah undang-undang sekaligus dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar. Tanggungjawab pengawas terkait pengembangan karier adalah memberikan informasi, bimbingan tugas

pokok guru, dan memberikan bimbingan atau kesempatan peningkatan kualitas pribadi guru berupa seminar-seminar, diklat-diklat atau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Berdasarkan tanggungjawab tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh pengawas sekolah diantaranya:

- 1). Melakukan pembinaan terhadap guru untuk membuat Rencana pelaksanaan Pelajaran (RPP), bahan ajar dan metode mengajar yang dianggap kurang melalui kegiatan KKG. Guru senior membantu memberikan bimbingan terhadap guru-guru.
- 2). Pengawas sekolah melakukan pendataan terhadap guru yang perlu mengikuti seminar, kursus atau pelatihan sesuai program dari Diknas Kabupaten atau Diknas Propinsi seperti pelatihan pembuatan kurikulum KTSP, pembuatan bahan ajar, pengayaan guru bidang studi dan sebagainya.
- 3). Berkaitan dengan sertifikasi guru, dari 144 orang guru Sekolah di Samalantan ternyata sebagian besar latar belakang pendidikan belum sarjana sekitar 132 orang. Untuk itu pengawas sekolah melakukan pendataan guru-guru yang perlu melanjutkan pendidikan. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, persyaratan minimal menjadi guru SD adalah minimal S1 (strata 1). Berdasarkan hasil wawancara dengan Muslianus bahwa sebanyak 10 guru yang mempunyai latar belakang S1 (strata) telah melakukan sertifikasi dan diatur sesuai dengan persyaratan masa kerja dan kepangkatan. Bagi guru-guru yang belum sarjana pihak Diknas kabupaten melakukan kordinasi dengan diknas propinsi untuk memberikan kesempatan kepada guru-guru melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
- 4). Pengawas sekolah juga melakukan pendataan terhadap guru-guru yang dianggap layak untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan oleh Pengawas Sekolah di Kecamatan Samalantan

1. Faktor pendukung

Peran pengelola sekolah khususnya guru dan kepala sekolah sangat menentukan berhasil atau tidaknya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Komitmen dan kesungguhan untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai konsekuensi logis untuk bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang telah diamanahkan kepada pihak sekolah. Tinggi atau rendahnya mutu pendidikan tidak hanya ditentukan dari *output* (hasil nilai akhir) yang diterima peserta didik (murid-murid) pada saat penerimaan raport atau kelulusan, melainkan lebih ditentukan oleh proses pembelajaran atau proses belajar mengajar di sekolah.

Sebagaimana diketahui standar mutu sekolah dasar negeri pada umumnya masih di bawah standar (masih rendah), apalagi sekolah-sekolah yang berada di daerah pedesaan atau terpencil. Seperti pada saat ini dalam kurikulum yang baru belum semua sekolah menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penerapan pendidikan yang bermutu memerlukan dana yang besar dan kerja keras guru serta kepala sekolah dibarengi dengan kompetensi yang dimiliki guru. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang kepala sekolah dan pengawas sekolah, bahwa sekolah-sekolah di wilayah kecamatan Samalantan belum menerapkan sistem KTSP secara penuh, untuk saat ini masih pada tahap sosialisasi kepada sekolah-sekolah, kemungkinan tahun ajaran baru 2009, sebagian sekolah mulai menerapkan sistem KTSP.

Terkait akuntabilitas dengan pengawas sekolah dalam melaksanakan program pembinaan pada sekolah yang menjadi binaannya, sangat terbantu dengan adanya komitmen kepala sekolah dan guru-guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Kondisi sekolah-sekolah yang minim fasilitas, SDM para guru yang terbatas dan kondisi geografis yang berjauhan, pengawas sekolah dan guru-guru tetap mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, apalagi di sekolah-sekolah di pedesaan agar tidak tertinggal jauh dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Kerjasama dengan pihak sekolah merupakan faktor utama kegiatan pembinaan, terutama bagaimana pengawas sekolah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru. Peran dan komitmen kepala sekolah dan guru-guru dapat memberikan *input* dan *output* kegiatan pembinaan yang dilakukan pengawas sekolah.

Terbantunya pembinaan pengawas sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah dalam hal ini peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar, para guru terbantu dengan adanya program dana BOS dari pemerintah. Program dana BOS yang digulirkan pemerintah mulai tahun 2006 memberikan keringanan kepada pihak sekolah dalam hal pengadaan buku ajar dan biaya operasional sekolah.

a. Tanggungjawab atau komitmen kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan

Kepemimpinan merupakan sesuatu yang mempunyai pengaruh besar dan sentral dalam organisasi, oleh karena itu seorang pemimpin dituntut dapat mengarahkan bawahannya agar bekerja lebih efektif, tidak hanya bekerja apa yang ada dalam perspektif kerja sesuai dengan imbalannya, tetapi diharapkan mampu bekerja melebihi

apa yang seharusnya dilakukan. Seni memimpin yang baik, adalah bagaimana seorang pemimpin mempunyai teknik atau cara mempengaruhi orang lain, dan orang tersebut tidak merasa ia diperintah, tetapi dengan sukarela melakukan pekerjaan memang karena tanggungjawabnya. Tanggungjawab (akuntabilitas) merupakan syarat utama dalam kepemimpinan. Tanpa memiliki tanggungjawab, orang tidak bisa menjadi pemimpin. Demikian pula kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan di lingkungan sekolah yang menjadi tanggungjawabnya. Tugas kepala sekolah selaku pemimpin adalah membantu para guru mengembangkan kesanggupan mereka secara maksimal dan menciptakan suasana hidup sekolah yang sehat dalam suasana yang kondusif.

Salah satu tugas utama kepala sekolah adalah membuat atau menyusun perencanaan, tanpa perencanaan (*planning*), pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan. Kegiatan utama proses pendidikan di sekolah adalah proses belajar mengajar di kelas. Oleh karenanya fungsi utama kepala sekolah adalah dalam menyusun rencana program pengajaran. Program pengajaran meliputi pembagian tugas guru-guru dalam mengajar, jadwal mengajar, pengadaan buku-buku ajar, alat-alat pelajaran, alat peraga, pengadaan dan pengembangan laboratorium sekolah, perpustakaan, kegiatan kurikuler dan sebagainya. Demi melancarkan program sekolah maka dalam membuat program pengajaran para guru dan pegawai sekolah mutlak dilibatkan, hal ini akan memberikan tanggungjawab yang besar kepada guru-guru untuk melaksanakan tugasnya.

Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor. Kepala sekolah merupakan orang yang bertanggungjawab penuh akan keberhasilan sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pendidikan. Sementara itu guru-guru dan para

pegawai lainya merupakan faktor yang juga turut menunjang keberhasilan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan program yang telah direncanakan bersama, apakah program tersebut berjalan lancar maka kepala sekolah juga bertindak sebagai supervisor, disamping adanya supervisor sekolah. Adanya kerjasama antara kepala sekolah dan pengawas sekolah akan mempermudah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan guru-guru khususnya pada kegiatan proses belajar mengajar. Konteks kajian ini adalah bagaimana komitmen Kepala Sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin sekaligus sebagai *supervisor* bisa mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan kepada para guru dan pegawai/staf serta kerjasama dengan pengawas sekolah dalam melakukan pembinaan. Adanya pengkoordinasian yang baik memungkinkan semua guru dapat bekerjasama dan saling membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan proses belajar mengajar di sekolah.

Realita kondisi sekolah di Kecamatan Samalantan, seperti fasilitas pengajaran yang menunjang program pendidikan seperti pengadaan buku ajar, alat-alat peraga dan fasilitas lainnya pada umumnya masih dalam kategori belum lengkap, demikian pula letak geografis beberapa sekolah yang jauh dengan tempat tinggal murid, kondisi sekolah yang rusak, kekurangan guru, dan tingkat kesejahteraan guru yang belum memadai. Kondisi seperti ini terkadang membuat kesulitan bagi guru yang hendak memberikan pengajaran yang terbaik. Namun demikian pada umumnya kepala sekolah tetap mempunyai tanggungjawab terhadap proses belajar di sekolah walaupun dalam kondisi yang memprihatinkan. Komitmen ini sebagai salah satu faktor pendukung adanya koordinasi antara kepala sekolah dengan pengawas untuk melaksanakan program pengajaran di sekolah.

Pada umumnya kepala sekolah mendukung program kepengawasan oleh Pengawas Sekolah karena hal ini sebagai bagian dari mekanisme program kegiatan pendidikan di sekolah. Adanya mekanisme kerjasama antara kepala sekolah dengan pengawas sekolah untuk melakukan supervisi dan pembinaan di sekolah, memberikan kemudahan dan kelancaran tugas pengawas sekolah dalam menjalankan tugasnya. Menurut salah seorang kepala sekolah pada sekolah binaan pengawas sekolah, bahwa pada prinsipnya kepala sekolah sering melakukan pembinaan kepada guru-guru dan melakukan koordinasi dengan pengawas sekolah, untuk membicarakan atau menyelesaikan persoalan. Demikian pula kepala sekolah senantiasa melakukan koordinasi dan saling bertukar informasi dengan kepala sekolah lainnya. Tak kalah pentingnya melakukan koordinasi dengan atasan langsung yaitu Dinas Kabupaten dan Kecamatan.

Konteks kajian ini adalah bagaimana kepala sekolah melakukan koordinasi dengan guru-guru sebagai bagian dari supervisi. Kegiatan supervisi internal dapat dilakukan melalui diskusi atau rapat dewan guru, atau diskusi antar kepala sekolah dengan salah seorang guru secara pribadi, maupun secara kelompok. Kontek diskusi disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi, dari hasil wawancara dengan beberapa kepala sekolah dalam melakukan pembinaan kepada guru-guru, dapat dirangkum langkah-langkah yang dilakukan kepala sekolah yang dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut.

Tabel 4.21
Koordinasi antara Kepala Sekolah dengan Guru-guru
di Kecamatan Samalantan Tahun 2008

No.	Kegiatan	Kerjasama Dengan dewan guru	Keterangan
1.	Mendiskusikan dan memberikan tugas kepada guru sesuai dengan latar belakang pendidikan dan minat guru di sekolah berupa guru kelas atau guru bidang studi.	Sebelum melakukan kegiatan PBM di awal tahun mengadakan rapat sekolah dengan para guru menentukan pembagian tugas guru, jadwal dan wali kelas.	Pengawas sekolah hanya diberi konfirmasi dari kepala sekolah.
2.	Memberikan motivasi kepada guru-guru dalam melaksanakan tugas walaupun dalam kondisi fasilitas dan sarana yang terbatas.	Guru-guru berusaha semampunya untuk melaksanakan tugas.	Tidak semua guru mempunyai motivasi untuk memperbaiki kekurangan dalam menjalankan tugas, seperti melengkapi administrasi kelas kegiatan belajar yang monoton.
3.	Memberikan kesempatan kepada guru untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi atau mengikuti penataran atau diklat yang diadakan diknas kabupaten atau propinsi.	Guru-guru mengikuti seminar atau diklat sesuai dengan latar belakang bidang studi.	Tidak semua guru bisa mengikuti seminar atau diklat karena adanya kuota yang terbatas. Demikian pula meneruskan pendidikan, adanya kendala keterbatasan dana bagi para guru.
4.	Kepala sekolah berusaha melengkapi fasilitas belajar murid seperti pengadaan buku ajar, alat peraga, dan perlengkapan administrasi kelas dan fasilitas lainnya.	Kepala sekolah bersama guru mempersiapkan fasilitas belajar dan mengusahakan sebisa mungkin seperti alat peraga yang bisa didapat dari lingkungan sekitar.	Tidak semua fasilitas pembelajaran bisa terpenuhi karena dana yang terbatas.
5.	Memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada guru-guru untuk mengurus kepangkatan bahkan mengurusnya sampai ke tingkat propinsi. Kepala sekolah memberikan rekomendasi khusus bagi guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi guru.	Guru-guru berdiskusi dengan kepala sekolah dalam melengkapi dan mengurusnya hingga tuntas.	Masing-masing guru yang sudah waktunya naik pangkat melengkapi persyaratan administrasi.

No.	Kegiatan	Kerjasama Dengan dewan guru	Keterangan
6.	Memberikan perhatian dan penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi guru-guru yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas, persoalan dengan murid-murid bahkan persoalan pribadi.	Bersama guru-guru yang memerlukan bantuan mendiskusikan dan mencari jalan keluar.	Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan segera.
7.	Mengadakan rapat sekolah sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan sekolah serta evaluasi dari kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan pada akhir tahun ajaran.	Bersama guru-guru mendiskusikan rapat akhir tahun ajaran dan mengevaluasi hasil kegiatan selama setahun.	Belum semua rencana yang telah disusun bisa terrealisir.

Sumber: Data diolah hasil observasi dan wawancara, Tahun 2008.

Berdasarkan tabel di atas secara garis besar kepala sekolah dan guru telah menjalankan program pengajaran di sekolah. Adanya pengelolaan belajar mengajar, mekanisme pembagian tugas mengajar dan pengelolaan administrasi kelas dan kegiatan rapat di sekolah sebagai bagian program pendidikan di sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin telah mendelegasikan tugas kepada guru dengan tanggungjawab yang diamanahkan senantiasa melakukan koordinasi dengan para guru. Pengaruh positif kepala sekolah yang bisa bekerjasama dengan para guru akan tercipta suasana sekolah yang kondusif, sehingga para guru dalam menjalankan tugasnya merasa tanpa beban. Kedepannya tugas pendidik semakin berat sehubungan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Untuk itu komitmen para pengelola sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan lebih ditingkatkan demi menjawab dan menghadapi tantangan jaman.

b. Komitmen guru-guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik

Sekolah adalah salah satu lembaga yang bertanggungjawab terhadap pembentukan karakter anak didik, karena di sini peran guru sangat dominan. Seorang guru bertugas membimbing dan mendidik peserta didik menjadi generasi yang berkualitas dan bermoral. Guru diharapkan mengamati perkembangan setiap saat dan membantu setiap kegiatan pembelajaran di kelas seefektif mungkin agar dapat menyerap dan memahami materi yang disampaikan. Ia harus mampu menciptakan proses belajar yang kondusif sehingga dapat merangsang murid untuk belajar secara aktif dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Profesionalisme dan tanggungjawab terhadap profesi merupakan tanggungjawab moral yang dimiliki seorang guru.

Peran guru sebagai pendidik generasi masa depan mempunyai tugas yang berat, sebagai pendidik guru berjasa memerangi kebodohan anak bangsa. Apalagi tugas para guru untuk menuntaskan program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun. Tanggungjawab dan pengorbanan guru di daerah pedesaan amat besar, dengan fasilitas pendidikan yang sederhana dan terbatas, sekolah yang rusak berat namun bagaimana mereka bisa mengajar dan yang terpenting agar tidak putus sekolah di tengah jalan.

Komitmen para guru dengan kondisi yang memprihatinkan sebagai pengabdian tanpa pamrih. Bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kecamatan terpencil memerlukan perjuangan yang lebih besar pula. Alat transportasi yang kurang dan jalan yang rusak berat menyulitkan bagi guru untuk menjalankan tugas. Harga bahan makanan dan bahan bakar minyak lebih mahal dibandingkan harga di kota, kadang bahan-bahan tersebut sulit di dapat. Terkadang gaji terlambat, kenaikan pangkat yang

sulit, dan mereka ketinggalan informasi. Jerih payahnya selama ini tidak sesuai dengan tingkat kesejahteraan yang didapat. Gaji guru masih di bawah standar pemenuhan kebutuhan hidup, dengan kata lain nasib para guru amat memprihatinkan.

Indikasi kondisi guru-guru yang berada di daerah pedesaan seperti yang diutarakan oleh salah seorang guru di sekolah terpencil yaitu di SDN 10 Sangkinahu dan SDN 12 Kubu Kilawit, dengan jarak sekitar 10 km. Untuk menempuh ke sekolah, kondisi jalan rusak berat, kondisi sekolah rusak dan kekurangan guru, sehingga ada guru yang merangkap tugasnya mengajar dua kelas. Merupakan pengorbanan yang amat besar, bisa jadi dapat dikatakan sebagai suatu panggilan jiwa, namun hal ini merupakan suatu tanggungjawab dan komitmen guru untuk tetap menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian (tanpa pamrih).

c. Program dana BOS di sekolah dasar kecamatan Samalantan

Program dana BOS memberikan manfaat yang besar terhadap kelancaran kegiatan pendidikan di sekolah, khususnya di sekolah dasar. Dengan adanya bantuan dana BOS sekolah merasa terbantu khususnya untuk pengadaan material (pengadaan buku ajar dan alat peraga) dan biaya operasional sekolah. Tidak terkecuali sekolah-sekolah dasar di Kecamatan Samalantan telah mendapatkan program dana BOS, sehingga dapat membantu kelancaran proses belajar mengajar di sekolah khususnya pengadaan buku-buku ajar dan pengadaan alat peraga dan dana operasional sekolah.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tidak terlepas dari upaya material dan non material. Upaya peningkatan material berupa pengadaan sarana dan prasarana serta biaya operasional sekolah agar kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan lancar. Selama ini sebelum adanya program BOS maka segala sesuatu yang

berhubungan dengan pengadaan material sebagian dibebankan kepada orang tua murid melalui komite sekolah berupa iuran sekolah. Namun demikian penarikan iuran sekolah harus disesuaikan dengan kemampuan orang tua murid, sehingga setiap sekolah memungut iuran sekolah masing-masing dengan besaran yang berbeda. Pada umumnya murid yang berasal dari sekolah dasar negeri berlatarbelakang orang tua ekonomi lemah, sehingga pihak sekolah tidak bisa menarik iuran lebih besar, dengan demikian dana yang dikelola tidak bisa mencukupi untuk biaya operasional sekolah.

Adapun tujuan program BOS adalah untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Bantuan operasional sekolah merupakan bantuan pemerintah pusat kepada seluruh siswa SD/MI dan SLTP/MTs se Indonesia baik negeri maupun swasta. Bantuan diberikan kepada siswa melalui sekolah langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing. Besar bantuan sejumlah Rp 235.000,- per siswa/tahun bagi siswa tingkat sekolah dasar/ sederajat, dan Rp324.500,- per siswa/tahun bagi siswa tingkat sekolah menengah pertama/ sederajat. Dari biaya tersebut maka hanya mampu membiayai sekitar 30 persen dari keseluruhan. Bantuan tersebut diharapkan paling tidak dapat mengurangi biaya pendidikan yang selama ini dibebankan kepada orang tua atau masyarakat. Terlebih masyarakat tergolong kurang mampu mendapat layanan pendidikan sesuai standar kualitas pendidikan.

Program pemerintah memberikan bantuan dana melalui Program BOS setidaknya sangat membantu kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Menurut salah seorang kepala sekolah di Kecamatan Samalantan hasil wawancara

mengatakan bahwa program dana BOS memberikan manfaat yang amat besar kepada murid yang kurang mampu, selama ini kami kesulitan untuk mewajibkan kepada murid untuk membeli buku ajar, dengan adanya program BOS para murid telah memiliki buku ajar sehingga kegiatan belajar di kelas menjadi lancar. Demikian pula pada umumnya di Kecamatan Samalantan pihak sekolah tidak memungut biaya (iuran) sekolah bagi murid.

Masyarakat kurang mampu pada umumnya menyekolahkan anak-anaknya pada tingkat sekolah dasar pada sekolah-sekolah negeri milik pemerintah. Operasional sekolah negeri sebagian besar dibiayai oleh pemerintah, sehingga biaya pendidikan relatif lebih murah. Tujuannya untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, apalagi ditambah program pemerintah tentang wajib belajar, sehingga pemerintah berkepentingan memberikan pelayanan dan kesempatan bagi murid (peserta didik) di usia wajib belajar. Dengan diberikannya dana BOS kepada sekolah dasar, maka biaya pendidikan tingkat sekolah dasar menjadi ringan, sehingga kesempatan menempuh pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu terbuka lebar. Pada umumnya faktor utama drop outnya peserta didik berasal dari ketidak mampuan orang tua untuk membiayai pendidikan.

2. Faktor penghambat

Di samping faktor pendukung dengan adanya komitmen dari kepala sekolah dan guru sehingga dapat terbantunya tugas pembinaan pengawas sekolah, juga terdapat faktor penghambat yang dapat menghambat kinerja pengawas sekolah, berupa sumber daya manusia guru dan minimnya sarana dan prasarana sekolah termasuk juga kondisi

geografis lokasi sekolah yang berjauhan. Dalam menyikapi faktor penghambat ketika melakukan pembinaan kepada guru, pengawas sekolah bersikap persuasif, karena kondisi dan situasi yang kurang mendukung terlaksananya program kepengawasan yang telah dibuat.

a. Keadaan sumber daya manusia (SDM) guru

Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat, memberikan implikasi pada guru untuk menyesuaikan diri dengan meningkatkan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Persyaratan ideal seorang pegawai atau guru dituntut minimal latar belakang pendidikan Strata 1 (S1). Berbagai pendapat menyebutkan bahwa pendidikan seseorang mempengaruhi pola pikir dan pola sikap seseorang. Jika latar belakang pendidikan seorang guru memadai (tinggi), maka guru atau pegawai tersebut mempunyai wawasan luas, lebih rasional, dan lebih terbuka. Lebih baik lagi jika latar belakang pendidikan diperkaya dengan pelatihan-pelatihan/kursus atau seminar-seminar sehingga pengalaman menjadi bertambah dan wawasan berfikir menjadi luas.

Guru sebagai pencetak generasi penerus, berimplikasi terhadap kualitas peserta didik, karena itu kualitas peserta didik tergantung pula pada tingkat kualitas guru. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) terutama para guru merupakan hal yang sangat penting, karena guru mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), sedangkan Iptek senantiasa berkembang, dengan demikian para guru mau tidak mau harus selalu meningkatkan wawasannya. Peningkatan kualitas para guru bisa melalui pendidikan formal atau non formal. Dalam hal ini pendidikan non formal melalui lembaga diklat di lingkungan dinas pendidikan perannya perlu senantiasa dioptimalkan. Sedangkan pendidikan formal melalui pendidikan di perguruan tinggi.

Kualitas SDM yang diberlakukan pada guru di sekolah dasar terkait dengan latar belakang pendidikan. Jika dahulu di era tahun 1980-1990-an, standar pendidikan seorang guru SD minimal tamatan tingkat SLTA. Sebagai konsekuensi perkembangan iptek, standar pendidikan guru saat ini minimal S1 (sarjana). Hal ini memberikan konsekuensi pada guru untuk mengejar ketertinggalan pendidikannya agar melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jika di lihat dari rata-rata pendidikan guru sekolah dasar masih setingkat SLTA dan D2 seperti ditunjukkan pada tabel 4.22 berikut.

Tabel 4.22
Latar Belakang Pendidikan Guru-guru di Kecamatan Samalantan,
Tahun 2008

No	Nama Sekolah	Tingkat Pendidikan											JLH GURU		JLH	KET		
		SMA			D2			D3			S1/D4		PNS	NON PNS				
		PNS	NON PNS	JLH	PNS	NON PNS	JLH	PNS	NON PNS	JLH	PNS	NON PNS					JLH	
1	TK RSU BETHESDA SERUKAM	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
2	SDN 01 Samalantan	3	1	4	6	1	7	-	1	1	1	1	1	1	10	3	13	
3	SDN 02 Samalantan	5	1	6	2	-	2	-	-	-	3	1	4	10	2	12		
4	SDN 03 Pasukayu	6	1	7	6	-	6	-	-	-	-	-	-	12	1	13		
5	SDN 04 Parompong	2	2	4	6	-	6	-	-	-	1	1	2	9	2	11		
6	SDN 05 Nyandung	6	3	9	5	-	5	-	-	-	-	-	-	11	3	14		
7	SDN 06 Aping	5	3	8	4	-	4	1	-	1	-	-	-	10	3	13		
8	SDN 07 Serukam	5	2	7	6	1	7	1	-	1	-	-	-	12	3	15		
9	SDN 08 Padang	4	2	6	3	-	3	-	-	-	-	-	-	7	2	9		
10	SDN 09 Sake	1	2	3	3	-	3	-	-	-	1	1	2	4	3	7		
11	SDN 10 Sangkinahu	2	4	6	1	-	1	-	-	-	1	-	1	4	4	8		
12	SDN 11 Polongan	2	1	3	5	-	5	-	-	-	1	1	2	7	2	9		
13	SDN 12 Kubu Kilawit	5	3	8	2	-	2	-	-	-	-	-	-	7	3	10		
14	SDN 13 Siraba	1	1	2	3	-	3	1	1	2	-	-	-	5	2	7		
15	SDN 14 Mendung Terusan	2	1	3	4	-	4	1	-	1	1	-	1	8	2	10		
16	SDN 15 Sei Lipan	2	2	4	2	-	2	-	-	-	1	-	1	5	2	7		
17	SDN 16 Jirak	2	1	3	4	2	6	-	-	-	2	-	2	8	3	11		
18	SDN 17 Bamban Rancang	2	3	5	1	-	1	-	1	1	1	-	1	4	4	8		
19	SDN 18 Malabae	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	4		
20	SDS Sibale	3	2	5	4	-	4	-	-	-	-	2	2	7	4	11		
JUMLAH		59	39	98	68	5	73	4	3	7	11	5	16	142	52	194		

Data: UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Samalantan, Tahun 2007

Faktor utama kualitas pendidikan dapat di lihat dari potensi latar belakang pendidikan guru. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005,

Bab IV pasal 8 dan pasal 9. Pada pasal 8 UU No. 14, berbunyi:

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya pasal 9, berbunyi: kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Setelah terbitnya peraturan tersebut maka latar belakang pendidikan para guru di sekolah dasar minimal tamatan S1 atau Diploma 4.

Persyaratan latar belakang pendidikan sudah menjadi ketentuan undang-undang guru dan dosen. Untuk lebih jelasnya jumlah guru jika dipersentasikan dapat dilihat dari tabel 4.23 berikut ini.

Tabel 4.23.
Porsentase Latar Belakang Pendidikan Guru
di Kecamatan Samalantan tahun 2008

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase(%)	Ket.
1	S1/D4	16	9,2	
2	D3	7	0,4	
3	D2	73	39	
4	SLTA	98	51,4	
Jumlah		194	100	

Sumber data: Diolah Hasil Observasi, tahun 2008.

Tabel 4.23 menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan guru di Kecamatan Samalantan yang memenuhi persyaratan undang-undang guru dan dosen berjumlah 16 orang atau sekitar 9,2%, sisanya belum memenuhi persyaratan, yaitu sekitar 178 orang atau sekitar 91,8%. Dengan demikian bagi guru latar belakang pendidikan yang belum memenuhi persyaratan diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah bahwa guru di daerah terpencil khusus di Kecamatan Samalantan berlatarbelakang pendidikan rata-rata tamatan SLTA/ sederajat.

Berdasarkan data latar belakang pendidikan dewan guru, pada umumnya tamatan SLTA/ sederajat, untuk memenuhi persyaratan mau tidak mau guru-guru yang belum memenuhi standar pendidikan S1 harus meneruskan pendidikan di perguruan tinggi. Latar belakang pendidikan dewan guru terlihat bahwa dari 144 guru PNS, yang berlatar pendidikan S1 ada 11 orang, D2 = 68 orang, D3= 4 orang, SMA= 59 orang. Selanjutnya latar belakang pendidikan guru honorer S1= 5 orang, D3= 3 orang, D2= 5 orang, dan SLTA= 39 orang. Jika di lihat rata-rata latar belakang pendidikan guru di Kecamatan Samalantan, sebagian besar tamatan SLTA/sederajat, dengan demikian belum memenuhi persyaratan yang diisyaratkan oleh undang-undang guru dan dosen.

Pada umumnya para guru berkeinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk memenuhi standar kualifikasi guru, namun yang menjadi kendala adalah masalah biaya pendidikan dan tempat melanjutkannya cukup jauh di ibukota propinsi kota Pontianak, sementara itu masih banyak kendala yang membuat para guru mempertimbangkannya, diantaranya faktor keluarga, ekonomi dan kekurangan guru. Dari hasil wawancara dengan salah seorang guru, bahwa pada prinsipnya dewan guru mempunyai keinginan meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi apalagi menurut undang-undang yang berlaku guru diwajibkan mempunyai latar belakang pendidikan S1. Guru-guru tersebut berharap pemerintah yang ada di daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan program S1 di daerah.

Dari latar belakang pendidikan yang belum memenuhi standarisasi pendidikan S1, maka dapat menjadi faktor penghambat pembinaan yang dilakukan pengawas sekolah. Faktor pendidikan menjadi salah satu indikasi kurangnya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh guru, sehingga ketika di lihat dari hasil observasi pada

sekolah binaan untuk kegiatan proses belajar mengajar sebagian besar guru masih menggunakan pengajaran konvensional dan administrasi kelas yang kurang lengkap. Ketika dikonfirmasi kepada pengawas sekolah, dari hasil wawancara, masih banyak guru-guru yang belum berminat meneruskan pendidikan ke S1, berhubung lokasi perguruan tinggi jauh dari lokasi tempat mengajar, menyulitkan bagi guru untuk meninggalkan sekolah dan keluarga dalam melanjutkan pendidikannya di kota propinsi. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi pengawas untuk menerapkan program pembinaan kepada para guru, apalagi kondisi pengawas selain bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan, masih ditambah lagi merangkap pekerjaan lainnya di kantor, seperti membantu kepala UPT dinas pendidikan mengurus kenaikan pangkat, berkala guru, pendataan di kantor dan sewaktu-waktu mewakili kepala UPT dinas pendidikan dalam rapat di kecamatan atau kabupaten jika kepala UPT ada kegiatan pada waktu yang bersamaan.

b. Minimnya fasilitas dan sarana pendidikan

Faktor penentu atas keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan juga ditentukan atas kelengkapan sarana dan prasarana pengajaran, bagaimana mungkin guru akan mengajar lebih efektif dan hasil anak didiknya lebih baik kalau sarana pembelajaran dalam kelas tidak tersedia. Kekurangan fasilitas akan menyulitkan bagi guru untuk mengejar target kurikulum yang ditentukan. Seperangkat alat dimaksud berupa alat peraga, buku ajar, teknologi pembelajaran, dan tak kalah pentingnya adalah keterampilan guru dalam membuat kreativitas dan memberdayakan alat peraga yang ada di lingkungan sekitar.

Kondisi fasilitas dan sarana sekolah yang berada jauh dari kota pada umumnya masih sangat kekurangan. Hasil observasi penulis, dapat di terangkan di sini bahwa pada umumnya fasilitas dan sarana sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Samalantan sangat minim. Dan buku-buku yang digunakan atau yang dikirim melalui bos buku masih bernuansa kurikulum berbasis kompetensi (KBK 2004). Belum ada buku yang sesuai dengan kurikulum 2006. mereka (guru) diminta memilih dan memilah materi dari berbagai buku pelajaran dari kurikulum sebelumnya untuk disesuaikan dengan standar kompetensi yang diisyaratkan dalam kurikulum 2006. Demikian pula alat peraga dan fasilitas kelas lainnya, ada beberapa sekolah kondisi kelas (bangunan) rusak berat, kursi dan meja belajar dan lemari rusak.

Kondisi ini jauh dari jangkauan pemerintah untuk memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah yang ada di daerah pedesaan.

Tabel 4.24
Kondisi Sekolah dan Sarana Jalan di Kecamatan Samalantan
Tahun 2008

No	Nama Sekolah	Desa	Jarak dari Ibu Kota Kecamatan	Deskripsi kesulitan
1	SDN 08 Padang	Bukit Serayan	± 8 km ²	Prasarana jalan belum diaspal, tanah liat, licin, berlobang jika hujan, menanjak, menurun, curam. Gedung sekolah ruang belajar kurang hanya 3 RKB sedangkan siswa kelas 1 s/d kelas 6
2	SDN 09 Sake	Bukit Serayan	± 10 km ²	Deskripsi sama dengan di atas, hanya lebih di ujung letaknya.
3	SDN 10 Sangkinahu	Bukit Serayan	± 12 km ²	Deskripsi sama dengan di atas, letak sekolah paling ujung kecamatan Samalantan, gedung sekolah rusak berat.
4	SDN 12 Kubu Kilawit	Saba'u	± 10 km ²	Prasarana jalan sudah rusak berat, berlobang, dan berbatu-batu tajam, menanjak, menurun curam, gedung sekolah memprihatinkan, tenaga guru kurang, RKB sampai kelas 6.

No.	Nama Sekolah	Desa	Jarak dari Ibu Kota Kecamatan	Deskripsi kesulitan
5	SDN 13 Siraba	Saba'u	± 10 km ²	Prasarana jalan belum diaspal, licin jika hujan, jalan menanjak, menurun curam melewati tebing-tebing gunung, gedung sekolah baik, RKB cukup.
6	SDN 15 Sei Lipan	Samalantan	± 9 km ²	Prasarana jalan belum diaspal tetapi sudah ada pengerasan, berbatu-batu kerikil tajam, menanjak, menurun curam melewati perkebunan karet, gedung sekolah rusak berat.
7	SDN 17 Bamban Rancang	Babane	± 9 km ²	Prasarana jalan belum diaspal, licin, banjir kalau hujan, jalan berlobang, menanjak, menurun curam, jembatan seadanya, gedung sekolah tidak memadai (rusak berat).

Sumber: data diolah hasil Observasi, Oktober 2008

Tabel 4.24 tersebut menunjukkan bahwa sarana gedung sekolah dan jalan yang rusak membuat kesulitan bagi guru untuk bisa mengajar dengan efektif dan terasa nyaman, demikian pula murid tidak merasakan kenyamanan suasana belajar dengan kondisi sekolah dan fasilitas yang sangat memprihatinkan, tambahan lagi letak rumah mereka yang jauh dengan sekolah, pada umumnya mereka ke sekolah berjalan kaki, untuk menuju ke sekolah rata-rata mereka memerlukan waktu perjalanan sekitar antara 1 sampai 2 jam berjalan kaki, dan jarang terdapat fasilitas kendaraan umum.

Kalau dilihat dari segi sarana gedung sekolah lebih memprihatinkan sekali, dari 19 sekolah terdapat 10 sekolah kondisi gedungnya rusak ringan dan rusak berat memerlukan renovasi. Selanjutnya dari sarana sekolah, rusaknya WC sekolah, perumahan guru dan perumahan kepala sekolah, bahkan guru baru tidak mendapat rumah dinas, dengan guru kesulitan untuk mencari tempat tinggal di desa. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kondisi jalan yang belum beraspal, jika musim penghujan

jalannya licin dan sulit dijangkau. Kondisi ini memerlukan perjuangan yang besar bagi guru untuk menjalankan tugasnya.

Tekait dengan kegiatan pengawas sekolah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dengan kondisi fasilitas sekolah dan sarana jalan yang sangat jelek, ditambah lagi tidak ada dana transportasi dari pemerintah untuk tugas ke lokasi sekolah yang jauh, sangat menyulitkan bagi pengawas untuk melakukan kunjungan ke sekolah tersebut. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang pengawas bahwa sangat sulit untuk melakukan pembinaan kepada guru yang bertugas di sekolah terpencil (letaknya jauh dari kota kecamatan), jangankan mengajar dengan standar kurikulum yang baru, dengan kondisi fasilitas sekolah yang kurang dan sarana jalan yang jelek untuk pergi ke sekolah saja sulit dan memerlukan motivasi yang tinggi, sehingga para guru mengajar apa adanya dengan fasilitas dan sarana seadanya. Kami tidak bisa memaksakan para guru, syukur-syukur guru tersebut mau mengajar di sekolah-sekolah daerah terpencil.

c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat

Pada umumnya kehidupan masyarakat di pedesaan sebagian besar bekerja di ladang dan di kebun. kondisi ini mempengaruhi situasi sekolah dan lingkungannya. Kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas, apalagi di daerah terpencil. Dengan kondisi kekurangan, kebiasaan masyarakat di daerah pedesaan, untuk waktu tertentu anak-anak sekolah pada umumnya membantu orang tuanya bekerja di ladang, atau di kebun seperti pada musim panen, atau musim buah. Pada musim seperti ini untuk beberapa hari mereka tidak sekolah.

Di daerah pedesaan tidak terkecuali di Kecamatan Samalantan, masyarakat di sana masih melestarikan adat istiadat setempat. Pada hari-hari tertentu masyarakat

menggelar upacara adat yang berkenaan dengan hasil panen dan hari besar keagamaan. Masyarakat desa bergotong royong melaksanakan upacara adat, demikian pula anak-anak ikut merayakan upacara adat. Kegiatan ini memerlukan beberapa hari di hari sekolah (bukan hari libur), dan murid-murid sekolah meliburkan diri untuk mengikuti kegiatan di desanya. Sebagaimana di daerah pedesaan kondisi lingkungan sosial tidak bisa dipisahkan dengan masyarakatnya, bagi masyarakat yang tidak berpartisipasi kegiatan adat setempat akan dianggap sombong. Demikian pula hal ini berhubungan dengan kepercayaan masyarakat desa, jika tidak melaksanakan kegiatan adat istiadat akan mendapat sanksi adat.

Kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi guru dalam menjalankan tugas. Sebagaimana diketahui gaji guru atau pegawai negeri pada umumnya sangat minim, pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demi memenuhi kebutuhan hidup yang kurang, tidak jarang para guru bekerja di luar jam dinas seperti bertani atau berkebun. Ketika penulis melakukan observasi di lapangan, kasus-kasus yang ditemui yaitu para guru melaksanakan tugas kurang optimal, kadang mereka tidak mengajar (meliburkan diri) ketika musim panen, walaupun ke sekolah sering terlambat ke sekolah jam belajar sekolah tidak lama. Guru mengajar apa adanya menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah dan tanya jawab, jarang memberikan PR kepada murid, dan tidak menggunakan alat peraga apalagi membuatnya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian bagaimana kinerja pengawas sekolah dasar dalam melaksanakan kepengawasan di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang yang mengacu pada tupoksi program kepengawasan sesuai pasal 3 ayat 1 Kepmepan No. 118 Tahun 1996,

1. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pengawas sekolah di Kecamatan Samalantan belum optimal.
2. Faktor penghambat dan pendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pengawas sekolah di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang,
 - a. Faktor penghambat kinerja pengawas sekolah di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang, seperti: letak geografis sekolah yang sulit, fasilitas dan sarana sekolah yang memprihatinkan, sumber daya manusia guru-guru yang masih rendah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, tugas tambahan kantor UPT Dinas Pendidikan kepada pengawas karena pegawai kantor di UPT Dinas Pendidikan Samalantan pegawainya hanya 2 orang.
 - b. Faktor pendukung kinerja pengawas sekolah di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang adalah komitmen dan tanggungjawab Kepala Sekolah dan Guru dalam menjalankan tugas.

B. Saran

Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan di atas, rekomendasi yang diberikan dalam rangka terwujudnya peningkatan kinerja pengawas sekolah yaitu:

1. Program kerja pengawas sekolah hendaknya dijabarkan lagi berupa uraian tugas agar dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi di lapangan.
2. Metode pembinaan terhadap guru-guru sebaiknya ada yang bersifat persuasif.
3. Pengawas sekolah perlu membuat laporan kerja dan melakukan evaluasi, selanjutnya mencari jalan keluar untuk mengatasi hambatan-hambatan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan.
4. Pengawas sekolah hendaknya memberikan motivasi kepada guru-guru agar mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 melalui program S1 Guru dalam Jabatan.
5. Komitmen dari pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam memberikan perhatian yang lebih besar kepada dunia pendidikan baik yang berhubungan dengan SDM guru-guru, siswa dan fasilitas serta sarana dan prasarana sekolah yang kurang.

UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, P.M. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bungin, B.H.M. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Burton, W.H. & Brueckner, L.J. (1955). *Supervision and a Social Process*. New York: Appletom Century Crofts, inc.
- Chan, S.M. & Sam, T.T. (2003). *Analisis SWOT. Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danim, S. (2002). *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Depdiknas, (2004). *Standart Kompetensi Pengawas Sekolah*. Bahan Diklat Pengawas Sekolah. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Dir. Tenaga Kependidikan.
- Depdiknas, (2006). *Panduan Teknis Pembinaan Sekolah Oleh Pengawas Sekolah*. Kalimantan Barat: LPMP.
- Dwiyanto, A. (1995). *Penilaian Kerja Organisasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: PSKK-UGM.
- Isjoni. (2006). *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kismartini, dkk. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 118 Tahun 1996 tentang *Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kritisnya*.
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 0322/0/1996 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kritisnya*.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 020/U/1998 tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kritisnya*.

- LPMP Propinsi Kalimantan Barat. (2004). *Bahan Diklat Pengawas Sekolah Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak.
- Mahsum, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Moenir, H.A.S. (1995), *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Napitupulu, P. (2007). *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction. Prinsip-prinsip Dasar agar Pelayanan Publik Lebih Berorientasi pada Kepuasan dan Kepentingan Masyarakat*. Bandung: Alumi.
- Neagley, R.L. & Evans, D.N. (1970). *Hand Book for Effektive Supervision of Instrumentation*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Purwanto, M. Ng. (2005). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- Sundarso, dkk. (2006). *Tori Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tilaar, H.A.R. (1992). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Pengawas

Daftar pertanyaan ini hanya merupakan pointer pertanyaan berdasarkan topik penelitian. Perinciannya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dikembangkan di lapangan.

I. Identitas Informan:

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Jabatan :
6. Lama Bekerja :
7. Alamat :

II. Daftar Pertanyaan

A. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan oleh Pengawas Sekolah terhadap Guru-guru di Kecamatan Samalantan

1. Akuntabilitas dan efektivitas kepengawasan

a. Akuntabilitas dan efektivitas program kegiatan kepengawasan

1. Pemahaman pengawas terhadap uraian pekerjaan
2. Prosedural pekerjaan yang sesuai dengan peraturan (persyaratan)
3. Relevansi uraian tugas dan program dengan kondisi realistik

b. Akuntabilitas dan efektivitas jadwal kunjungan ke sekolah

1. Jadwal Kunjungan ke Sekolah Binaan
2. Materi Kunjungan ke Sekolah
3. Jadwal Kunjungan Kegiatan KKG

2. Akuntabilitas dan efektivitas program pembinaan

a. Akuntabilitas dan efektivitas pembinaan belajar mengajar di kelas

1. Kelengkapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2. Metode Mengajar guru
3. Kelengkapan buku ajar dan alat peraga

b. Akuntabilitas dan efektivitas pembinaan administrasi kelas

1. Kelengkapan Kurikulum
2. Kelengkapan Silabus/RPP
3. Rapor/kemajuan belajar siswa
4. Absensi kelas
5. Daftar Nilai
6. Buku dan Bank Soal
7. Buku Inventaris kelas

c. Akuntabilitas dan efektivitas hasil belajar anak didik

1. Evaluasi dan nilai ulangan harian
2. Evaluasi dan Nilai PR
3. Evaluasi dan nilai Ulangan Umum

d. Akuntabilitas pembinaan peningkatan professional guru-guru.

1. Pembinaan membuat Rencana Pelaksanaan Pelajaran (RPP), bahan ajar dan metode mengajar
2. pendataan terhadap guru yang perlu mengikuti seminar, kursus atau pelatihan
3. Melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi
4. Pendataan yang dianggap layak untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah.

B. Faktor Dukungan Dan Hambatan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan

1. Faktor pendukung

- a. Tanggungjawab atau komitmen kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
- b. Komitmen guru-guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik
- c. Program dana BOS di sekolah dasar kecamatan Samalantan

2. Faktor penghambat

- a. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Guru-guru
- b. Minimnya fasilitas dan sarana pendidikan
- c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala UPT Diknas Kecamatan Samalantan
2. Camat Samalantan

Daftar Pertanyaan ini hanya merupakan point-point pertanyaan berdasarkan tema penelitian. Perinciannya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dikembangkan di lapangan.

A. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan oleh Pengawas Sekolah terhadap Guru-guru di Kecamatan Samalantan

1. Akuntabilitas dan efektivitas kepengawasan

- a. Akuntabilitas dan efektivitas program kegiatan kepengawasan
- b. Akuntabilitas dan efektivitas jadwal kunjungan ke sekolah

2. Akuntabilitas dan efektivitas program pembinaan

- a. Akuntabilitas dan efektivitas pembinaan belajar mengajar di kelas
- b. Akuntabilitas dan efektivitas pembinaan administrasi kelas
- c. Akuntabilitas dan efektivitas hasil belajar anak didik
- d. Akuntabilitas pembinaan peningkatan profesional guru-guru

B. Faktor Dukungan dan Hambatan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan

1. Faktor pendukung

- a. Tanggungjawab atau komitmen kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
- b. Komitmen guru-guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik
- c. Program dana BOS di sekolah dasar kecamatan Samalantan

2. Faktor penghambat

- a. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) guru-guru
- b. Minimnya fasilitas dan sarana pendidikan
- c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat

PEDOMAN OBSERVASI

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Nama sekolah
2. Jumlah sekolah
3. Jumlah murid
4. Jumlah guru & pegawai TU
5. Kondisi sarana dan prasarana sekolah
6. Latar belakang pendidikan pengawas sekolah & pengelola sekolah

2. Komponen-Komponen Pendukung Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan oleh Pengawas Sekolah

1. Jadwal program
2. Program kegiatan kepengawasan
3. Pembentukan kelompok kerja guru masing-masing bidang studi

3. Realisasi Tugas dalam Melakukan Pengawasan dan Pembinaan oleh Pengawas Sekolah

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi
2. Melakukan rapat bersama KKG

UNIVERSITAS TERBUKA

HASIL WAWANCARA

1. Pertanyaan kepada Kepala Sekolah dan Ketua Gugus

- (1). Maria, A.Ma Pd : Kepala SDN No.03 Samalantan & Ketua Gugus KKG 03 Pasukayu
 (2). Hendrik Luwit, A.Ma Pd : Kepala SDN No. 07 Serukam & Ketua KKG Gugus 01 Serukam
 (3). Paulus, S.Pd : Kepala SDN No. 02 Samalantan
 (4). Daud Silalahi, S.Pd : Kepala SDN No.04 Parompong
 (5). Juhermi, S.Pd.SD : Kepala SDN No. 16 Jirak
 (6). Antonius Thein : Wakil Kepala SDN No. 06 Aping
 (7). Ropina : Wakil Kepala SDN 25 Malabae

Bentuk Pertanyaan

No.	Pertanyaan	Jawab
A.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Oleh Pengawas Sekolah Terhadap Guru-guru di Kecamatan Samalantan	
	1. Akuntabilitas dan Efektivitas Kepengawasan	
1.	Apakah Bapak mengetahui tugas dan fungsi tugas pengawas sekolah?	Saya mempunyai pedoman tupoksi dari Diknas, secara umum saya mengetahuinya
2.	Apakah Bapak mengetahui persis apakah pengawas sekolah mengetahui tugas dan fungsi sebagai pengawas sekolah?	Saya kira pengawas sekolah pasti mengetahuinya hanya saja mungkin mereka belum bisa menerapkannya sesuai tupoksi yang ada
3.	Apakah pengawas sekolah mempunyai program kepengawasan? dan apakah program tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang hendak dicapai?	Saya kira pengawas sekolah mempunyai program, tetapi mungkin program tersebut tidak dibuat sesuai tupoksi sehingga tujuan yang hendak dicapai belum tepat sasaran
4.	Apakah Pengawas sekolah mempunyai jadwal kunjungan ke sekolah Binaan	Saya kira ada, tetapi setahu saya pengawas sekolah tidak membuatnya sesuai program berdasarkan jadwal kunjungan
5.	Apakah pengawas sekolah menyusun program pengawas, tahunan dan triwulan	Saya kira ada, tetapi saya tidak pernah ditunjukkan bentuk program hanya secara lisan ketika akan melakukan kunjungan ke sekolah.
6.	Apa saja program/kegiatan pengawasan?	Setahu saya program kepengawasan ialah secara umum mengunjungi kesekolah melakukan supervisi sekolah, menilai hasil belajar siswa dan kemampuan guru mengajar dan melaksanakan pembinaan kepada guru
7.	Apakah Pengawas sekolah melakukan pembinaan terhadap Proses Belajar Mengajar di kelas	Pengawas memberikan pembinaan kegiatan belajar mengajar dibantu oleh kepala sekolah dan guru senior
8.	Apakah Pengawas sekolah pernah mengadakan kunjungan kunjungan ke sekolah binaan?	Pengawas sekolah pernah mengunjungi sekolah binaan dan melalui kegiatan KKG

No.	Pertanyaan	Jawab
A. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Oleh Pengawas Sekolah Terhadap Guru-guru di Kecamatan Samalantan		
2. Akuntabilitas dan Efektivitas Pembinaan terhadap guru-guru		
9.	Bagaimana bentuk pembinaan proses belajar mengajar yang dilakukan pengawas Sekolah?	Pengawas sekolah melakukan kunjungan ke kelas ketika guru sedang mengajar dan memeriksa administrasi kelas kemudian memberikan arahan
10.	Apakah ada permasalahan terhadap kegiatan belajar mengajar?	Pada umumnya guru-guru tidak mempunyai persiapan dalam kegiatan belajar mengajar dan kelengkapan administrasi kelas kurang lengkap
11.	Berapa jumlah dan nama-nama Sekolah Binaan di Kecamatan Samalantan?	Jumlah sekolah binaan ada 19 sekolah, dibagi dalam empat gugus, yakni: Gugus I Serukam SDN 07 Serukam Gugus II Samalantan SDN 01 Samalantan Gugus III Pasukayu SDN 03 Pasukayu Gugus IV Polongan SDN 11 Polongan
12.	Apakah guru-guru membuat RPP? Dan apakah sudah mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)?	Pada umumnya guru-guru tidak membuat RPP, tetapi hanya mengkopinya dari buku atau teman-teman guru lainnya. Guru-guru juga belum melaksanakan model KTSP.
13.	Apa saja kegiatan KKG?	Membina guru-guru dan membahas kegiatan PBM, soal-soal dan informasi yang berkaitan dengan sekolah, murid dan karir guru
3. Akuntabilitas dan Efektivitas Pembinaan Administrasi Kelas		
14.	Apakah ada dokumentasi rekapitulasi Perangkat Pembelajaran Kelas Guru-guru SD Binaan ?	Setahu saya ada
15.	Apa saja perangkat administrasi kelas ?	Kurikulum, silabus, RPP, Rapor, absen, daftar kelas, buku nilai, bank soal, inventaris kelas, tetapi tidak semua guru melengkapi administrasi kelas
16.	Apakah Pengawas Sekolah membuat Instrumen Evaluasi Hasil Belajar Mengajar?	Pengawas sekolah tidak membuatnya
17.	Dalam rangka peningkatan profesional guru-guru apa saja yang sudah dilakukan oleh Pengawas Sekolah?	Memberikan bimbingan agar guru-guru melalui KKG terutama tentang KBM
B. Faktor pendukung dan penghambat		
1. Faktor Pendukung		
18.	Apakah ada tanggungjawab atau komitmen Kepala Sekolah untuk meningkatkan kualitas	Ada seperti: 1. Melaksanakan koordinasi antara kepala sekolah dengan pengawas untuk melaksanakan program pengajaran di

No.	Pertanyaan	Jawab
	pendidikan	sekolah. 2. Melakukan koordinasi dengan guru-guru dan melakukan koordinasi dengan pengawas sekolah, untuk membicarakan atau menyelesaikan persoalan. 3. Melakukan koordinasi dan saling bertukar informasi dengan kepala sekolah lainnya. 4. Melakukan koordinasi dengan atasan langsung yaitu Dinas Kabupaten dan Kecamatan. 5. Melakukan supervisi internal dapat dilakukan melalui diskusi atau rapat dewan guru, atau diskusi antar kepala sekolah dengan salah seorang guru secara pribadi, maupun secara kelompok
19.	Apa saja komitmen guru-guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik	'1. Tetap melaksanakan tugas walaupun lokasi sekolah jauh terpencil seperti sekolah SDN 10 Sangkinahu dan SDN 12 Kubu Kilawit, dengan jarak tempuh sekitar 10 km walaupun kondisi jalan rusak tidak beraspal dan becek jika musim penghujan 2. Suatu panggilan jiwa
20.	Apa saja Program Dana BOS di Sekolah Dasar Kecamatan Samalantan	Pengadaan buku-buku ajar dan pengadaan alat peraga dari dana operasional sekolah.
	2. Faktor Penghambat	
27.	Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Guru-guru	Bab IV pasal 9. tentang kualifikasi pendidik minimal S1 dan D 4. Secara umum guru-guru berkualifikasi SMA sekitar 91, 8 persen sedangkan S1/D2 sebesar 8,9
28.	Bagaimana keadaan fasilitas dan Sarana Pendidikan di sekolah Bapak/Ibu ?	1. Buku-buku yang digunakan atau yang dikirim melalui BOS buku masih bermutu kurikulum berbasis kompetensi (KBK 2004). 2. Alat peraga dan fasilitas kelas lainnya, ada beberapa sekolah kondisi kelas (bangunan) rusak berat, kursi dan meja belajar dan lemari rusak. 3. Sekolah jauh dari kecamatan dengan kondisi jalan rusak dan tidak beraspal diantaranya SDN 13 Siraba, SDN 15, SDN Sei Lipan dan SDN 17 Bambi Rancang
29.	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	'1. Sebagai masyarakat petani dan berkebun pada umumnya kondisi sosial ekonomi mereka rendah '2. Pada perayaan hari-hari besar dan upacara adat anak-anak tidak ke sekolah beberapa hari

Keterangan: Secara umum jawabannya hampir sama dan dirangkum menjadi satu

HASIL WAWANCARA

2. Pertanyaan kepada Guru-guru

- (1). Hy. Sukidi, A.Ma Pd : Guru SDN No.1 Samalantan
 (2). Sujiati, A.Ma Pd : Guru SDN No.03 Pasukayu
 (3). Pendi, A.Ma : Guru SDN No. 08 Padang
 (4). Jumari : Guru SDN No. 15 Sungai Lipan

Bentuk Pertanyaan

No.	Pertanyaan	Jawab
A.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Oleh Pengawas Sekolah Terhadap Guru-guru di Kecamatan Samalantan	
	1. Akuntabilitas dan Efektivitas Kepengawasan	
1.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tugas dan fungsi tugas pengawas sekolah?	Secara umum saya tidak mengetahuinya, tetapi secara umum tugas pengawas sekolah adalah melakukan supervisi sekolah
2.	Apakah Bapak mengetahui persis apakah pengawas sekolah mengetahui tugas dan fungsi sebagai pengawas sekolah?	Saya kira pengawas sekolah mengetahui karena sudah menjadi tugasnya
3.	Apakah pengawas sekolah mempunyai program kepengawasan? dan apakah program tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang hendak dicapai?	Programnya pasti ada karena pengawas sekolah kadang-kadang mengunjungi sekolah-sekolah
4.	Apakah Pengawas sekolah mempunyai jadwal kunjungan ke sekolah Binaan	Saya kira ada, tetapi saya tidak mengetahuinya
5.	Apakah pengawas sekolah menyusun Program pengawas Sekolah tahunan dan triwulan	Saya tidak tahu
6.	Apa saja program/kegiatan pengawasan?	Setahu saya program kepengawasan ialah secara umum melakukan supervisi dengan mengunjungi sekolah-sekolah dan memberikan pembinaan kepada guru-guru
7.	Apakah Pengawas sekolah melakukan pembinaan terhadap Proses Belajar Mengajar di kelas?	Tidak selalu memberikan pembinaan apalagi sekolah-sekolah yang letaknya terpencil.
8.	Apakah Pengawas sekolah pernah mengadakan kunjungan kunjungan ke sekolah binaan?	Pernah, tetapi hanya sesekali saja dan juga melalui kegiatan KKG
	2. Akuntabilitas dan Efektivitas Pembinaan terhadap guru-guru	

No.	Pertanyaan	Jawab
9.	Bagaimana bentuk pembinaan proses belajar mengajar di kelas?	Pengawas sekolah melakukan kunjungan ke kelas ketika guru sedang mengajar dan memeriksa administrasi kelas.
No.	Pertanyaan	Jawab
A.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Oleh Pengawas Sekolah Terhadap Guru-guru di Kecamatan Samalantan	
12.	Apakah bapak/Ibu membuat RPP? Dan apakah sudah mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP?	Pada umumnya guru-guru tidak membuat RPP, tetapi hanya mengkopinya dari buku atau teman-teman guru lainnya. Dan belum melaksanakan model KTSP kami belum mendapat pembinaan dari Pengawas sekolah.
13.	Apa saja kegiatan KKG?	Melakukan diskusi dan membahas kegiatan PBM, soal-soal dan saling memberikan informasi
3. Akuntabilitas dan Efektivitas Pembinaan Administrasi Kelas		
14.	Apakah ada dokumentasi rekapitulasi Perangkat Pembelajaran Kelas Guru-guru SD Binaan ?	Setahu saya ada
15.	Apa saja perangkat administrasi kelas ?	Kurikulum, silabus, RPP, Rapot, absen, daftar kelas, dan buku nilai.
16.	Apakah bapak/Ibu mengetahui Instrumen Evaluasi Hasil Belajar Mengajar?	Saya tidak mengetahui dan kira soal-soal ulangan siswa
17.	Dalam rangka peningkatan profesional guru-guru apa saja yang sudah dilakukan?	Memberikan bimbingan agar guru-guru lebih profesional dalam mengajar. Melakukan diklat-diklat dan seminar
B.	Faktor pendukung dan penghambat	
1. Faktor Pendukung		
18.	Bagaimana tanggungjawab atau komitmen Kepala Sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pembinaan kepada guru-guru terutama dalam kegiatan belajar mengajar 2. Melakukan supervisi kelas 3. Memberikan dorongan kepada guru-guru untuk melakukan tugas dengan baik.
19.	Apakah ada komitmen guru-guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kami guru-guru yang berada di daerah kekurangan fasilitas sekolah tetapi kami tetap menjalankan tugas 2. Terutama di sekolah yang terpencil kami tetap melaksanakan tugas.
20.	Apakah program dana BOS bermanfaat terhadap sekolah bapak/Ibu? Dan apa saja Program Dana BOS?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program dana BOS sangat bermanfaat karena setiap murid tidak kesulitan mendapatkan buku ajar. 2. Pengadaan buku-buku ajar dan pengadaan alat peraga dan dana operasional sekolah.
2. Faktor Penghambat		
27.	Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Guru-guru	Pada umumnya guru-guru masih berlatar belakang jenjang pendidikan setingkat SLTA sehingga belum memenuhi persyaratan kualifikasi guru
28.	Bagaimana keadaan fasilitas dan Sarana Pendidikan di sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadang-kadang bukunya terlambat datang 2. Belum mengacu pada KTSP

No.	Pertanyaan	Jawab
	Bapak/Ibu ?	3. Alat peraga dan fasilitas kelas lainnya, ada beberapa sekolah kondisi kelas (bangunan) rusak berat, kursi dan meja belajar dan lemari rusak. 3. Sekolah jauh dari kecamatan dengan kondisi jalan rusak dan tidak beraspal
No.	Pertanyaan	Jawab
B.	Faktor pendukung dan penghambat	
29.	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	1. Sebagai masyarakat petani dan berkebun pada umumnya kondisi sosial ekonomi mereka rendah 2. Pada perayaan hari-hari besar dan upacara adat anak-anak tidak ke sekolah beberapa hari

Keterangan: Secara umum jawabannya hampir sama dan dirangkum menjadi satu

UNIVERSITAS TERBUKA

HASIL WAWANCARA

3. Pertanyaan kepada Pengawas Sekolah Binaan SD Samalantan

- (1). Muslianus Liat, S.Pd : Pengawas Sekolah Kecamatan Samalantan
 (2). Alexander, S.Pd : Pengawas Sekolah Kecamatan Samalantan

Bentuk Pertanyaan

No.	Pertanyaan	Jawab
A.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Oleh Pengawas Sekolah Terhadap Guru-guru di Kecamatan Samalantan	
	1. Akuntabilitas dan Efektivitas Kepengawasan	
1.	Apakah Bapak mengetahui tugas dan fungsi tugas pengawas sekolah?	Saya mempunyai pedoman tupoksi dari Diknas, dan saya mengetahuinya
2.	Apakah Bapak pernah mengikuti kursus kepengawasan?	Sudah pernah dan saya mendapatkan informasi dari bahan latihan juga dari Kepala UPT Diknas Kecamatan Samalantan dan dari sesama pengawas sekolah
3.	Apakah Bapak mempunyai program kepengawasan? dan apakah program tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang hendak dicapai?	Saya mempunyai program, tetapi mungkin program tersebut belum sesuai tupoksi karena sulit menerapkannya di sekolah yang jauh sehingga sasaran belum tercapai
4.	Apakah Pengawas sekolah mempunyai jadwal kunjungan ke sekolah Binaan	Saya kira ada, tetapi pengawas sekolah tidak membuatnya sesuai program
5.	Apakah Bapak menyusun Program pengawas Sekolah tahunan dan triwulan	Saya belum membuatnya tetapi sudah ada draft yang saya dapatkan dari Diknas
7.	Apa saja program/kegiatan pengawasan? Dan apakah program tersebut dapat dilaksanakan semuanya?	Menurut Tupoksi kepengawasan dilaksanakan secara triwulan dan yakni: 1. Menyusun Program pengawas Sekolah 2. Menilai hasil belajar siswa dan kemampuan guru 3. Menganalisis hasil belajar/bimbingan siswa dan guru serta sumber daya pendidikan 4. Melaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga lainnya di sekolah 5. Menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawasan sekolah persekolah 6. Melaksanakan pembinaan lainnya di sekolah selain proses belajar mengajar/bimbingan siswa 7. Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan dari sekolah yang menjadi binaan

No.	Pertanyaan	Jawab
		8. Melaksanakan tugas kepengawasan sekolah di daerah terpencil. Dari ke delapan program tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan masih dalam tahapan pembuatan draft
9.	Bagaimana Bapak melakukan pembinaan terhadap Proses Belajar Mengajar di kelas? Dan berapa kali Bapak melakukan pembinaan?	Kami memberikan pembinaan dengan mengunjungi ke sekolah, berdiskusi dan dibantu oleh kepala sekolah dan guru senior, dan kami melakukan pembinaan hanya beberapa kali saja.
10.	Berapa kali Bapak melakukan kunjungan ke sekolah binaan? Dan apakah Bapak membuat jadwal kunjungan?	Setiap semester hanya dilakukan satu kali saja, dan tidak sesuai jadwal.
b. Akuntabilitas dan Efektivitas Pembinaan terhadap guru-guru		
11.	Bagaimana bentuk pembinaan proses belajar mengajar yang Bapak lakukan terhadap guru-guru?	Kami melakukan kunjungan ke kelas ketika guru sedang mengajar dan memeriksa administrasi kelas, kemudian kami mengadakan diskusi dengan guru-guru yang berhubungan dengan peningkatan kegiatan belajar mengajar. Untuk sekolah-sekolah yang terpencil kami sulit melakukan pembinaan karena jalannya rusak dan becek seperti SDN 12 Kubu Kilawit dan SDN 13 Siraba. Sekolah tersebut sulit dijangkau dengan alat transportasi darat sehingga sulit sekali untuk menerapkan pengawasan secara ketat. Jadi kami memberikan kelonggaran kepada guru-guru mengajar yang penting kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
12.	Apakah Bapak pernah melakukan kunjungan ke sekolah yang jauh terpencil?	Pernah dan hanya dua kali saja.
13.	Berapa jumlah sekolah binaan Bapak? Dan apa nama-nama Gugus Sekolah Binaan?	Jumlah sekolah binaan kami ada 19 sekolah, dibagi menjadi 4 gugus sesuai dengan letak lokasi sekolah satu sama lain saling berdekatan. Dan nama-nama gugus tersebut: 1. Gugus I Serukam SDN 07 Serukam 2. Gugus II Samalantan SDN 01 Samalantan 3. Gugus III Pasukayu SDN 03 Pasukayu 4. Gugus IV Polongan SDN 11 Polongan
13.	Bagaimana persiapan guru dalam mengajar? Dan apa yang Bapak lakukan menghadapi permasalahan seperti ini?	Pada umumnya guru-guru tidak membuat RPP hanya mengkopinya dari bahan-bahan buku ajar dan dari diklat. Menghadapi guru-guru yang tidak membuat RPP kami melakukan pembinaan dengan mereka dan memberikan contoh dalam membuat RPP dibimbing oleh guru senior melalui kegiatan KKG
14.	Apakah ada kegiatan KKG? Dan apakah setiap kegiatan KKG Bapak selalu mengunjunginya?	Setiap gugus membuat jadwal KKG pada hari Sabtu dan kami membagi tugas jadwal kunjungan ke gugus tetapi tidak semua gugus dapat kami kunjungi
15.	Apakah Bapak mengetahui model kurikulum yang bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Dan	Kami mengetahuinya dan di sekolah binaan kami belum sepenuhnya menerapkannya.

No.	Pertanyaan	Jawab
	apakah bapak memberikan anjuran kepada guru untuk menerapkan model tersebut?	
16.	Bagaimana bentuk uraian tugas dalam kegiatan pembinaan guru-guru? Dan apa saja permasalahan kegiatan belajar mengajar guru-guru di sekolah binaan Bapak?	Bentuk uraian tugas berdasarkan program kepengawasan yaitu melaksanakan pembinaan kepada guru untuk meningkatkan profesional guru-guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Permasalahan umum yang sering terjadi ketika melaksanakan pengawasan sekolah adalah pengawas sekolah sulit merubah kebiasaan aktivitas belajar mengajar di kelas yang dianggap kurang memuaskan, seperti mengenai kekurangsiapan guru mengajar, penggunaan bahan ajar dan metode mengajar yang sangat minim, jarangny menggunakan alat peraga
2. Akuntabilitas dan Efektivitas Pembinaan Administrasi Kelas		
	Apakah Bapak membuat rekapitulasi daftar perangkat Pembelajaran Kelas Guru-guru sebagai bahan supervisi yang Bapak lakukan? Bagaimana bentuk rekapitulasi tersebut?	Saya ada membuatnya tetapi kurang rinci hanya secara global saja. Bentuknya seperti bahan ajar dan administrasi kelas
17.	Apa sajakah kelengkapan administrasi kelas dan apa yang Bapak lakukan sehubungan ketidaklengkapan administrasi kelas guru-guru?	1. Kelengkapan administrasi kelas diantaranya adalah Kurlum, silabus, RPP, Rapot, absen, daftar kelas, buku nilai, bank soal, inventaris kelas. 2. Ternyata tidak semua guru-guru melengkapi administrasi kelas dan yang kami lakukan adalah memberikan arahan kepada guru-guru dan kepala sekolah agar melengkapi administrasi kelas.
18.	Apakah Bapak melakukan supervisi hasil belajar anak didik	Kami melakukan ketika melakukan supervisi guru-guru di kelas. Ketika itu kami memeriksa hasil belajar siswa dan beberapa guru tidak membuat laporan hasil belajar siswa.
19.	Apakah bapak memberikan Instrumen Evaluasi Hasil Belajar Murid kepada guru-guru	Kami mendapatkan rekapitulasi dari kepala sekolah hasil belajar siswa dan draft hasil belajar siswa belum disempurnakan.
20.	Apa yang bapak lakukan untuk peningkatan professional guru-guru	Tanggungjawab pengawas terkait pengembangan karier adalah memberikan informasi, bimbingan tugas pokok guru, dan memberikan bimbingan atau kesempatan peningkatan kualitas pribadi guru berupa seminar-seminar, diklat-diklat kemudian memberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah jenjang S1. Lebih rinci kegiatan tersebut berupa: 1. Melakukan pembinaan terhadap guru untuk membuat Rencana pelaksanaan Pelajaran (RPP), bahan ajar dan metode mengajar yang dianggap kurang melalui kegiatan KKG. Guru senior membantu memberikan bimbingan terhadap guru-guru. 2. Pendataan terhadap guru yang perlu mengikuti seminar, kursus atau pelatihan sesuai program dari Diknas Kabupaten atau Diknas Propinsi seperti pelatihan pembuatan Kurikulum KTSP, Pembuatan Bahan Ajar, Pengayaan guru bidang studi. 3. Melakukan pendataan dan kesempatan sertifikasi guru-

No.	Pertanyaan	Jawab
		guru yang memenuhi persyaratan. 4. Pengawas sekolah juga melakukan pendataan terhadap guru-guru yang dianggap layak untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah.

Keterangan: Secara umum jawabannya hampir sama dan dirangkum menjadi satu

UNIVERSITAS TERBUKA

HASIL WAWANCARA

4. Pertanyaan kepada Antonius. D, A.Ma Pd: Kepala UPT Diknas Kecamatan Samalantan

Bentuk Pertanyaan

No.	Pertanyaan	Jawab
A.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Oleh Pengawas Sekolah Terhadap Guru-guru di Kecamatan Samalantan	
	1. Akuntabilitas dan Efektivitas Kepengawasan	
1.	Apakah Bapak mengetahui tugas dan fungsi tugas pengawas sekolah?	Saya mengetahuinya
2.	Sejauh sepengetahuan Bapak apakah Pengawas Sekolah pernah mengikuti diklat kepengawasan?	Pernah di LPMP Kota Pontianak
3.	Sepengetahuan Bapak Apakah Pengawas Sekolah membuat program kepengawasan? dan apakah program tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang hendak dicapai?	Saya kira ada program kepengawasan, tetapi mungkin program tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya
4.	Apakah Pengawas sekolah mempunyai jadwal kunjungan ke sekolah Binaan	Saya kira ada, tetapi pengawas sekolah tidak membuat secara rinci
7.	Sepengetahuan Bapak, apakah Pengawas Sekolah telah melakukan tugasnya sesuai tupoksi?	Tidak semuanya sesuai tupoksi karena sulit dilaksanakan di daerah terpencil.
9.	Sepengetahuan Bapak apakah Pengawas Sekolah melakukan pembinaan terhadap guru-guru dan bagaimana bentuk pembinaan tersebut?	Pengawas Sekolah memberikan pembinaan dengan mengunjungi ke sekolah
10.	Apakah Pengawas sekolah Selalu mengasdasakan koordinasi dengan Bapak?	Sering terutama menjelang tahun ajaran dan ujian sekolah
	b. Akuntabilitas dan Efektivitas Pembinaan terhadap guru-guru	
11.	Bagaimana bentuk pembinaan proses belajar mengajar yang dilakukan Pengawas Sekolah?	Setahu saya Pengawas Sekolah dalam melaksanakan pembinaan melakukan kunjungan ke kelas ketika guru sedang mengajar dan memeriksa administrasi kelas.
12.	Sepengetahuan Bapak, apakah Pengawas Sekolah pernah melakukan kunjungan ke sekolah yang jauh terpencil?	Pernah
13.	Berapa jumlah sekolah binaan Bapak? Dan apa nama-nama	Jumlah sekolah binaan kami ada 19 sekolah, dibagi menjadi 4 gugus sesuai dengan letak lokasi sekolah satu sama lain

No.	Pertanyaan	Jawab
	Gugus Sekolah Binaan?	saling berdekatan. Dan nama-nama gugus tersebut: 1. Gugus I Serukam SDN 07 Serukam 2. Gugus II Samalantan SDN 01 Samalantan 3. Gugus III Pasukayu SDN 03 Pasukayu 4. Gugus IV Polongan SDN 11 Polongan
13.	Sepengetahuan Bapak apakah Pengawas Sekolah memeriksa persiapan guru dalam mengajar? Sejah ini bagaimana persiapan guru dalam mengajar?	Bentuk pemeriksaan guru dalam mengajar dengan mengunjungi kelas masing-masing, dan saya kira guru-guru mempunyai persiapan mengajar
14.	Sepengetahuan Bapak apakah ada kegiatan KKG? Dan apakah setiap kegiatan KKG Bapak selalu mengunjunginya?	Setiap gugus ada kegiatan KKG berdasarkan lokasi sekolah. Saya tidak selalu mengunjungi hanya sesekali saja
15.	Apakah Bapak mengetahui model kurikulum yang bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)? Dan apakah bapak memberikan anjuran kepada guru untuk menerapkan model tersebut?	Kami mengetahuinya dan di sekolah binaan kami belum sepenuhnya menerapkannya.
2. Akuntabilitas dan Efektivitas Pembinaan Administrasi Kelas		
16.	Sepengetahuan Bapak apakah Pengawas sekolah membuat rekapitulasi daftar perangkat Pembelajaran Kelas Guru-guru sebagai bahan supervisi yang Bapak lakukan?	Saya kira Pengawas Sekolah membuatnya tetapi saya tidak mengetahui bentuk rekap tersebut
17.	Sepengetahuan Bapak apakah Pengawas sekolah memeriksa kelengkapan administrasi kelas dan apa yang dilakukannya sehubungan ketidaklengkapan administrasi kelas guru-guru?	Ternyata tidak semua guru-guru melengkapi administrasi kelas dan yang kami lakukan adalah memberikan arahan kepada guru-guru dan kepala sekolah agar melengkapi administrasi kelas.
18.	Sepengetahuan Bapak apakah Pengawas sekolah melakukan supervisi hasil belajar anak didik?	Berupa laporan nilai siswa
19.	Apa yang bapak lakukan untuk peningkatan profesional guru-guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan terhadap guru yang perlu mengikuti seminar, kursus atau pelatihan sesuai program dari Diknas Kabupaten atau Diknas Propinsi seperti pelatihan pembuatan Kurikulum KTSP, Pembuatan Bahan Ajar, Pengayaan guru bidang studi. 2. Melakukan pendataan dan kesempatan sertifikasi guru-guru yang memenuhi persyaratan. 3. Pengawas sekolah juga melakukan pendataan terhadap guru-guru yang dianggap layak untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah.

HASIL OBSERVASI

No.	Komponen-komponen	ada	Tidak lengkap	baik	Kurang baik
A.	Komponen Sekolah Binaan			-	-
1.	Daftar jumlah sekolah binaan	√			
2.	Jumlah murid	√			
3.	Jumlah guru	√			
4.	Kondisi fasilitas sekolah pada umumnya			√	
5.	Kondisi sarana jalan sekolah binaan				√ (Lokasi sekolah jauh)
6.	Data guru	√			
B.	Komponen Pendukung Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan				
1.	Tupoksi kepengawasan dan pembinaan	√			
2.	Program pengawas		√		
3.	Jadwal kunjungan ke sekolah binaan		√		
4.	Uraian tugas pembinaan kegiatan belajar mengajar		√		
5.	Uraian tugas pembinaan administrasi kelas		√		
6.	Kegiatan KKG				
7.	Rapat koordinasi Pengawas sekolah dg kepala sekolah dan guru-guru	√			

Sumber Data: Tahun 2009

DAFTAR INFORMAN

1. Antonius. D, A.Ma Pd : Kepala UPT Diknas Kecamatan Samalantan
2. Muslianus Liat, S.Pd : Pengawas Sekolah Kecamatan Samalantan
3. Alexander, S.Pd : Pengawas Sekolah Kecamatan Samalantan
4. Hy. Sukidi, A.Ma Pd : Guru SDN No.1 Samalantan
5. Paulus, S.Pd : Kepala SDN No. 02 Samalantan
6. Maria, A.Ma Pd : Kepala SDN No.03 Samalantan sekaligus Ketua Gugus KKG 03 Pasukayu
7. Sujati, A.Ma Pd : Guru SDN No.03 Pasukayu
8. Daud Silalahi, S.Pd : Kepala SDN No.04 Parompong
9. Antonius Thein : Wakil Kepala SDN No. 06 Aping
10. Hendrik Luwit, A.Ma Pd : Kepala SDN No. 07 Serukam sekaligus Ketua KKG Gugus 01 Serukam
11. Pendi, A.Ma : Guru SDN No. 08 Padang
12. Jumari : Guru SDN No. 15 Sungai Lipan
13. Juhermi, S.Pd.SD : Kepala SDN No. 16 Jirak



Nomor : **739** /H31.43/AK/2007
Lampiran : --
Perihal : Mohon untuk memberikan Ijin Penelitian

**Yth. Kepala Dinas Pendidikan.
Kabupaten Bengkayang.
Di - Bengkayang**

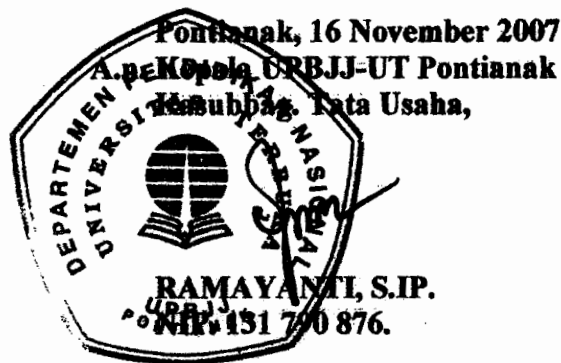
Dengan hormat, memperhatikan permohonan mahasiswa Universitas Terbuka pada UPBJJ Pontianak, yang tersebut di bawah ini :

Nama : ALADIN, S.PD.
NIM : 014707332
Tgl. Lahir : 12 NOVEMBER 1962
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (S.2)
Alamat : JL. BELIMBING BLOK-F NO. 6 PERUMNAS
ROBAN SINGKAWANG TENGAH.

Bahwa dalam rangka untuk menyelesaikan studi pada Program Studi yang diikutinya, bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti Tugas Akhir Program Magister (TAPM). Adapun Penelitian Tesis tentang **Analisis Kinerja Pengawasan Sekolah TK/SD Dalam Melaksanakan Kepengawasan Di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.**

Sehubungan dengan itu kami mohon dan mengharapkan bantuan Bapak berkenan kiranya untuk memberikan Ijin Penelitian Tesis Tugas Akhir Program Magister (TAPM) pada mahasiswa tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan bantuan yang diberikan dengan ini kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

→ Yth. Sdr. Aladin, S.Pd.
(Mahasiswa Universitas Terbuka Pontianak)



Nomor : 420/0031/Pend.
Lampiran : -
Perihal : Mohon Untuk Memberikan Ijin Penelitian.

22 Januari 2008

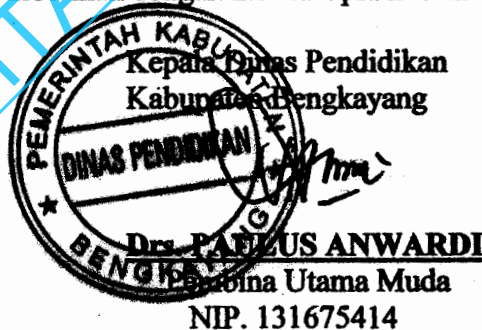
Yth. Kepala Unit Pelaksana Tugas (Ka UPT)
Dinas Pendidikan Kecamatan Samalantan
Di Samalantan.

Dengan hormat, memperhatikan surat dari Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Pontianak, tanggal 16 November 2008 perihal Mohon Untuk Memberikan Ijin Penelitian, berkenaan dengan itu mohon kepada saudara untuk membantu memperlancar proses penelitian kepada :

Nama : ALADIN, S.Pd
NIM : 014707332
Tgl. Lahir : 12 November 1962
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Magister Administrasi Publik (S.2)
Alamat : Jl. Belimbing Blok F No. 6 Perumnas Roban
Singkawang Tengah

Penelitian yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan di wilayah kerja saudara dalam rangka untuk menyelesaikan studi pada program studi yang diikutinya. Adapun penelitian tesis tentang **Analisis Kinerja Pengawas Sekolah TK/SD dalam melaksanakan Kepengawasan di Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.**

Demikian atas perhatian dan bantuan yang diberikan dengan ini diucapkan terima kasih.


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkayang
Drs. PABEUS ANWARDI
Kabina Utama Muda
NIP. 131675414

Tembusan Yth:

1. Camat samalantan, di samalantan
2. Kepala UPBJJ-UT Pontianak, di Pontianak.

PETA KECAMATAN SAMALANTAN
KABUPATEN BENGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LEGENDA PETA

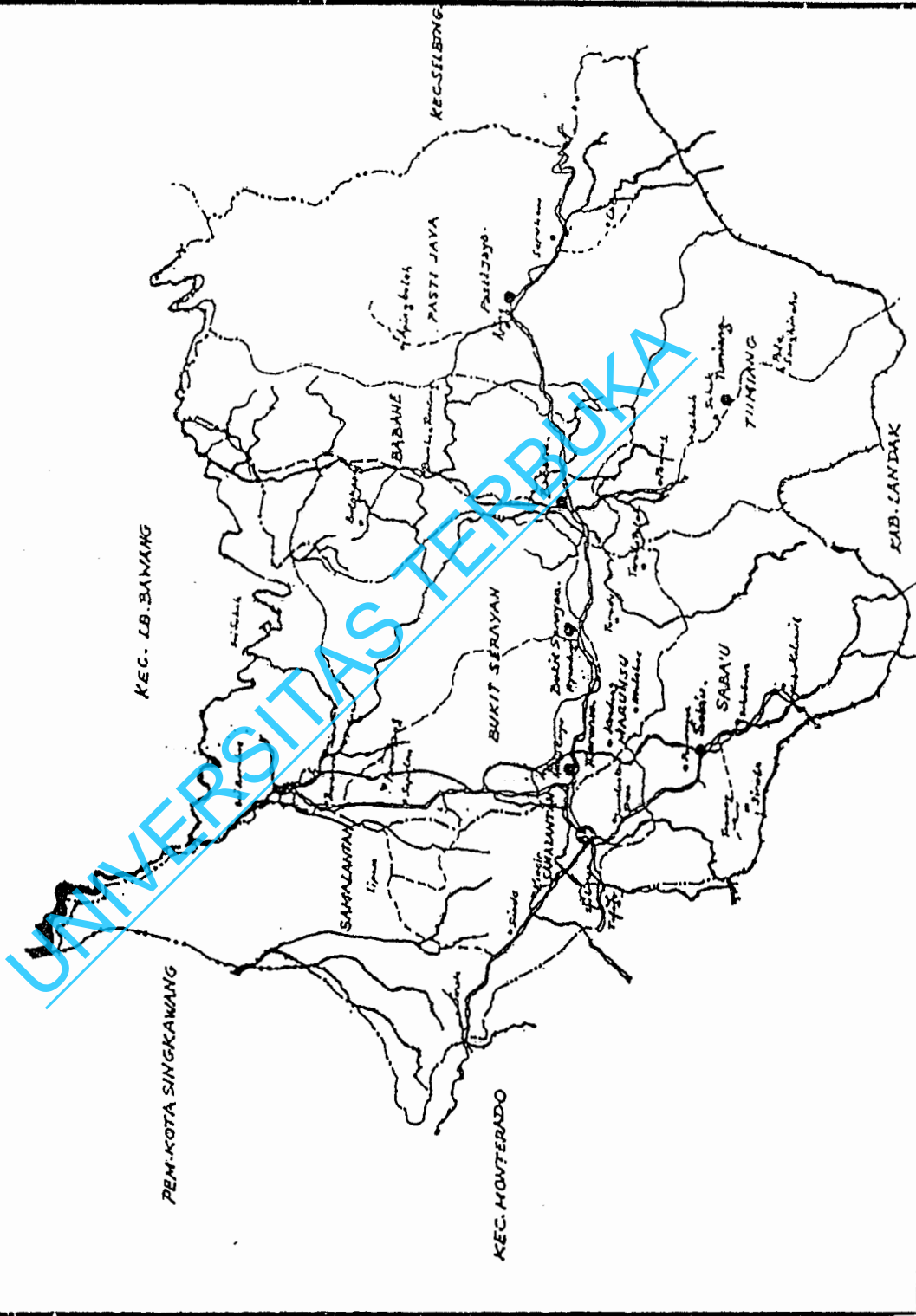
- Jalan Propinsi, Kabupaten
- Jalan Intra-kab.
- Sungai.
- Salang, desa.
- Desa Kecamatan.
- Desa Kelurahan.
- Desa.
- ⊙ Kota Kecamatan.

PETA KABUPATEN BENGKAWANG



Kecamatan Samalantan

Luas Kecamatan 35792,001





Mengawali penelitian di Kecamatan Samalantan,
Peneliti audiensi ke kantor camat Samalantan.



Peneliti audiensi dengan Camat Samalantan (F.A. Muksin)
menyampaikan maksud untuk melaksanakan penelitian.



Pemandangan menuju ibu kota kecamatan Samalantan
dipandang dari arah kantor camat Samalantan.



Tugu Pancasila di Samalantan, menunjukkan bahwa masyarakat
Samalantan mendambakan kehidupan berfilosofi Pancasila.



Peneliti menuju kantor cabang dinas pendidikan Samalantan, Menurut struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) Kabupaten Bengkayang yang baru, nama kantor ini menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Samalantan.



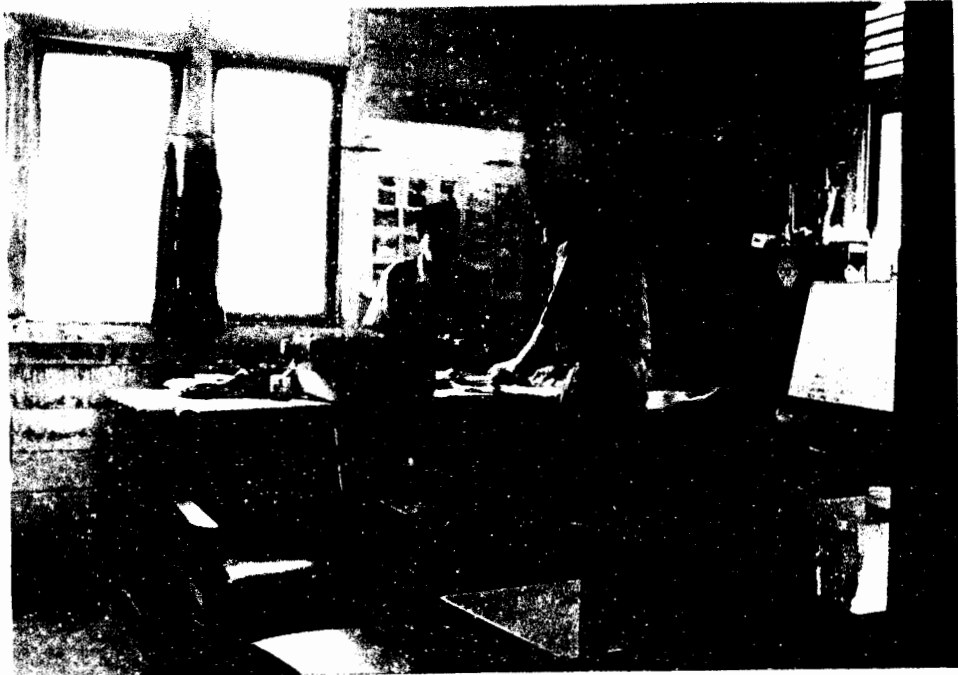
Peneliti saat menghadap Kepala UPT Dinas Pendidikan Samalantan (Antonius D, A.Ma.Pd) menyampaikan Surat Ijin Penelitian dan wawancara seputar kepengawasan sekolah.



Peneliti (kanan) menghadap dua orang pengawas Muslianus Liat, S.Pd (tengah) dan Alexander, S.Pd (kiri), wawancara seputar kepengawasan sekolah.



Peneliti (berdiri) sedang menghadap bapak Alexander, S.Pd di meja kerjanya untuk observasi dan wawancara tentang kepengawasan sekolah.



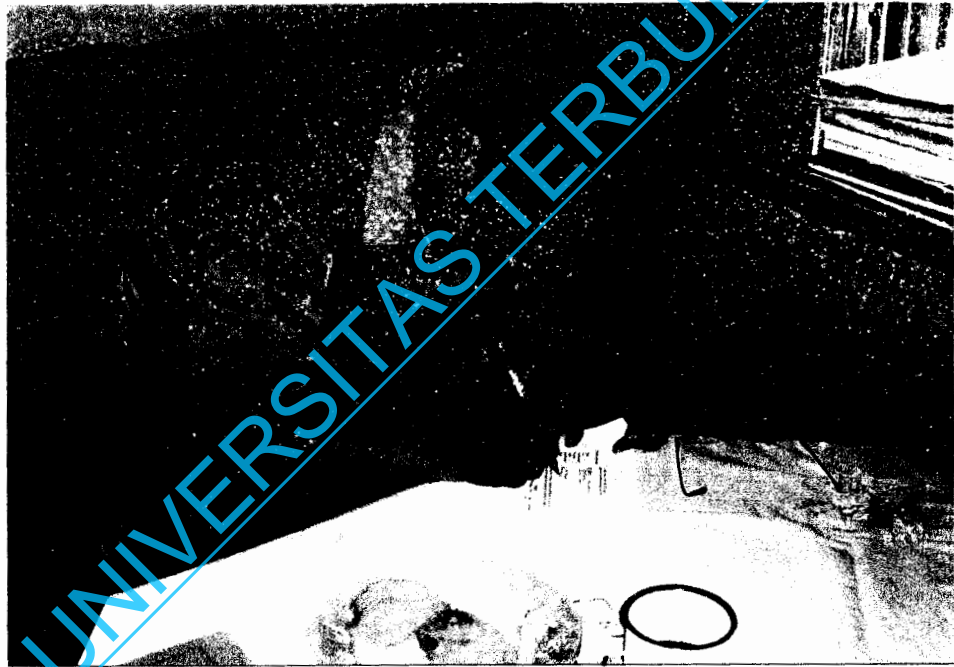
Peneliti menemui staf UPT Dinas Pendidikan Samalantan (Sdr. Yunus) berhubungan dengan pendataan sekolah di kecamatan Samalantan.



Peneliti menuju SDN 01 Samalantan.



Peneliti menghadap kepala sekolah SDN 01 Samalantan (Jayadi Muzanni), Wawancara dan observasi di ruang kepala sekolah.



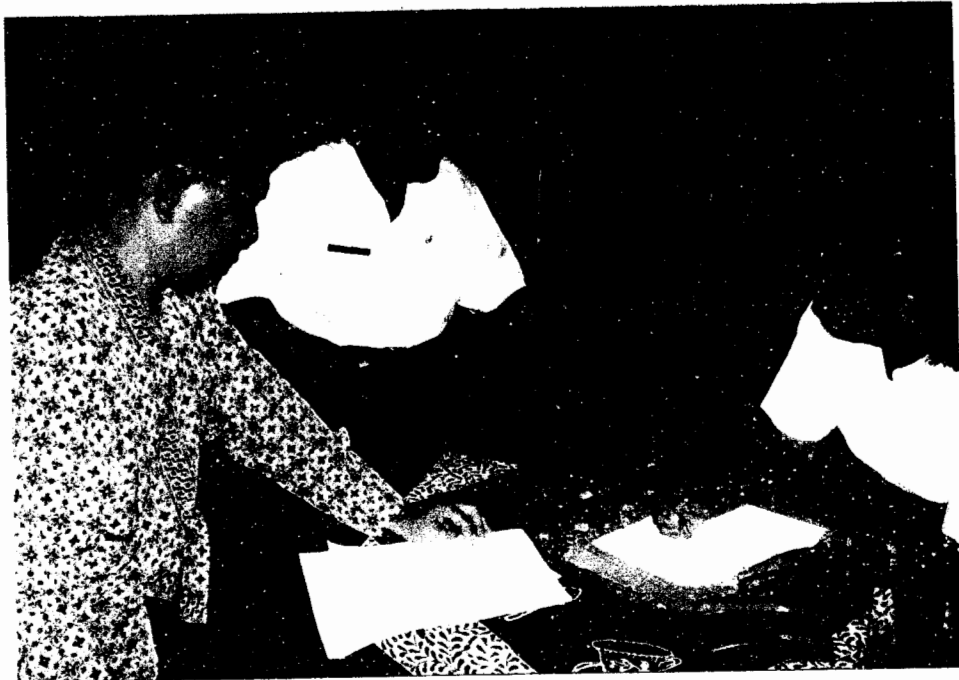
Kepala Sekolah SDN 01 Samalantan sedang mengisi format wawancara yang peneliti berikan, bapak ini sudah mendekati masa usia pensiun.



Bapak dan ibu guru SDN 01 Samalantan mewakili dewan guru lainnya Mempelajari format wawancara seputar kepengawasan sekolah yang Dilakukan pengawas sekolah.



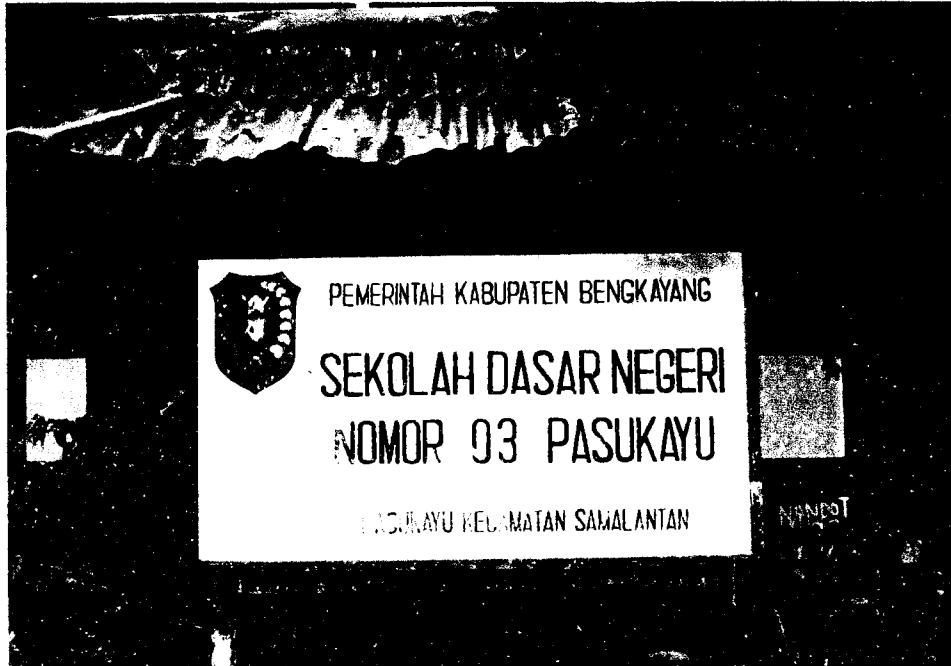
Peneliti menuju SDN 02 Samalantan



Peneliti (tengah) sedang wawancara dengan Kepala SDN 02 Paulus, S.Pd (kiri) dan salah satu dari guru senior Tri Suparmi (kanan)



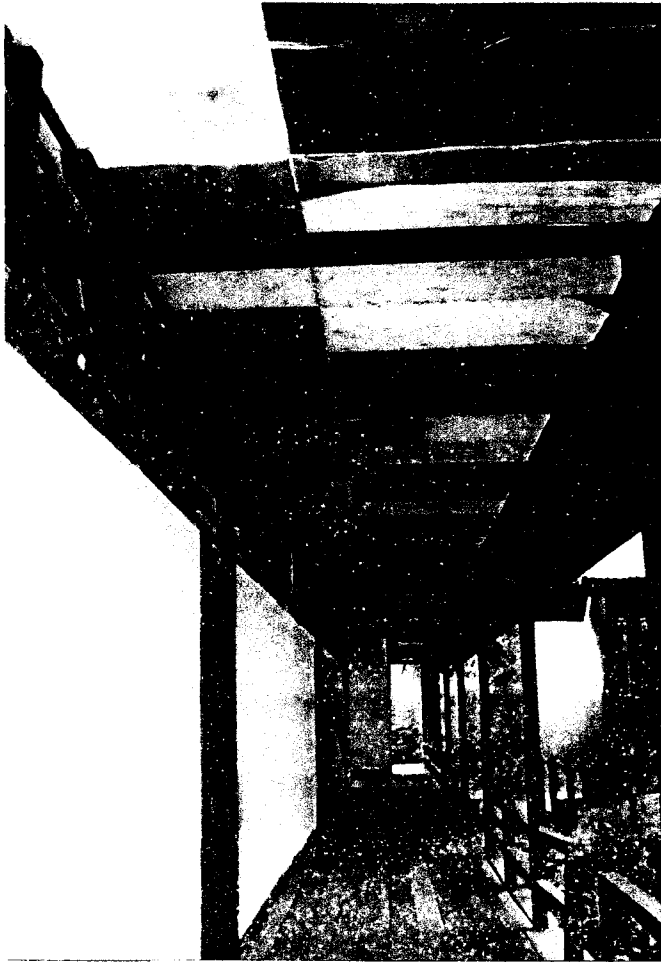
Foto 1 unit gedung SDN 02 Samalantan yang rusak berat, memerlukan renovasi.



Peneliti mengunjungi SDN 03 Pasukayu



Kondisi saat belajar SDN 03 Pasukayu dengan mulai menerapkan sistem pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan (PAKEM)



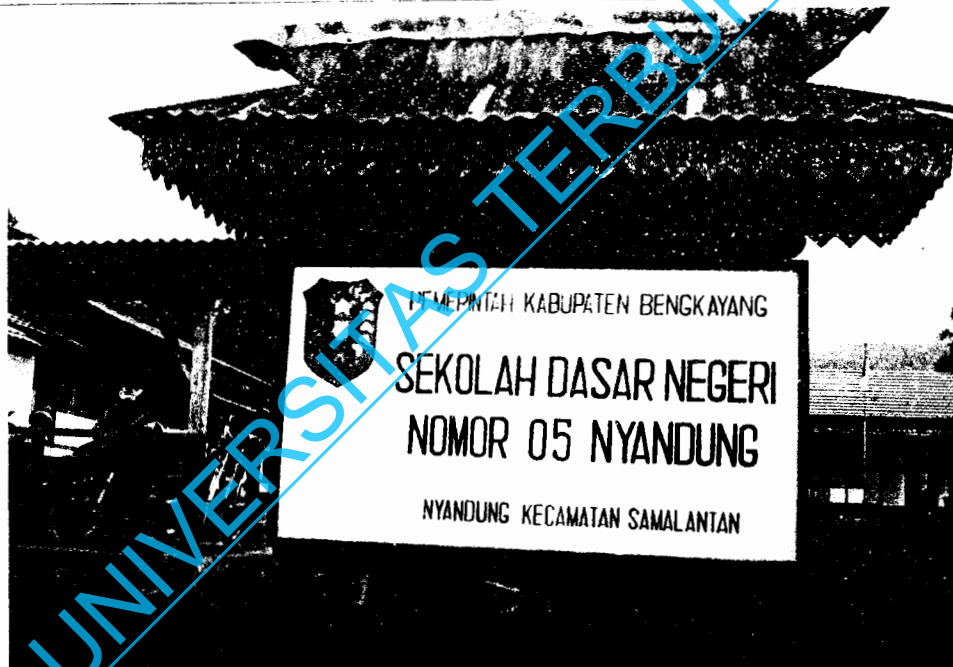
Kondisi gedung SDN 03 Pasukayu yang plafonnya rusak, bocor jika hujan dan sangat memerlukan pengrehaban



Penulis mengunjungi SDN 04 Parompong



Penulis berfoto dengan kepala sekolah SDN 04 Parompong (Daud Silalahi, S.Pd) setelah wawancara seputar kepengawasan sekolah



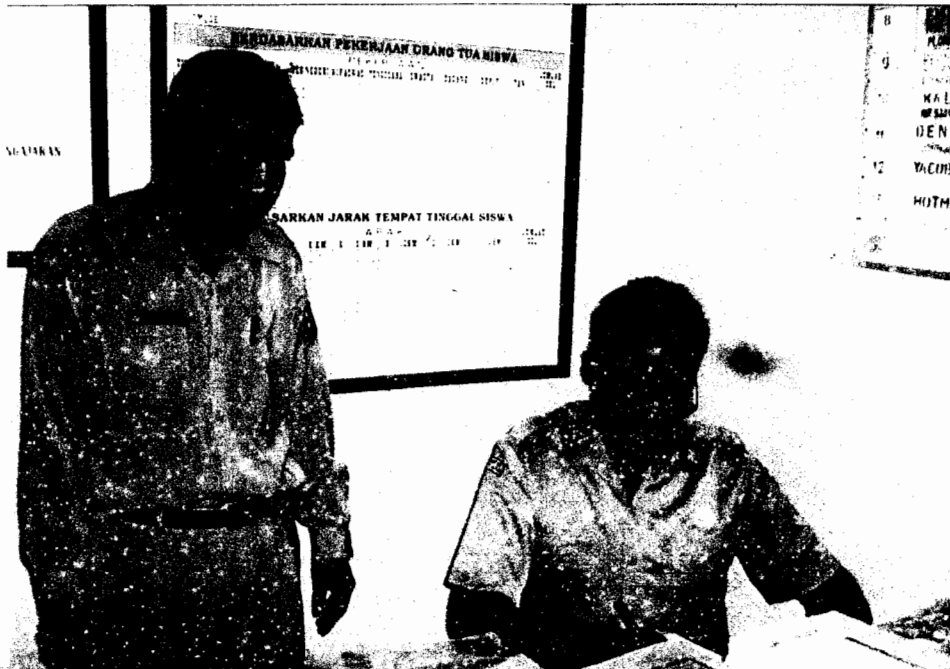
Penulis mengunjungi SDN 05 Nyandung, SD ini terletak di jalur sutera Menuju ibu kota kabupaten Bengkayang dari kota Singkawang



Peneliti berada di ruang kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah Gimam Kartosuwiryo (kanan), berwawancara seputar kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah sedang tugas luar.



Peneliti mengunjungi SDN 06 Aping, yang letaknya di jalur sutera menuju ibu kota Bengkayang dari kota Singkawang



Peneliti sedang wawancara dengan wakil kepala sekolah SDN 06 Aping Antonius Thein (kiri), seputar kepengawasan sekolah. Saat itu kepala sekolah sedang tugas luar



Kondisi anak anak SDN 06 Aping yang sedang belajar, tampak bahwa sistem pembelajarannya masih mendominasi sistem konvensional



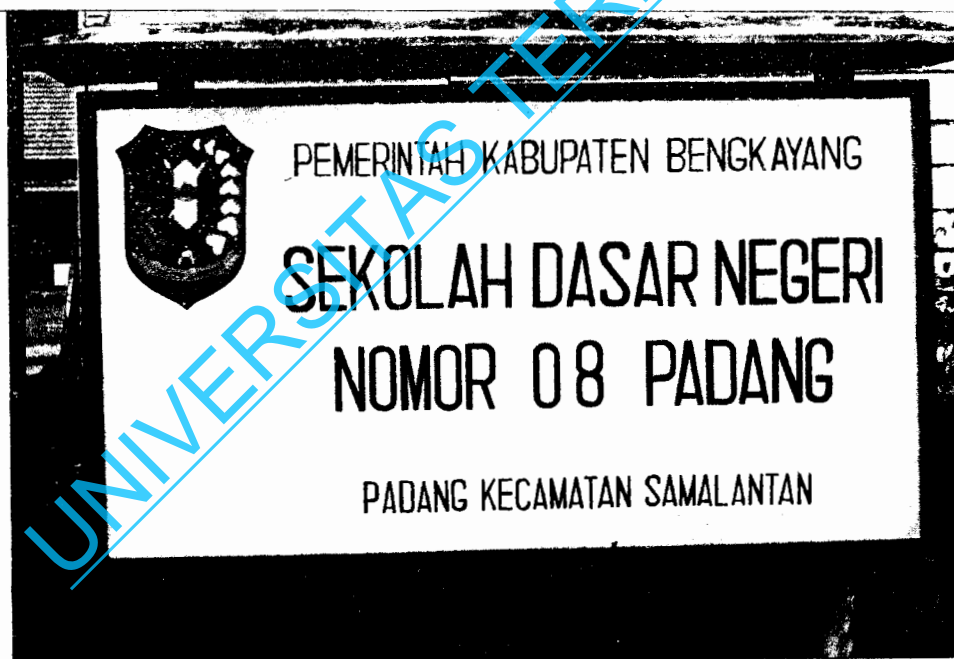
Penulis mengunjungi SDN 07 Serukam, letaknya pada jalur sutera menuju ibu kota kabupaten Bengkayang dari kota Singkawang



Saat wawancara dengan kepala sekolah Hendrik Luwit (kanan) seputar kepengawasan sekolah



Pemandangan jalan saat penulis akan menuju SDN 08 Padang ± 12 km² ke arah Timur dari ibu kota kecamatan Samalantan



Peneliti sampai pada SDN 08 Padang kecamatan Samalantan



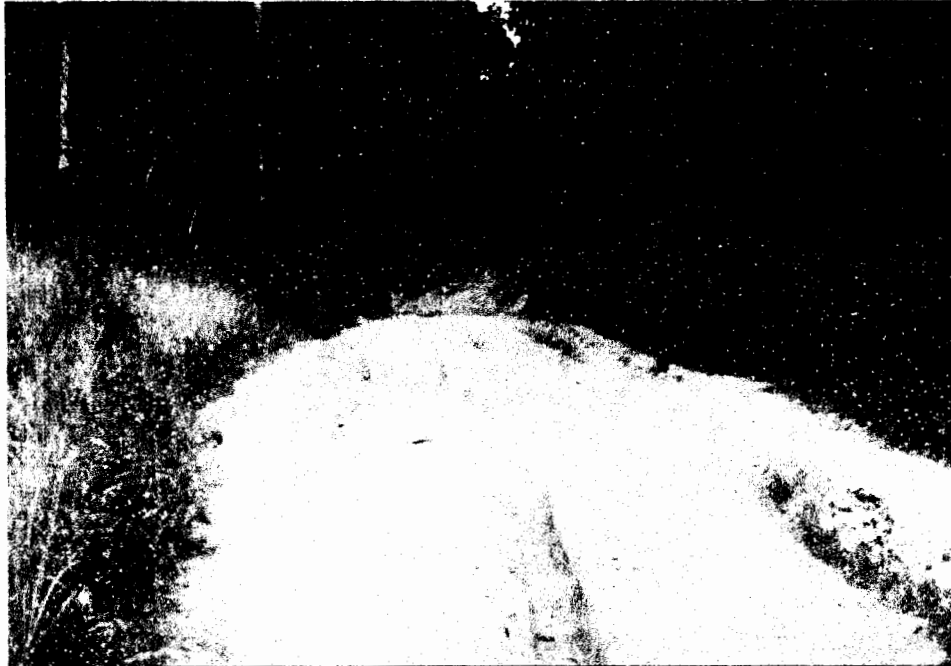
Kondisi sekolah SDN 08 Padang yang tidak cukup ruang kelas belajar (RKB) hanya 3 RKB sementara kelas sampai kelas 6, sehingga perumahan guru yang sudah rusak berat seperti gambar ini digunakan untuk proses belajar mengajar





Pemandangan di kiri kanan jalan menuju dusun Padang





Kondisi jalan dari SDN 08 Padang untuk meneruskan perjalanan peneliti ke SDN 09 Sake dan SDN 10 Sangkinahu yang terletak paling timur dari ibu kota kecamatan Samalantan, kondisi jalan masih belum diaspal pada waktu hujan licin dan tanah melekat pada ban kendaraan sedangkan pada musim kemarau berlobang-lobang naik turun dan jurang.





Peneliti memasuki SDN 09 Sake, sekolah ini satu jalur dengan SDN 08 Sake ± 3 km² masuk ke dalam dari SDN 08 Padang



Saat wawancara dengan kepala sekolah SDN 09 Sake Tontin, A.Ma.Pd seputar kepengawasan sekolah, kepala sekolah ini masih muda enerjik sedang menempuh S1 PGSD berbasis ICT pada Universitas Tanjungpura Pontianak



Foto guru SDN 09 Sake, dua orang ibu guru ini adalah tenaga guru honorer dari dana BOS (bantuan operasional sekolah), keberadaan mereka sangat membantu ketiga guru PNS termasuk kepala sekolah yang mengajar sebanyak 6 kelas, sementara ruang kelas hanya 3.



Kondisi ruang kelas yang dibagi dua karena ruang kelas tidak cukup. Sementara jumlah murid sedikit, ini adalah ruang kelas 1 dan kelas 2.



Ini foto ruang kelas 3 dan 4



Ini foto ruang kelas 5 dan 6



Peneliti mengunjungi SDN 10 Sangkinahu, ± 5 km² dari SDN 09 Sake



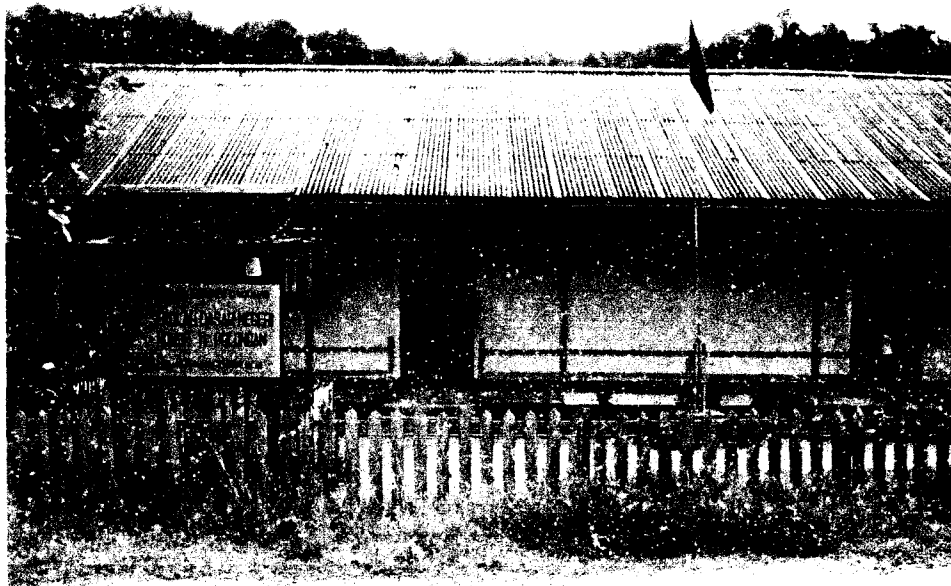
Kepala SDN 10 Sangkinahu Susanto, S.Pd (kiri) sedang memberi arahan kepada Guru kelas 6 untuk mengisi format wawancara setelah wawancara dengan penulis.



Seorang bapak guru SDN 10 Sangkinahu sedang mengajar, tampak mengajar masih sistem konvensional (mencatat, menerangkan, memberi tugas) tanpa perangkat pembelajaran, alat peraga hanya berbekal sebuah buku pegangan



Selanjutnya penulis menuju arah selatan menuju SDN 11 Polongan, SDN 12 Kubu Kilawit dan SDN 13 Siraba. Ini kondisi jalan menuju SDN 11 Polongan \pm 6 km² dari Ibu kota Kecamatan Samalantan, beraspal tetapi sudah rusak menanjak dan menurun



Peneliti memasuki SDN 11 Polongan, tampak ruang kelas ditutup karena Murid- murid sedang keluar istirahat



Kondisi anak-anak ketika sedang beristirahat, bermain gasing (permainan tradisional)



Peneliti melanjutkan perjalanan ke SDN 12 Kubu Kilawit ± 3 km² dari SDN 11 Polongan



Tampak wakil kepala sekolah (Lorensius) sedang mengisi dan mempelajari Format wawancara setelah mengadakan wawancara dengan penulis seputar Kepengawasan sekolah, pada saat itu kepala sekolah sedang tugas luar.



Ini foto ibu guru yang sedang mengajar kelas 1 di SDN 12 Kubu Kilawit, Beliau seorang guru tenaga honorer BOS dihonor Rp 150.000,00/bulan, tamatan SMA



Ini pak Sudin (guru honorer BOS) dihonor Rp 150.000,00/bulan sedang menambal lantai yang bolong pada sela-sela jam kosong agar anak-anak dan guru tidak terperosok



Penulis melanjutkan perjalanan ke arah selatan barat daya menuju SDN 13 Siraba. Ini kondisi jalan menuju SD tersebut, kebetulan saat itu musim Penghujan, jalan licin, tanah melekat, menanjak menurun dan curam. Tampak ada truk yang terpendam terlihat sang supir dan kernet terpana Kelelahan





Peneliti sampai ke SDN 13 Siraba, saat itu sekolah sedang tutup padahal Waktu masih menunjukkan 10.30 wib.



Kondisi SDN 13 Siraba, ada 2 unit gedung sekolah, 1 unit sudah direhab Dan yang satunya belum



Pemandangan dusun Siraba desa Saba'u pada saat pasca panen padi sawah.



Ini foto tempat pemujaan roh nenek moyang terletak di pinggir jalan menuju SDN 13 Siraba sudah berusia ratusan tahun, masih mempunyai kekuatan gaib Menurut keterangan warga setempat ada satu batu menyerupai tengkorak Manusia yang memiliki kekuatan gaib sudah hilang diambil orang yang Tidak bertanggungjawab.



Hari berikutnya peneliti mengunjungi SDN 14 Mendung Terusan ke arah Utara dari ibu kota kecamatan Samalantan, tampak anak-anak katanya Siswa kelas 6 sedang berpose minta difoto.



Saat ketika akan wawancara dengan kepala sekolah SDN 14 Ijat Jajat Ruhijat, S.Pd Yang masih muda dan sangat *credible*.



Kondisi gedung SDN 14 Mendung Terusan yang sedang direnovasi dan kantor sekolah baru saja selesai direnovasi.





Dua orang ibu guru SDN 14 Mendung Terusan yang sedang asyik mempelajari Format wawancara seputar kepengawasan sekolah setelah mengadakan wawancara dengan peneliti.



Peneliti melanjutkan perjalanan menuju SDN 15 Sungai Lipan masuk dari jalan raya ± 9 km² ke arah barat dari ibu kota kecamatan Samalantan, kondisi jalan sudah pengerasan jalan perkebunan karet, berlobang, batu tajam, menanjak, menurun curam.



Peneliti sedang berfoto dengan kepala sekolah Agus Setiya setelah wawancara Seputar kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah.



Hari berikutnya peneliti mengunjungi SDN 16 Jirak ke arah barat dari ibu kota kecamatan Samalantan, SDN 16 Jirak ini terletak di jalur sutera mau menuju kota Singkawang dari ibu kota kecamatan Samalantan.



Kondisi kelas 4 SDN 16 Jirak, seorang ibu guru sedang mengajar dengan menerapkan sistem pembelajaran PAKEM.





Hari berikutnya peneliti menuju SDN 17 Bamban Rancang ke arah utara Ibu kota kecamatan Samalantan, tampak kondisi jalan yang masih belum Diaspal.



Peneliti berada di SDN 17 Bamban Rancang.



Peneliti bersama kepala SDN 17 Bamban Rancang Walgina, S.Pd setelah Wawancara seputar kepengawasan sekolah oleh pengawas sekolah.



Peneliti mengunjungi SDN 18 Malabae, sekolah ini sudah tutup karena sudah Pukul 11.00 wib, sekolah ini baru ada kelas 3, kondisi gedung masih baik.

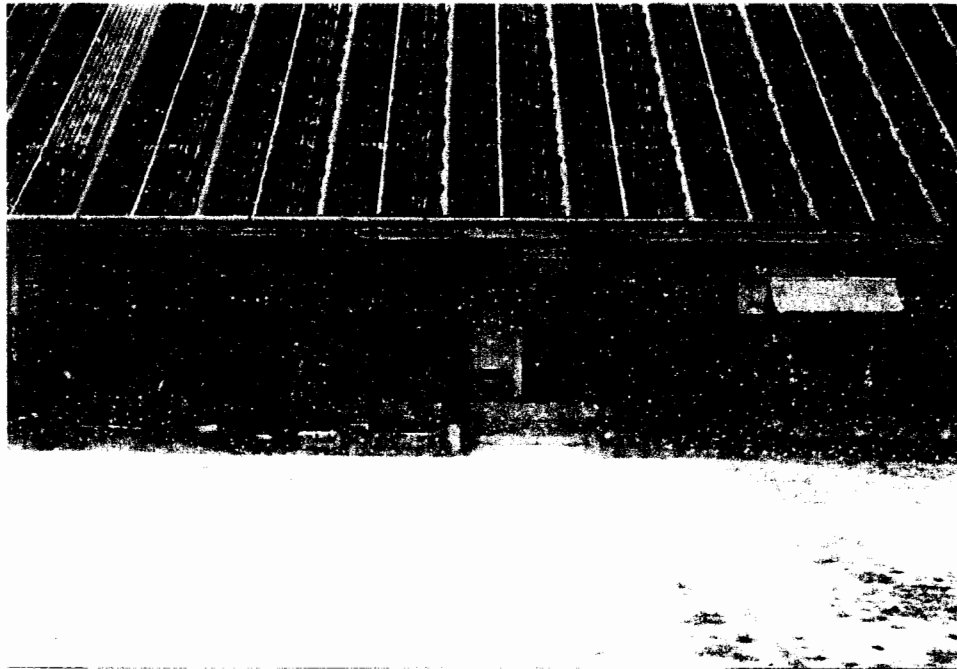




Hari berikutnya peneliti mengunjungi SD Swasta (SDS Sibale). SD ini merupakan SD percontohan dalam pembelajaran PAKEM oleh World Vision International (WVI).



Meja kosong ini terletak di lorong jalan depan kantor, dijelaskan oleh kepala sekolah bahwa meja ini diisi oleh anak-anak pada saat istirahat untuk bermain catur bagi anak-anak yang hobi bermain catur.



SDS Sibale dilihat dari depan



SDS Sibale dilihat dari samping



Kantor SDS Sibale tampak dari depan, tampak kepala sekolah (YB. Sarimin) Beliau baru sembuh dari sakit *stroke*, masih belum pulih benarbelahan badan sebelah Kiri.



Tampak kebun sekolah SDS Sibale.



Saat wawancara dengan kepala sekolah (YB. Sarimin) di ruang kantor guru disugahi Minum dan snack bontok'ng (makanan adat setempat yang terbuat dari beras ketan Dibungkus dengan daun khusus dan dimasak di dalam bambu), makanan ini hanya Ada ketika akan memulai panen padi gunung.



Kondisi ruang kelas yang penuh dengan kreasi anak, SDS Sibale sering dikunjungi oleh tamu-tamu dari luar untuk mencari tahu bagaimana mereka berhasil menerapkan sistem pembelajaran PAKEM.



Kondisi guru-guru SDS Sibale apabila mereka sudah mengajar, mereka tetap berada di ruang kantor untuk menyelesaikan administrasi dan membuat perangkat pembelajaran, alat peraga dsb. untuk persiapan pembelajaran berikutnya.



BIODATA PENULIS

1. Nama : Aladin, S.Pd
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Raya, 12 Nopember 1962
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Status : Kawin
5. Alamat : Jalan Belimbing Blok F No. 6 Perumnas Roban
Singkawang Tengah
6. Agama : Kristen Protestan
7. Pekerjaan : PNS
8. Pendidikan terakhir : S1
9. Nama keluarga : a. Isteri : Dra. Ruth Koesoemarini
b. Anak : 1). Esther Yudika Arijaya
2). Albert Yehezkiel Arijaya
3). Yoram Estomihi Arijaya
4). Ernes Gracia Arijaya
10. Hobi : Menonton olahraga *boxing*, olahraga badminton

UNIVERSITAS TERBUKA